STUDI KASUS PENDIRIAN GEREJA DI WILAYAH DRIYOREJO GRESIK

LAPORAN

HASIL PENELITIAN MANDIRI

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh :

DR. H. KASNO, MAG

NIP. 195912011986031006

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8438369 - 8410298 Fax.031-8413300 E-mail :ushuluddin@sunan-ampel.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B -1667/Un.07/3/D/PP.00.9/12/2017

Menindaklanjuti surat permohonan dari saudara sebagaimana pokok surat Bersama ini kami t Desemberugaskan:

Nama	: Dr. H. Kasno, M.Ag.
NIP	: 195912011986031006
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Lektor Kepala

Untuk melakukan penelitian individual dengan judul "STUDI KASUS PENDIRIAN GEREJA DI WILAYAH DRIYOREJO GRESIK". Surat Tugas ini berlaku selama bulan Januari 2018 s.d Mei 2018. Selesai melaksanakan tugas harap melapor kepada pimpinan

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2017
Dekan,

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 196310021993031002

Daftar Isi

Daftar Isi i
KATA PENGANTAR iii
B A B I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
1. Klaim kebenaran (Absolute Truth Claims) 3
2. Ketaatan buta terhadap pemimpin agama (Blind Obedience) 3
3. Upaya-upaya membangun zaman ideal (Establishing the Ideal Times) 3
4. Tujuan menghalalkan segala cara (The End Justifies Any Means) 3
5. Perang Suci (Declaring Holy War) 3
B. Identifikasi Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Penelitian 12
1. Kegunaan Teoretis 12
2. Kegunaan Praktis 12
B A B II 13
A. Pluralisme Dan Hubungan Antar Umat Beragama 13
1. Pluralisme 13
2. Perspektif Pluralisme Terhadap Hubungan Antar Umat Beragama 22
B. Teori Interaksionisme Simbolik 26
C. Teori Fenomenologi Sosiologis 28
BAB III 34
A. Lokasi Penelitian 34
B. Metode dan Pendekatan Penelitian 34
C. Tahapan Penelitian 35
1. Memasuki Lapangan Penelitian 35
2. Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 36
D. Pengolahan dan Analisis Data 38
E. Keabsahan: Validasi dan Reliabilitas Data 39
B A B IV 41
A. Latar Belakang Kabupaten Gresik 41
B. Demografi dan Penduduk Kabupaten Gresik 43
C. Citra Gresik sebagai Kota Santri 44
D. Gresik sebagai Kota Bandar / Dagang 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Gresik Kota Wisata Religi/Wali 48
F. Gresik Kota Modern 48
G. Driyorejo dalam Konteks Pengembangan Wilayah Kabupaten Gresik 49
1. Pengembangan Wilayah Kota 49
2. Driyorejo Sebagai Kota Mandiri 51
3. Kondisi Sosial dan Budaya 53
4. Kondisi Keberagamaan 54
B A B V 56
A. Relasi Antarumat Beragama Di Gresik 56
B. Pendirian Gereja dan Problematikanya 65
C. Makna Pendirian Gereja Bagi umat Islam dan Nasrani (Katolik-Kristen) 76
1. Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Islam 77
2. Makna Sosial Keagamaan 79
3. Makna Sosial Kemasyarakatan 80
4. Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Nasrani (Katolik dan Kristen) 83
D. Temuan Makna Pendirian Rumah Ibadat (Gereja) dalam konteks Relasi Antarumat Beragama di Gresik 89
B A B VI 91
A. Kesimpulan 91
B. Implikasi Teoretik 92
C. Keterbatasan Penelitian 93
D. Rekomendasi 94
DAFTAR PUSTAKA 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat Nya. Shalawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman. Alhandulillah Penelitian tindividu ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancer, semoga penelitian ini dapat berguna bagi Gereja dan pagi kita semua.

Judul penelitian ini adalah "STUDI KASUS PENDIRIAN GEREJA DI WILAYAH DRIYOREJO GRESIK". Penelitian ini menggambarkan tentang keberadaan Kota Driyorejo yang berada di wilayah Kabupaten Gresik bagian Barat dan hampir berdekatan dengan kota Surabaya. Dalam penelitian ini menceritakan tentang kasus keberadaan Gereja yang memang salah strategi awalnya sebab ia berdiri dengan tanpa ijin telebih dahulu sehingga menjadi menarik.

Sebenarnya kita bangsa Indonesia berupaya menjadikan upaya menemukan pedoman yang berupa aturan yang baku, akan tetapi umat beragama terlebihika dahulu menjadi contoh yang tidak benar.

Hasil laporan ini tentu tidak sempurna, tetapi bisa dijadikan rujukan terhadap kasih yang lain seperti ini, untuk itu perlu kiranya kita jadikan pengantar dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum wr wb

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keberagamaan dalam ruang peradaban manusia merupakan sebuah keniscayaan, khususnya di Indonesia. Secara historis, kepulauan Nusantara yang sekarang bernama "Indonesia" ini memang sudah menjadi tempat hijrah manusia dari berbagai penjuru bumi sejak dahulu kala. Perkumpulan bermacam ras manusia inilah yang kemudian mewarnai bumi Nusantara dengan berbagai aspek peradaban yang mengikutinya, baik itu budaya maupun agama. Meskipun terdapat berbagai ragam budaya dan agama, namun negara Indonesia hanya mengakui keberadaan enam agama besar yang disahkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, yakni agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.[1]

Keragaman latar belakang sosial, budaya dan agama di Indonesia ini tentu merupakan aset bangsa yang tak ternilai. Keragaman ini selain memiliki nilai positif terutama jika dikaitkan dengan potensi kepariwisataan bangsa, juga dapat membantu meningkatkan pengembangan budaya yang ada pada tingkat nasional, terutama untuk memperkaya dan memperkokoh identitas nasional bangsa. Dengan kuatnya identitas nasional ini pada gilirannya akan tertanamnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda. Kondisi ini diharapkan akan memunculkan kesadaran untuk melakukan kerjasama antar daerah dan antar budaya dalam bingkai kesadaran nasional.

Meskipun demikian aset bangsa ini harus dapat dikelola dengan baik dan tepat. Sebab, kondisi pluralitas bangsa seperti ini jika tidak terkelola dengan baik dan tepat tidak menutup kemungkinan akan memunculkan potensi konflik. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat perbedaan ras dan agama dapat memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan

[1] Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris-historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di pulau Jawa. Candi Prambanan dan Borobudur adalah saksi sejarah paling otentik. Kenyataan tidak menafikan tumbuh berkembangnya budaya animisme dan dinamisme, baik di pulau Jawa maupun luar Jawa. Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di kepulauan Nusantara, maka proses perubahan pemelukan (konversi) agama secara bertahap berlangsung. Proses penyebaran dan pemelukan agama Islam di Kepulauan Nusantara yang berlangsung secara masif dan dengan jalan damai tersebut sempat dicatat oleh Marshall Hodgson sebagai prestasi sejarah dan budaya yang sangat mengagumkan. Lihat M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-5, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu, agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia pada kenyataannya membuktikan bahwa perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern.[2] Tempat-tempat terjadinya konflik antar kelompok masyarakat agama Islam - Kristen beberapa waktu yang lalu, nampak perbedaan antara dua kelompok yang konflik itu. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional: sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu bentuk rumah gereja lebih berwajah budaya Barat yang mewah. Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

Belum lagi kondisi perbedaan seperti itu dipicu lagi persoalan jumlah penduduk masyarakat yang bersifat mayoritas-minoritas. Di berbagai tempat terjadinya konflik, massa yang mengamuk sering berasal dari kelompok mayoritas; sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami kerugian fisik dan mental adalah kelompok minoritas.[3] Sehingga nampak kelompok mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang didiami lebih dari kelompok minoritas. Karena itu, di beberapa tempat kelompok minoritas sering mengalami kerugian fisik, seperti: pengrusakan dan pembakaran tempat-tempat ibadat.

Walaupun tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, konflik, dan penguasaan terhadap mereka yang berbeda secara paksa, namun tidak bisa dipungkiri bahwa agama sering "dikesankan" dengan wajah kekerasan. Keterlibatan agama sebagai pemicu terjadinya konflik tentu saja menjadi tanda tanya besar. Sebab, diturunkannya agama ke muka bumi justru membawa pesan ketuhanan dan kemanusiaan yang sama, meskipun jenis agamanya berbeda. Salah satu pesan yang ditekankan oleh agama adalah pentingnya penciptaan perdamaian berdasarkan prinsip persamaan dan kesatuan manusia. Pesan dasar ini tampaknya belum menjadi rujukan kolektif semua pemeluk agama, karena kompleksitas persoalan teologis, historis, dan sosiologis yang melekat pada semua pemeluk agama. Dalam kaitannya dengan

[2] Marshall Battani,John R. Hall, Mary Jo Neitz, *Sociology On Culture*, (NewYork: Routledge, 2004)70-71

[3] Alo Liliweri, *Prasangka dan konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005)112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi kekerasan yang dimainkan oleh agama, Charles Kimball menyatakan paling tidak ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan agama, yakni :

1. **Klaim kebenaran (Absolute Truth Claims)**

Adanya klaim ini pada gilirannya mendegradasi pemahaman umat beragama terhadap ke-Segala-Maha-an Tuhan. Biasanya hal ini disebabkan pemeluk agama meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan kebenaran monolitik (tunggal). Penafsiran kitab suci, dengan demikian berperan penting dalam mewarnai sikap umat beragama.[4]

2. **Ketaatan buta terhadap pemimpin agama (Blind Obedience)**

Munculnya gerakan-gerakan keagamaan radikal, seperti People Temple pimpinan Jim Jones di Guyana, atau Aum Shinrikyo di bawah pimpinan David Koresh di Texas, tak elak dari ketaatan buta ini. Darinya lahir keberagamaan yang membabi buta dan fanatisme berlebihan.[5]

3. **Upaya-upaya membangun zaman ideal (Establishing the Ideal Times)**

Dalam hal ini dijelaskan bahwa jika visi agama tentang zaman ideal itu diwujudkan dan para pemeluknya meyakininya sebagai kehendak Tuhan sendiri, maka agama sebenarnya telah terkorup, dan karenanya jahat. Di Afghanistan, dapat disaksikan bagaimana rezim Taliban berbuat kekejaman terhadap warganya sendiri dengan dalih ketaatan terhadap syariat Islam.[6]

4. **Tujuan menghalalkan segala cara (The End Justifies Any Means)**

Tanda ini biasanya terjadi pada komponen-komponen agama, baik berkaitan identitas maupun institusi agama. Ambisi menunjukkan identitas agama Kristen, misalnya, telah mengakibatkan pembantaian orang Yahudi pada masa Nazi.[7]

5. **Perang Suci (Declaring Holy War)**

Puncak dari keempat tanda di atas adalah merebaknya ide perang suci (holy war atau jihad). Di sepanjang sejarah, ide inilah yang melandasi terjadinya kekerasan dan konflik agama. Ini juga yang tampak pada peristiwa terjadinya pengeboman gedung WTC di Amerika,

---

[4] Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana* . terj. Nurhadi dari When Religion Becomes Evil, (Bandung: Mizan,2003)84 -119

[5] *Ibid*, 125-157

[6] *Ibid*, 164-191

[7] *Ibid*, 197-228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bom Bali dan aksi-aksi terorisme lainnya, juga berada dalam kerangka menegakkan perintah suci Tuhan yang dianggap pelakunya sebagai jalan suci.[8]

Kecenderungan potensial agama sebagaimana diungkapkan oleh Charles Kimball ini tentunya dapat diredam dengan menempatkan agama sebagai faktor integratif. Faktor integratif ini pada dasarnya merupakan rekayasa sosial untuk memoderasi potensi konflik agama menjadi basis kerjasama (cooperation) dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, atau politik. Oleh karena itu negara harus hadir menjadi katalisator aktif untuk merekatkan silahturahmi yang sejuk dalam kehidupan antar dan inter umat beragama. Keterlibatan negara ini dapat berwujud tata aturan perundangan (regulasi), bisa juga berwujud advokasi atau memfasilitasi pendirian forum-forum kerukunan hidup antarumat beragama dalam masyarakat.

Namun demikian, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati tentunya diperlukan tatanan hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama maupun budaya agar terhindar dari konflik. Dengan cara demikian, kerukunan hidup antarumat beragama tetap dapat dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama tetap menjadi bagian dari kekayaan peradaban bangsa yang harmonis. Dengan situasi yang harmonis seperti itu maka kegiatan hidup ditengah-tengah masyarakat menjadi aman dan tentram. Masyarakat minoritas dapat menikmati hidup dengan tenang, baik dari segi kenyamanan beribadat, ekonomi, sosial, dan budaya, bersama umat mayoritas (Islam) tanpa adanya pertentangan, perselisihan atau konflik.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia memberikan konsep yang ideal untuk menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama. Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di amandemen pada Pasal 29 ayat 2 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[9] Dalam konteks ini pemerintah

---

[8] *Ibid*, 234-263

[9] Beberapa kebijakan nasional yang mendasar dan konstruktif bagi pembangunan dan jaminan kebebasan beragama tercermin pada tiga regulasi dasar yaitu UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kembali kemerdekaan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan; UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memasukan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistematis kepada sebuah kelompok atau asosiasi yang salah satunya berdasarkan identitas agama tertentu bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat; dan Perubahan kedua UUD 45 (tahun 2000) yang menegaskan kembali kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan (pasal 28 E ayat 1 dan pasal 28 I ayat 1). Selanjutnya pada tahun 2005 Indonesia juga mempertegas posisinya dalam bidang kebijakan keagamaan dengan meratifikasi International Covenant in Social and Political Right (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Salah satu hambatan serius kebebasan beragama di Indonesia adalah maraknya tindakan kekerasan yang bernuansa agama. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa perusakan, penutupan bahkan sampai pada pembakaran tempat ibadah. Fenomena tersebut dapat di lihat dari data yang di laporkan Komnas HAM bahwa tindak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terhimpun baik melalui pemantauan maupun pengaduan masyarakat baik oleh korban maupun oleh kelompok-kelompok pemantau dan pendamping mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Apabila pada tahun 2013, jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM berjumlah 39 berkas, maka pada tahun 2014 ini naik menjadi 67 berkas.

Dari kasus-kasus yang diadukan pada tahun 2014 ini, dapat disimpulkan tiga kategori tema pengaduan kebebasan beragama/berkeyakinan: Pertama, tindakan penyegelan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah 30 berkas. Kedua, diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu 22 berkas. Ketiga, penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah 15 berkas.[10]

Catatan The Wahid Institute menyebutkan bahwa masih ditemukan intoleransi di 18 provinsi di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan Direktur The Wahid Institute Zannuba Arifah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid, pihaknya merekam peristiwa-peristiwa yang terkait KBB selama 2014. Sebagian temuan merupakan kasus lama atau menahun yang tidak terselesaikan. Sebanyak 18 wilayah yang menjadi cakupan Wahid Institute meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua. Total temuan pelanggaran KBB sepanjang 2014 adalah 158 kasus. Dari sisi pelaku, negara sebagai aktor pelanggaran KBB tercatat di 80 kasus, dan 78 kasus lainnya dilakukan aktor non-negara.

---

meratifikasi aturan ini, berarti negara sepakat untuk menghargai, melindungi dan memenuhi kebebasan beragama warganya.

[10] Laporan akhir tahun 2014, tentang Kebebasan Beragama Berkeyakinan yang disampaikan oleh Komnas HAM RI 2014 Disamapaikan Pada Tanggal 23 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan negara muncul karena pemerintah setempat atau aparat keamanan ikut mengambil keputusan saat pelaku intoleran melaporkan kelompok minoritas yang dinilai mengganggu lingkungannya.[11]

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat dari 7 provinsi terdapat 26 peristiwa, sedangkan untuk tahun 2014 ELSAM mencatat dari 11 provinsi terdapat 52 peristiwa. Menurut Deputi Direktur Pembela HAM untuk Keadilan dari Lembaga Study & Advokasi Masyarakat (ELSAM), yakni Wahyu Wagiman, SH hal ini mengalami penurunan. Catatan ELSAM ini lebih berfokus pada kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masuk ke pengadilan.[12]

Sementara itu hasil pantauan Setara Institut pada akhir tahun 2014 mencatat 134 peristiwa dengan 177 bentuk tindakan yang tersebar pada 26 Provinsi. Pada bulan Mei terdapat 20 peristiwa, Desember 19 peristiwa, Januari 13 peristiwa, Februari 11 peristiwa, September 12 Peristiwa, Oktober 11 peristiwa, Nopember 9 peristiwa, Maret dan pril masing-masing 9 peristiwa, Agustus 8 peristiwa, bulan Juli dan Nopember masing-masing 5 peristiwa.[13]

Terjadinya konflik yang bernuansa suku agama dan ras di sejumlah daerah di Indonesia nampaknya masih menjadi potensi laten. Hal ini didukung oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia, sentimen keagamaan. Perbedaan agama yang ada sering menjadi konflik antar umat beragama. Sulitnya menerima perbedaan ini mendorong terjadinya aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang berbeda agama. Sejatinya, perbedaan itu mutlak ada dan merupakan hak bagi bangsa Indonesia dan dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Negara RI 1945.[14]

Beberapa peristiwa yang memicu terjadinya konflik muncul berkaitan dengan pembangunan sarana ibadah yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam

---

[11] Laporan Akhir Tahun 2014 " The Wahid Institut ", yang sampaikan oleh Yenny Wahid dalam keterangan pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin , 29-12- 2014.

[12] *Press Room*, ELSAM Tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan " Catatan Akhir Tahun Kebebasan Beragama /Berkeyakinan 2014, disampaikan pada : Selasa, 30 Desember 2014

[13] Halili dan Bonar Tigor Naipospos., *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*., Ismail Hasan & Suryadi A. Radjab (ed.) (Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, Pebruari , 2015) 30

[14] UUD RI Tahun 1945 pasal 29 ayat (2).. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan haknya dalam beragama. Munculnya bangunan-bangunan yang bernuansa agama (terutama agama minoritas) memunculkan ancaman yang begitu besar. Setiap kali pembangunan rumah ibadah, sekolah agama, rumah sakit/klinik, panti asuhan, dan panti jompo milik agama minoritas, maka yang terlintas di benaknya adalah adanya bahaya. Kalau yang mayoritas adalah Muslim, maka Muslim akan terancam dengan munculnya bangunan bernuansa agama lain tersebut. Kalau Kristen yang mayoritas seperti di Papua, maka mereka akan terancam dengan bangunan ibadah agama lain, misalnya: Pendirian Kasus Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura, Masjid Kuba ini terletak di Jalan Trans Papua Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura, Kasus Pendirian Masjid Al-Mawaddah Rt. 01/IX Jl. Feliyau II Hawai Sentani Kab. Jayapura. Permasalahannya adalah rasa sentimen dan ketidaksukaan warga mayoritas terhadap pendirian Rumah Ibadat minoritas.[15]

Konflik yang disebabkan persoalan rumah ibadah merupakan persoalan yang pelik dan cukup sensitif. Oleh karenanya masalah ini harus dilihat dari beberapa kerangka, antara lain: pertama, posisi negara. Negara sebagai komunitas bayangan yang merangkum aneka kepentingan masyarakat itu didirikan atas kontrak semua kelompok dan elemen masyarakat. Hal ini merupakan gagasan etis modern tentang negara. Negara dengan sendirinya menjadi tempat kelompok-kelompok yang bisa melakukan transformasi menuju cita-cita yang diidealkan.[16]

Gagasan ini dapat diartikan bahwa negara menjadi tempat dan mekanisme transformasi yang disepakati, dengan sendirinya wilayah negara melahirkan entitas negara dan entitas warga. Warga adalah pemberi mandat dan negara adalah yang diberi mandat. Dalam konteks negara yang didirikan oleh banyak kelompok, maka negara harus menjamin kebebasan keyakinan dan keberagaman masing-masing kelompok, bukan memberi hak luas kepada satu kelompok dan mendiskreditkan kelompok lain. Oleh karenanya dalam hal ini negara harus memiliki seperangkat aturan hukum yang bisa menjadi patokan lalu lintas bernegara, dan

[15] Ibnu Hasan Muchtar., "Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota/Kabupaten Jayapura Provinsi Papua" dalam dalam ' Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah ibadat., Haidlor Ali Ahmad (ed). Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI) 2012, cet.I hal. 306

[16] Lihat gagasan tentang negara dalam Bennedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang* (Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2001), 35-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya aturan hukum tersebut bukan untuk mengawasi dan mengintimidasi warga negara atau mendiskriminasikan kelompok agama lain.

Kerangka kedua adalah konflik sosial. Tidak dapat dipungkri bahwa persoalan pendirian rumah ibadah seringkali berujung pada konflik sosial. Konflik terjadi ketika persaingan dan kompetisi untuk mencapai sebuah tujuan tidak memperoleh kanalisasi yang semestinya, sehingga akan melahirkan ketidakpuasan sebagai kondisi awal konflik.[17] Konflik sosial senantiasa melibatkan dua kelompok sosial atau lebih, kelompok agama dalam hal ini juga merupakan kelompok sosial.[18] Berbagai kelompok sosial dalam masyarakat di suatu wilayah memiliki posisi sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Karena kelompok sosial memiliki posisi maka ia juga memiliki otoritas. Otoritas tersebut secara mendasar ditentukan oleh posisi basis sosial mereka dan kekuatan yang dimiliki dalam masyarakat untuk dapat melakukan hegemoni.

Adanya perbedaan agama yang disertai memuncaknya sensitivitas kecurigaan yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kerentanan sosial. Jika yang dimenangkan adalah kelompok mayoritas, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Tentu saja agama minoritas yang memiliki kerentanan yang paling tinggi ketika hidup di komunitas masyarakat yang beragama mayoritas.[19] Oleh karenanya kesadaran akan hak asasi manusia bagi komunitas beragama sangatlah urgen, mengingat bahwa seringkali absolutisme yang berbentuk dominasi dan hegemoni komunitas beragama mayoritas membuat komunitas minoritas merasa kesulitan bahkan ada keterbatasan untuk mengekspresikan dan menjalankan ritual keagamaannya.

Beberapa peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh persoalan rumah ibadat masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sederet peristiwa konflik karena persoalan rumah ibadat masih mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin menelusuri problematika

---

[17]Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 254.

[18] Lihat teori konflik Ralf Dahendrof dalam Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 143-153.

http: //www.lakpesdam.or.id/publikasi/348/pluralisme-dan-kerentanan-sosial-dalam-hubungan-antaragama

[19] http: //www.lakpesdam.or.id/publikasi/348/pluralisme-dan-kerentanan-sosial-dalam-hubungan-antaragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan warga dan penutupan serta pemberhentian pembangunan rumah ibadat (gereja) di Driyorejo, Gresik[20].

Secara sosiologis, kondisi sosio-religius masyarakat Gresik sangat stabil dan bahkan Gresik dikenal sebagai kota 'Santri'[21] yang berarti kondisi sosialnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Begitu kentalnya istilah tersebut, hampir-hampir seluruh gerak nafas kehidupan dalam masyarakat mengambarkan kesan sebagai masyarakat yang religius. Akan tetapi dalam proses pengembangan wilayah ekonomi dan sosial-budaya, pemerintah telah mengembangkan Gresik bagian selatan yang berdekatan dengan kota Surabaya, sebagai kawasan industri dan real-estate, yang sudah barang tentu sangat memerlukan kebutuhan infrastruktur seperti sekolah, tempat-tempat ibadat, sarana olahraga maupun sarana kesehatan. Salah satu kebutuhan infrastruktur tersebut adalah kebutuhan tempat ibadat, yaitu pendirian gereja dikawasan perumahan.

Salah satu wilayah perumahan yang berupaya memenuhi kebutuhan infrstruktur tersebut adalah Perumnas Kota Baru Driyorejo, yang merupakan komplek perumahan yang diadakan oleh Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL V yang merupakan perumahan non-dinas, jadi untuk masyarakat umum dan khususnya keluarga Besar TNI AL. Kebutuhan akan adanya rumah Ibadat di komplek Perumahan tersebut merupakan kebutuhan mutlak dan hak warga Negara yang harus dipenuhi. Dengan alasan untuk pembinaan masyarakat khususnya keluarga besar AL, maka Komandan Pangkalan Utama TNI AL V mengeluarkan surat izin pendirian 4 (empat) Gereja : (1)Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), (2) Gereja Kristen Bethany Indonesia (GBI), (3) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan (4) Gereja Katolik Santo Gabriel. Izin pendirian gereja-gereja tersebut ditindak lanjuti dengan pembangunan gedung dan fasilitas serta kegiatan peribadatan. Keberadaan gereja-gereja tersebut ternyata, kemudian menimbulkan protes dan penolakan oleh masyarakat sekitar dan timbul aksi-aksi demo sebagai wujud ketidaksetujuan mereka.

---

[20] Konstelasi penganut agama turut memengaruhi konstelasi politik lokal yang masih didominasi politik aliran. Kabupaten Gresik merupakan daerah campuran budaya Arek dengan Madura. Kedua budaya sangat lekat dengan tipe budaya Islam tradisional yang sangat kuat memiliki patron-client. Pola aliran ini sangat terasa pada dua hal (1) konstelasi politik lokal dan (2) jenis, tipe, model perluasan konflik yang muncul antara perusahaan dengan masyarakat atau perusahaan dengan pemerintahan lokal.

[21] Sebutan Kota Santri dikalangan masyarakat Jawa Timur karena nuansa religious sangat kental di kota ini dan dalam sejarahnya kota ini menjadi pusat penyiaran Islam di Pulau Jawa. Ada tiga wali dari Sembilan wali dimakamkan di kota ini antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang dan Sunan Drajat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui Surat dengan nomor 460/777/437.108/2010, tertanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengurus Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel,[22] pemerintah Kabupaten Gresik menghentikan seluruh kegiatan pembangunan, melepas segala simbol dan label dan menghentikan segala bentuk kegiatan, peribadatan/kebaktian pada kedua gereja tersebut. Keputusan Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut dilakukan setelah meneliti dan mempertimbangkan 14 dokumen yang berisi Peraturan Pemerintah dan surat-surat, berkesimpulan bahwa kedua Gereja tersebut tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang ada.[23]

Menyadari bahwa persoalan pendirian rumah ibadah menjadi salah satu pemicu konflik, maka penelitian ini akan menyoroti persoalan pendirian rumah ibadah dilihat dari perspektif sosiologis, lebih-lebih kaitannya dengan antar umat beragama yang semakin individualis. Di samping itu peneliti akan memotret dinamika hubungan antarumat beragama yang disebabkan oleh persoalan pendirian rumah ibadah, sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang sesungguhnya, apakah disebabkan persoalan regulasi dalam hal ini keberlakuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang menjadi rujukan prosedur pendirian rumah ibadah dianggap masih memberatkan komunitas umat beragama minoritas, ataukah faktor psikologis hubungan mayoritas dan minoritas yang berlainan keyakinan atau bahkan faktor lain yang belum terungkapkan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terkait dengan hubungan antar-umat beragama dalam berbagai hal memang dapat menjadi pemicu konflik, misalnya, kesalahfahaman, permasalahan politik, sosial dan ekonomi bahkan sentimen pribadi antar-pemeluk agama. Namun dalam kasus penelitian ini yang menjadi pemicu konflik antar-pemeluk agama di Komplek Perumahan Non-Dinas Angkatan Laut Driyorejo Gresik adalah pendirian rumah ibadat (gereja).

---

[22] Surat izin tertanggal 12 Nopember 2009 ditujukan kepada keempat Ketua Pembangunan Gereja tersebut dengan nomor surat: 163-20/03/14/lant V untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, dan nomor: 165 -20/03/14/lant V untuk Gereja Kristen Bethany

[23] Surat Penghentian kegiatan Pembangunan kedua gereja tersebut ditanda-tangani oleh Wakil Bupati Gresik Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si dengan tembusan kepada semua instansi terkait mulai Ketua DPRD Gresik, Muspimda Gresik, Dan lantamal V sampai Kepala Desa Mulung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, meski pendirian gereja ini dapat dilihat dari aspek konfliktualnya karena menyangkut pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006), namun kasus ini juga dapat dilihat dari aspek fungsionalnya, yakni dapat dilihat dari berfungsi atau bermaknanya pendirian gereja itu.

Hal ini wajar mengingat setiap pendirian rumah ibadat selalu memiliki aspek-aspek motivasional atau simbolis. Rumah ibadat merupakan proyeksi dan simbol dari keyakinan atau keimanan bagi penganutnya. Oleh karena itu wajar jika rumah ibadat selalu memiliki makna yang dalam bagi pemeluknya. Penelitian ini akan difokuskan pada aspek makna pendirian Gereja di Komplek Perumahan Non-Dinas Angkatan Laut Driyorejo Gresik. Secara operasional, fokus ini akan mempertanyakan: bagaimanakah sebenarnya makna pendirian gereja tersebut baik bagi umat Islam maupun penganut Kristen?. Permasalahan inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Fokus ini menarik untuk dikaji karena akan mendeskripsikan persoalan pendirian rumah ibadat (gejera) baik ditinjau dari tindakan eksternal maupun internal pemahaman masing-masing umat dalam menyikapi pendirian rumah ibadat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, pokok masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan atau relasi antarumat beragama di Driyorejo dan Gresik pada umumnya ?
2. Bagaimana proses pendirian Gereja di fasilitas umum Perumahan Non-Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik?
3. Apa makna pendirian gereja bagi umat Islam dan Nasrani (Katolik - Kristen) di Driyorejo Gresik?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan atau relasi antar umat beragama di wilayah Perumahan Non-Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses pendirian gereja di wilayah Perumahan Non-Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui dan memahami makna pendirian gereja bagi pemeluk agama, baik Kristen maupun Islam di Driyorejo Gresik;

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara akademik, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi para akademisi dalam rangka pengembangan keilmuan terkait dengan permasalahan konflik dan integrasi baik intern maupun antar-umat dalam lingkungan masyarakat beragama di daerah-daerah dan di seluruh Nusantara.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian lain untuk melakukan studi lanjutan atau studi komparatif tentang kerukunan antarumat beragama dalam ruang (kondisi sosial budaya) dan waktu yang berbeda. Hal ini dapat menambah perbendaharaan hasil kajian empirik dan memberikan kerangka teori untuk menjelaskan konsepsi konflik yang melibat masyarakat yang berbeda keyakinan agama maupun masyarakat pada umumnya.

Selain itu, hasil studi ini akan berguna terutama dalam konteks pengayaan studi di bidang sosiologi agama. Lebih lanjut penelitian ini juga akan membantu memenuhi kebutuhan informasi seputar warna budaya dan ciri khas agama di daerah perkotaan maupun pedesaan yang rawan dengan konflik sosial yang berbasis pada kehidupan sosial-keagamaan. Di samping itu, akan memberi perspektif lain tentang definisi agama dalam memahami urgensi perumusan ulang bangunan sosiologi agama, psikologi agama, maupun antropologi agama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik antar-umat beragama di Indonesia khususnya Jawa Timur. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa rumah ibadat bukan sekedar sebagai tempat berkumpul sekelompok orang akan tetapi merupakan simbol komunitas dan kepercayaan. Bagi pemerintah khususnya hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B II

KAJIAN TEORETIK

RELASI ANTARUMAT BERAGAMA

Penelitian ini bersifat kualitatif dan akan difokuskan pada pendalaman makna relasi sosial antarumat beragama khususnya berkaitan dengan pemaknaan pemeluk agama (Muslim dan Kristiani) di Gresik terhadap pendirian gereja yang ada di perumahan non-dinas TNI AL Driyorejo Gresik. Dalam upaya mengungkap permasalahan tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan kajian teoritik baik sebagai landasan penelitian maupun sebagai kerangka analisis.

Sebagaimana dipahami bahwa hubungan atau relasi sosial antarumat beragama mengasumsikan adanya kemajemukan institusi sosial keagamaan. Sehingga wajar jika hubungan dan interaksi sosial antarumat beragama sangat dipengaruhi secara signifikan oleh keberadaan bermacam-macam agama yang memiliki latar belakang dan dinamika sosialnya tersendiri. Berbagai variabel kepercayaan, pemahaman serta pengamalan keagamaan di ruang sosial ini pada gilirannya akan memberikan karakteristik bagi pola dan model interaksi antarumat beragama dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Untuk memahami fakta sosial ini diperlukan pendekatan teoritik pluralisme dan interaksionisme-simbolik.

Dalam dataran yang lebih mikro, hubungan antarumat beragama selalu melibatkan peran subyektif dalam memahami dan mengerti keberadaan umat lain yang berbeda dengan agama yang diyakininya, maka penyingkapan makna antar individu dalam terjalinnya interaksi antarumat beragama harus juga diungkap secara obyektif tanpa reduksi dan intervensi dalam penelitian ini. Untuk kepentingan itu maka peneliti juga menggunakan teori sosiologi fenomenologi. Teori ini akan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk memahami makna dari masing-masing individu yang terlibat dalam penolakan pendirian rumah ibadat atau gereja) yang ada di wilayah Driyorejo Gresik sebagai lokus penelitian.

A. Pluralisme Dan Hubungan Antar Umat Beragama

1. Pluralisme

Kata pluralisme semula merupakan terminologi filsafat yang berkembang di dunia Barat. Istilah ini muncul dari pertanyaan ontologis tentang “yang ada” (what is being?). Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian muncul empat aliran yaitu: monisme, dualisme,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pluralisme, dan agnostisisme. Monisme beranggapan bahwa "yang ada" itu hanya satu, yang serba spirit, serba roh, dan serba ideal. Aliran ini dipelopori oleh Plato. Dualisme beranggapan bahwa "yang ada" itu terdiri dari dua hakikat, yang berupa materi dan roh. Aliran ini dipelopori oleh Rene Descartes. Pluralisme beranggapan, "yang ada" itu tidak hanya terdiri dari materi dan roh atau ide, melainkan dari banyak unsur. Sedang agnostisisme mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun rohani termasuk juga yang mutlak dan transenden.[24]

Selanjutnya pluralisme merupakan pandangan filsafat yang beranggapan bahwa kebenaran tidak hanya datang dari sumber yang satu, yang serba ideal, melainkan juga berasal dari sumber lainnya, yang bersifat plural. Tokoh-tokoh yang berpandangan demikian adalah Gottfried Wilhelm von Leibniz (w. 1716) dan Bertrand Russell (w. 1970). Di Inggris pandangan pluralisme semakin popular pada awal abad kedua puluh melalui para tokoh seperti F. Maitland, S. G. Hobson, Harold Laski, R. H. Tawney, dan G. D. H. Coley.[25] Sebenarnya pemikiran pluralisme tersebut digulirkan untuk menetralisir kontroversi antara Gereja Anglikan dan Gereja Katolik serta munculnya denominasi (sekte-sekte) yang ada dalam Protestan. Dari sinilah kemudian para filsuf itu menggagas perlunya kebebasan beragama, tanpa ada dominasi kelompok mayoritas Katolik terhadap minoritas Protestan di Prancis abad ketujuh belas.[26] Sejak itu istilah pluralisme ini lebih dekat dikaitkan dengan realitas kehidupan beragama, dengan istilah pluralisme agama.

---

[24] M. Zaenuddin, *Filsafat Ilmu*: *Perspektif Pemikiran Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), 25-26

[25] Muhyar Fanani, "Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat" dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam (Salatiga: P3M STAIN Salatiga, 2003), 19.

[26] Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid 2* (Jakarta: Kanisius, 1980), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai pendekatan dan teori tentang pluralisme agama telah dilakukan oleh berbagai akademisi dengan berbagai latar keilmuan. Kajian dan penelitian tentang pluralisme agama yang dilakukan oleh para ilmuwan ini tentunya memiliki tujuan dan capaian yang sesuai dengan latar belakang keilmuan yang bersangkutan. Dalam perspektif sosiologis, kajian tentang pluralisme agama diharapkan dapat memberikan informasi tentang relasi sosial antar-kelompok dan aliran keberagamaan yang dominatif dan hegemonis, dan menegasikan pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok sosial. Sedangkan dalam perspektif budaya, kajian pluralisme ini akan memberikan informasi tentang adanya satu aliran yang dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama (mainstream of organization) yang hegemonis, dan di sisi lain juga memberikan informasi tentang arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Adapun dalam perspektif politik, ia dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan, memiliki keyakinan, dan mengekspresikannya tanpa rasa takut ancaman kekerasan, karena tersedia lembaga pengelola konflik kepentingan antar-aliran keagamaan.[27]

Apabila dilacak dalam sejarah, pluralisme agama muncul pada masa yang disebut Abad Pencerahan (Enlightenment) Eropa, tepatnya pada abad kedelapan belas Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Zaman ini diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal dan pembebasan akal dari kungkungan ajarana agama. Sebagai konsekuensi logis dari adanya konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan di luar gereja, maka lahir paham yang dikenal dengan "liberalisme", yang kandungan utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan, dan keragaman atau pluralisme. Oleh karena liberalisme pada awalnya muncul dalam mazhab sosial-politis, maka wacana pluralism, termasuk pluralisme agama, muncul dan hadir dalam kemasan pluralisme politik.

Diana L. Eck membagi pluralisme agama dalam empat karakteristik. Pertama, pluralisme dibedakan dengan diversitas, tapi merupakan keterlibatan yang energetis dengan keragaman (the energetic engagement with diversity). Diversitas agama adalah sesuatu bersifat pemerian sementara pluralisme agama merupakan suatu capaian yang harus senantiasa diusahakan secara aktif. Kedua, pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan

[27] Lihat lebih lanjut dalam : M. M. Billah, "Pluralitas Agama: Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM," Makalah (Malang: UIN Malang, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan (active seeking of understanding across line of difference). Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi merupakan usaha untuk menemukan komitmen bersama (the encounter of commitment). Keempat, pluralisme selalu berbasis pada dialog. Dialog berarti keterlibatan dua orang atau lebih untuk berbicara dan mendengar. Keduanya berproses untuk membuka pikiran mengenai persamaan pemahaman dan realitas perbedaan.[28] Yang terpenting adalah adanya komitmen dan kesediaan untuk selalu sharing, mengkritik, dan mau dikritik.

Mukti Ali, seorang ilmuwan yang juga bapak perbandingan agama di Indonesia mengajukan beberapa tipe pluralisme keagamaan. Pluralisme menurut Ali merupakan realitas yang jelas kelihatan. Di Indonesia pun terdapat banyak agama, dan setiap agama mengajarkan ajaran hidup yang berbeda-beda sebagai ekspresi dari pemeluknya dalam memahami ajaran Tuhan. Karena itu Bangsa Indonesia hidup dalam suasana masyarakat serba jamak (plural society), maka dibutuhkan jalan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan keagamaan.

Mukti Ali juga mengemukakan beberapa pilihan yang diajukan para ahli untuk menumbuhkan nilai-nilai pluralisme. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa semua agama sama, tipe ini disebut sinkretisme. Di Indonesia, sinkretisme menjadi ajaran utama bagi kelompok kebatinan. Kedua, reconception. Sebuah pendapat yang berarti menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama. Pola ini menghendaki agar disusun agama universal yang memenuhi kebutuhan semua orang dan bangsa dalam bentuk rekonsepsi, di mana setiap individu penganut agama harus memasukkan unsur-unsur dari agama lain. Ketiga, pola sintesis. Pendapat ini berarti menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambil dari berbagai agama. Cara ini dilakukan agar setiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dalam agama sintesis itu. Dengan cara ini setiap pemeluk agama berharap dapat menemukan kehidupan yang rukun dan damai. Keempat, disebut pergantian, yang berarti mengakui bahwa agama sendiri itulah yang benar sedangkan agama orang lain adalah salah. Dengan demikian akan ada usaha untuk memasukkan pemeluk agama lain ke dalam agamanya. Ia tidak rela ada orang lain memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda karena itu agama-agama lain yang ada harus diganti dengan agama yang ia peluk agar tercipta kerukunan hidup dalam beragama.

[28] Diana L. Eck, "*What is Pluralism", Nieman Reports God in the Newsroom Isuue*, Vol. XLVII, No. 2, Summer (1993), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, disebut to agree in disagreement. Pola ini mengajarkan bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik dan mempersilahkan orang lain mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Tipologi ini juga mengajarkan bahwa setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan, maka sikap yang perlu dikembangkan dalam kaitan ini adalah saling menghargai antar-pemeluk agama.[29]

Sementara itu Abdul Azis Sachedina menyatakan pluralisme merupakan satu kata yang paling ringkas untuk menyebut suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai perlu disadari agar warga Negara terpanggil untuk hidup berdamai dalam perbedaan.[30] Pernyataan ini menujuk fakta bahwa keragaman kultur akan melahirkan konflik yang berkepanjangan. Sejarah hubungan antar-umat beragama menjadi bukti betapa keragaman agama dan keyakinan dapat menimbulkan konflik abadi yang melibatkan umat Islam dan umat Kristen.

Sachedina menyatakan pluralisme agama bisa mengandung nilai positif. Ia menegaskan bahwa pluralisme agama dalam suatu komunitas umat beragama menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusif: sebuah prinsip di mana kondisi yang lebih mengkomodir berbagai klaim kebenaran agama dalam masyarakat yang heterogen baik secara kultural dan religius. Sikap inklusif bermuara pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang dapat memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral.[31]

Dalam tradisinya, lanjut Sachedina, Islam mengakui dan menilai agama-agama lain secara kritis. Islam juga tidak pernah menolak dan menganggapnya salah. Bahkan dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa manusia adalah satu umat dan Tuhan menyimpan kekuatan untuk menyatukan manusia menjadi satu umat. Seperti dalam QS. al-Baqarah [2]: 213 :

Artinya :

---

[29] A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (ed.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), 227-229.

[30] Abdul Azis Sachedina, *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi, 2002), 48.

[31] Ibid,.49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Menurut Sachedina, ayat tersebut memunculkan tiga fakta, yaitu: kesatuan umat manusia di bawah satu Tuhan, kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi, dan peranan wahyu (Kitab Suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara umat beragama. Ketiga hal ini disebut sebagai fondasi al-Qur'an mengenai pluralisme agama.

Di satu sisi, konsep al-Qur'an tidak mengingkari kekhususan berbagai agama berkaitan dengan praktik dan kepercayaan yang benar, sementara di sisi lain, konsep al-Qur'an menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dalam penciptaan dan kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar-umat beragama. Dijelaskan pula bahwa argumentasi utama pluralisme agama dalam al-Qur'an didasarkan pada hubungan antara keimanan privat (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat Islam. Berkaitan dengan keimanan privat, al-Qur'an bersikap non-intervensionis, yang berarti bahwa segala bentuk otoritas manusia tidak boleh menggangu ketenangan batin seseorang. Sementara berkaitan dengan proyeksi publik keimanan, sikap al-Qur'an didasarkan pada prinsip koeksistensi. Artinya, kesediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri dalam menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum Muslim.[32]

Islam sebagai agama universal telah juga memberikan arahan kepada umatnya berkaitan dengan fenomena pluralitas kehidupan umat manusia. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat al-Qur'an yang menyinggung masalah hubungan antar-umat manusia yang berbeda agama, antara lain: Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik

[32] *Ibid.*, 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemeluk agama lain khususnya ahli Kitab, yakni sebagaimana tertuang dalam QS. al-‘Ankabut (29): 46;

> *“Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri"*

Kemudian larangan memaksakan agama sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah (2): 256:

> *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Demikian juga dalam QS. Yunus (10): 99;

> *“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”*

Sementara dalam QS. Ali Imran (3): 64, umat Islam dan umat agama lain dihimbau untuk mencari titik temu (kalimat sawa’) dalam agama masing-masing dalam ber-Tuhan :

> *“Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"*

Adapun berkaitan dengan wilayah ‘ubudiyah masing-masing dilakukan sesuai ajaran agama sendiri-sendiri, tidak boleh dicampuradukkan antara agama satu dengan ajaran agama lain. Bagi umat Islam sesuai ajaran agama Islam dan bagi umat agama lain sesuai agamanya sendiri-sendiri, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Kafirun (109): 1-4:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir; (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah".

Sebaliknya dalam bidang sosial kemanusiaan, tidak ada larangan berbuat baik bagi pemeluk agama lain yang tidak memusuhi dan mengusir dari negeri umat Islam, hal ini sebagaimana tertuang dalam QS. al-Mumtahanah (60): 8-9 :

"(8). Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (9) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Pada beberapa pernyataan lainnya dalam kitab suci al- Qur'an ada pula ditegaskan batasan-batasan yang berkaitan dengan interaksi antar kelompok berbeda agama, perkawinan antar pemeluk berbeda agama, mengangkat pemimpin bagi umat Islam, dan lain sebagainya.

Upaya mengakui dan menegaskan batas-batas interaksi dengan pemeluk agama lain tentunya harus dihormati. Hal ini penting untuk membangun interaksi produktif antara kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda. Menegaskan batas toleransi tidak berarti menciptakan intoleransi hanya karena mereka tidak bisa menerima beberapa bentuk keyakinan dan praktek atau tindakan orang yang beragama berbeda. Sebaliknya, mengembangkan batas toleransi adalah penegasan toleransi dalam arti "*Neither accepting nor condoning others' belief or action. Non-acceptance of others is not equivalent to intolerance".*[33] Mengingat batas-batas toleransi sangat penting menentukan kualitas kerukunan, maka ada membedakan

[33] Robert Paul, "Nonacceptance is Not Intolerance" in Louis J. Hamman dan Harry M. Buck eds., *ReligiousTraditions and the Limits of Tolerance* (Chambersburg, Pennsylvania: Anima Publication, 1988)76-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toleransi kepada tiga karakteristik, yakni (1) *Zero Tolerance,* (2) *Relative Tolerance, dan* (3) *Absolute Tolerance*.[34]

Zero tolerance menyatakan ketidakadaan toleransi terhadap kepercayaan atau sikap keberagamaan orang lain. Bagi penganut model toleransi ini yang menjadi ukuran kebenaran adalah dirinya sendiri, tidak ada kebenaran lain diseberang keyakinan atau agamanya. Sebaliknya, Absolute Tolerance mengakui bahwa terdapat kebenaran lain di seberang keyakinan dan agamanya. Baginya, semua agama adalah sama karena tujuan dan esensinya sama. Sedangkan relative tolerance menyatakan diri bahwa meskipun agama dan keyakinannya sendiri yang paling benar, tetapi dia juga menghormati kebenaran agama lain, meskipun dianggapnya sebagai agama dan keyakinan yang salah. Dalam upaya membangun kerukunan ini, maka toleransi yang produktif disertai dengan sikap relative toleransi merupakan pilihan ideal dalam konteks masyarakat Indonesia.

Sementara, Paul F. Knitter menambahkan jenis toleransi malas-malasan (lazy tolerance). Munculnya sikap toleransi jenis ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (indirect encounter) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan diantara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik (*Lazy tolerance is the death of dialogue*)[35]

---

[34] Absolute Tolerance ini merupakan pendirian sejati dari kaum penganut pluralisme. Lihat lebih jauh dalam : Diana L. Eck, "From Diversity to Pluralism", menyatakan dalam empat statement tentang Pluralism. Lihat juga: Albert Dondeyne, *Faith and the World (Dublin: Gill and Son*, 1963), 23, yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa toleransi harus bersifat absolut.

[35] Brennan Hill,Paul F. Knitter,William Madges, *Faith, Religion & Theology: A Contemporary Introduction* (Twenty-Third Publications, 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian teoritis terhadap pluralisme ini pada dasarnya dipergunakan sebagai pijakan teoritis dan pisau analisis terhadap fenomena sosial agama di Gresik terutama terkait kasus Driyorejo sebagai lokus penelitian. Kajian teoritis akan memberikan rasionalitas tentang interaksi sosial keagamaan yang terjadi di daerah Driyorejo dan sekitarnya yang memiliki setting keagamaan yang bervariasi, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Setting sosial keberagamaan yang bervariasi berikut dengan dinamika interaksi sosial yang terjadi di Gresik berkaitan kasus di Driyorejo hanya dapat dipahami secara logis dan rasional jika dengan menggunakan pendekatan teoritis tentang pluralisme.

2. Perspektif Pluralisme Terhadap Hubungan Antar Umat Beragama

Dalam tataran praktis, pluralisme sering dikaitkan dengan dialog antar-umat beragama. Secara garis besar pengertian pluralisme praktis dapat disimpulkan antara lain:

Pertama, pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang penting adanya keterlibatan aktif terhadap kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pluralisme agama bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan dan kebhinekaan.

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas, di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan dalam suatu lokasi. Seperti kota New York, kota Kosmopolitan di dalamnya terdapat berbagai agama bahkan ateis. Seakan seluruh penduduk dunia dan penganut agama ada di sini. Namun interaksi positif antar penduduk dan penganut agama sangat minim.

Ketiga, pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis berpandangan bahwa kebenaran dan nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka bersikap seseorang atau masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, pluralisme agama juga bukan sinkretisme, yaitu memasukkan agama baru dengan memasukkan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama dijadikan bagian integral dari agama baru.[36]

Dalam perspektif pluralisme, relasi antarumat beragama dipahami sebagai hubungan sosial antar individu yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama atau paham keagamaan dari masing-masing individu yang berinteraksi secara sosial. Dengan demikian seperti halnya relasi sosial lainnya, relasi antarumat beragama merupakan hubungan yang terjadi akibat interaksi antar individu atau golongan yang memiliki latar belakang keyakinan, tradisi keagamaan, atau mungkin tata moral keagamaan yang berbeda pada peserta interaksi sosial tersebut.

Namun demikian, relasi antarumat beragama dalam sejarah panjang manusia tidak hanya berlangsung dalam hubungan yang besifat kerjasama (cooperation), tetapi sering berlangsung dalam kondisi pertentangan hingga konflik, maka hubungan atau relasi antarumat beragama sering mendapat sorotan yang serius dari berbagai pihak yang mencoba untuk memahami serta mencari sebab-musabab pertentangan atau pertikaian (konflik antarumat beragama).

Di negara yang memiliki struktur serta komposisi masyarakatnya yang bersifat heterogen,[37] baik ras, suku, serta agama, maka memperhatikan relasi atau hubungan antarumat beragama menjadi suatu keniscayaan. [38] Hadirnya negara dalam upaya mengelola keharmonisan masyarakat yang bersifat plural tentu saja memiliki arti yang strategis. Hal ini disebabkan karena negara memiliki kekuasaan yang legal untuk menggunakan kekuatan fisik dengan menggunakan berbagai sarana yang dimiliki seperti kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan, dan sebagainya. Peran negara seperti ini dapat tercapai melalui beberapa cara sebagai berikut: pertama, negara harus menciptakan keberadaan ruang publik yang bebas. Tugas negara dalam hal ini adalah

---

[36] Departemen agama RI, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Manajemen Konflik Umat Beragama (Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), 3-5.

[37] John Sydenham Furnivall termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia masuk ke dalam kategori masyarakat majemuk (plural society). Lihat: Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) 39-40

[38] Ata Ujan, Andre, dkk.. *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT Indeks, 2011)16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui peraturan yang dihasilkannya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi kebebasan warga negara dalam memanfaatkan ruang publik, seperti adanya UU Kebebasan Pers, UU Pendirian Partai Politik, dan UU Pembentukan Ormas.

Tugas kedua adalah negara harus menciptakan kehidupan penuh toleransi. Negara wajib memberikan perlindungan dalam menjaga sikap toleransi. Pentingnya toleransi seperti ini juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. al-Qardhawi menyebutkan bahwa Islam sangat menghargai toleransi karena empat hal: (1) keyakinan terhadap kemuliaan manusia apapun jenis agamanya, bangsanya, atau sukunya. Kemuliaan manusia seperti ini mengimplikasikan adanya hak untuk dihormati; (2) keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang telah memberikan kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Karena itu tidak dibenarkan oleh Islam, melakukan pemaksaan untuk memeluk agama Islam; (3) seorang Muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang yang sesat. Allah-lah yang akan mengadili mereka di hari akhir. Hal ini akan memberikan ketenangan batin bagi umat Islam untuk tidak terjadi konflik interest antara berbuat adil dan baik kepada mereka; (4) keyakinan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi perkerti mulia meskipun kepada orang musyrik, begitu juga Allah mengecap perbuatan dhalim meskipun ditujukan kepada orang yang kafir.[39]

Ketiga, negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas. Tugas negara seperti ini dalam konteks Indonesia secara jelas tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta tercermin dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Sudah semestinya seluruh materi peraturan yang tingkatannya berada di bawahnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan isi UUD 1945. Terkait dengan hal ini, negara sebenarnya juga telah mengaturnya dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang di dalamnya dinyatakan, “materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan perundangan yang baik, yaitu meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika,

[39] Lihat : Yusuf al-Qardhawi, dalam Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perspektif, 2005) 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan aspek keseimbangan, keserasian, dan keselarasan".[40]

Keempat, negara harus memberikan perlakuan yang sama atau mengakui dan menegakkan persamaan di hadapan hukum (equality before the Law).[41] Dalam konteks Indonesia, perlakuan yang sama terhadap semua warga negara seperti ini mendapat jaminan dalam UUD 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[42] Dalam pandangan Miriam Budiarjo, salah satu sifat negara adalah bersifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing), sehingga semua peraturan perundang-undangan harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.[43] Persamaan dalam penegakan hukum, seperti ini juga tercermin dalam UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. [44]

Kelima, Negara harus menegakkan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam arti lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu atau juga oleh negara. Prinsip keadilan sosial seperti ini ditegaskan pula dalam sila kelima dari dasar negara Indonesia, yakni pancasila. Oleh karena itu, sudah semestinya nilai dan prinsip keadilan ini harus selalu tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara serta dalam implementasinya dalam masyarakat.

---

[40] Lihat :Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

[41] Umar Ma'ruf, "Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi", Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, hal. 12

[42] Lihat : UUD 1945 pasal 27

[43] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2009) 50

[44] Lihat: UUD 1945 pasal 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme simbolik dikembangkan oleh Herbert Blumer. Interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut menetap.[45] Berbicara tentang teori Interaksionisme simbolik jelas tidak dapat dari dua tokoh utamanya, yakni, George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley.

Dilihat dari istilahnya, "interaksionisme simbolik" merupakan pendekatan yang relatif khas untuk mempelajari kehidupan manusia dan perilaku manusia.[46] Dalam perspektif interaksionisme simbolik, realitas dipandang sebagai sosial, yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Para ilmuwan interaksionis simbolik percaya bahwa realitas fisik memang ada namun hanya dapat dipahami dalam definisi sosial, dan definisi sosial hanya dapat diakui dalam kaitannya dengan sesuatu yang "nyata". Oleh karena itu keberadaan realitas fisik sebagai suatu kenyataan tidak dapat ditanggapi secara langsung, melainkan sebagai realitas sosial . Oleh karena dalam perspektif interaksionisme simbolis manusia dipahami dalam tiga realitas: realitas fisik objektif (physical objective reality), realitas sosial (social reality), dan realitas yang unik (unique reality). Realitas fisik meliputi kebutuhan material dan fakta alam. Realitas sosial adalah konsepsi sosial seseorang tentang dunia (seperti peran gender, struktur ekonomi, dan lain sebagainya). Akhirnya, realitas unik mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang unik, untuk melihat dunia dengan cara yang baru atau membuat penemuan baru. Para ilmuwan, filsuf, dan penulis fiksi adalah contoh yang baik dari orang-orang yang membuat realitas unik

[45] Lihat dalam : Elvinaro Ardianto, dan Bambang Q-Anees.. *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007) 136

[46] Griffin, *First Look at*,...Op. Cit. 62 Blumer, *Symbolic Interactionism*, Op. Cit. 1939 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka jelas kepada orang lain. Setiap orang memiliki realitas unik yang dapat berubah menjadi realitas sosial.[47]

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, hubungan antarumat beragama dipandang sebagai hubungan interaksional yang menggunakan berbagai simbol keagamaan. Simbol-simbol keagamaan ini memuat berbagai makna yang dipergunakan sebagai dasar berinteraksi secara sosial baik terhadap sesama penganut suatu keagamaan atau dengan penganut agama yang berbeda. Dalam pandangan interaksionisme simbolis, makna-makna ini mengalami berbagai modifikasi agar interpretasi terhadap makna dapat menyesuaikan dengan berbagai interaksi sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang bersifat plural.

Dalam kaitannya dengan fokus penelitian ini, kerangka teoritis yang terkait dengan pemahaman makna terhadap simbol-simbol keagamaan, yakni dalam hal ini adalah rumah ibadat harus dipahami secara optimal terutama dalam bingkai kerukunan hidup antarumat beragama. Hal ini perlu mengingat rumah ibadah sebagai simbol keagamaan tidak saja memiliki makna sosial semata tetapi juga berisi tentang panduan nilai-nilai religius yang dianggap suci (sacred values) dan menyelamatkan (salvation principle). Oleh karena itu makna rumah ibadat sebagai simbol keagamaan dalam konteks sosial kerukunan hidup antarumat beragama harus dapat dipahami oleh lintas penganut agama dengan menggunakan prinsip "agree in disagreement", yakni sepakat dalam perbedaan. Artinya, penganut agama yang berbeda dengan penganut keagamaan tertentu harus dapat memahami bahwa eksistensi rumah ibadat adalah sangat penting sebagai sarana ritualitas melakukan pengabdiannya kepada Tuhan yang diimaninya. Makna tersebut tentunya juga dapat dipahami oleh penganut agama tertentu yang berbeda keyakinan. Dengan cara ini, maka makna dari simbol-simbol keagamaan, terutama rumah ibadat dapat dijadikan basis untuk bersama-sama melakukan interaksi sosial yang harmonis antarumat beragama.

[47] Meltzer B.N., Petras J.W. & Reynolds L.T.. *Symbolic Interactionism: Genesis, Varieties, and Criticism*. (Boston: Routledge and Kegan Paul.,1975), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Fenomenologi Sosiologis

Dalam perkembangan teori ilmu sosial yang ada terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu dari pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial itu adalah fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat.

Jika dirunut dari sejarah perkembangannya, Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, Phainoai, yang berarti 'menampak' dan phainomenon merujuk pada 'yang menampak'. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Meskipun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl.

Jika dikaji lebih lanjut, Fenomenologi itu berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang tampak, dan logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak.

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain)[48]. Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengelaman pribadinya.[49]

Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakikatnya.

---

[48] Engkus Kuswarno, *Fenomenologi (*fenomena pengemis kota bandung).Bandung: Widya Padjadjaran, 2009) 2

[49] Stephen W Littlejohn, & Karen A. Foss, *Teori Komunikasi* (Theories of Human Communication). Jakarta: Salemba Humanika, 2009) 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Ia mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial. Selain Schutz, sebenarnya ilmuwan sosial yang memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomenologi cukup banyak, tetapi Schutz adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu Schutz menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial.

Dengan demikian terdapat dua garis besar di dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transsendental sepeti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schutz. Menurut Deetz dari dua garis besar tersebut (Husserl dan Schutz) terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni pertama dan prinsip yang paling dasar dari fenomenologi – yang secara jelas dihubungkan dengan idealism Jerman – adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eskternal tetapi dalam diri kesadaran individu. Kedua, makna adalah derivasi dari potensialitas sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. Ketiga, kalangan fenomenolog percaya bahwa dunia dialami – dan makna dibangun–melalui bahasa. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikansi, bergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas.[50]

Dalam pandangan Schutz memang ada berbagai ragam realitas termasuk di dalamnya dunia mimpi dan ketidakwarasan. Tetapi realitas yang tertinggi itu adalah dunia keseharian yang memiliki sifat intersubyektif yang disebutnya sebagai the life world. Menurut Schutz ada enam karakteristik yang sangat mendasar dari the life world ini, yaitu, *pertama*, wide-awakeness (ada unsur dari kesadaran yang berarti sadar sepenuhnya). *Kedua*, reality (orang yakin akan eksistensi dunia). *Ketiga*, dalam

[50] Lihat Dalam : Elvinaro Ardianto & Bambang Q. Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, . 2007)127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia keseharian orang-orang berinteraksi. *Keempat*, pengelaman dari seseorang merupakan totalitas dari pengelaman dia sendiri. *Kelima*, dunia intersubyektif dicirikan terjadinya komunikasi dan tindakan sosial. *Keenam*, adanya perspektif waktu dalam masyarakat.

Dengan kata lain, buah pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Posisi pemikiran Alfred Schutz yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah pihak. Pihak ***pertama,*** fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada satu sisi. ***Di sisi lain***, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan obyek kajian formal (focus of interest) dari fenomenologi sosiologi.

Alfred Schutz mengatakan bahwa reduksi fenomenologis, pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu "arus-pengalaman" (stream of experience). Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita.[51]

Schutz mengakui bahwa sosiologi fenomenologinya mengkaji tentang intersubyektivitas Realitas intersubyektif yang bersifat sosial tersebut menurutnya memiliki tiga pengertian, yaitu:

- Adanya hubungan timbal balik atas dasar asumsi bahwa ada orang lain dan benda-benda yang diketahui oleh semua orang.

[51]Muhammad Zeitlin, *Memahami kembali Sosiologi*. (Yogyakarta: GadjahMadaUniversity Press,1998), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ilmu pengetahuan yang intersubyektif itu sebenarnya merupakan bagian ilmu pengetahuan sosial.
- Ilmu pengetahuan yang bersifat intersubyektif memiliki sifat distribusi secara sosial.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa fenomenologi sebagai acuan metode sosial memiliki asumsi-asumsi dasar yang diambil dari fenomenologi filsafat yang telah banyak dikembangkan para ahli. Paling tidak sebagai acuan metodis ilmu sosial, maka fenomenologi menyumbangkan dua konsep kunci yang telah diintroduksir oleh **Husserl**, yakni : dua kosep tersebut adalah *epoche* dan *eidetic vision.*

Epoche vision merupakan usaha untuk menunda semua penilaian atau pengurungan (bracketing). Dengan upaya ini, maka fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-banar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi pengamat. Karena pada dasarnya membawa konsep-konsep dan konstruk-konstruk pandangan adalah sesuatu yang mempengaruhi dan merusak hasil penilaian. Sedangkan, eidetic vision berarti 'yang melihat' atau pengandaian terhadap ephoche yang merujuk pada pemahaman kognitif (intuisi) tentang esensi, ciri-ciri yang penting dan tidak berubah dari satu fenomena yang memungkinkan untuk mengenali fenomena tersebut.[52]

Epoche vision merupakan usaha untuk menunda semua penilaian atau pengurungan (bracketing). Dengan upaya ini, maka fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-banar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi pengamat. Karena pada dasarnya membawa konsep-konsep dan konstruk-konstruk pandangan adalah sesuatu yang mempengaruhi dan merusak hasil penilaian. Sedangkan, ***eidetic vision*** berarti 'yang melihat' atau pengandaian terhadap ephoche yang merujuk pada pemahaman kognitif (intuisi) tentang esensi, ciri-ciri yang penting dan tidak berubah dari satu fenomena yang memungkinkan untuk mengenali fenomena tersebut.[53]

---

[52] Rev. Emeka C. Ekeke & Chike Ekeopara, P*henomenological Aproach to the study of religion a historical perspective*, European jurnal of scientific research, vol, 44, no. 2, 2010, 267

[53] Clive Erricker, *Pendekatan Fenomenologis* dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama* terj. Imam khoiri, (Yogyakarta: Lkis, 2009), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara, Alfred Schutz yang berusaha menjadikan fenomenologi sebagai landasan bagi sosiologi interpretative menambahkan istilah ***'the stream consiousness'*** (arus kesadaran) yang menyatakan bahwa lapisan terdalam dapat dijangkau dengan merefleksikan menemukan sumber tertinggi fenomena makna (*sinn*) dan pemahaman (*verstehen*).[54]

Adapun implementasinya dalam studi keagamaan, fenomenologi menjadi disiplin pengetahuan tersendiri yang dinamakan fenomenologi agama. Disiplin fenomenologi agama ini dalam kajiannya lebih mem-fokus-kan pada aspek pengamalan keagamaan, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena keagamaan secara konsisten dalam orientasi keimanan atau kepercayaan obyek yang diteliti. Dalam operasional metodisnya, disiplin ini tetap menggunakan prinsip-prinsip fenomenologis, yakni melakukan **ephoche**, yakni melakukan penundaan penilaian-penilaian sebelumnya, dan mengupayakan prosedur **eiditis** (*eidetic vision*), yakni melihat ke dalam makna agama dengan kajian terhadap berbagai ekspresi simbolik yang direspon orang-orang sebagai nilai yang tidak terbatas bagi mereka[55]

Prinsip-prinsip fenomenologis ini jika dipergunakan untuk membahas hubungan atau relasi antar umat beragama, dapat diorientasi pada dua hal, yakni, menerapkan ephoche untuk memperoleh data tentang hubungan antarumat beragama sebagaimana adanya dan alamiah, tanpa dipengaruhi oleh teori-teori atau pra-anggapan yang dapat mendistorsi realitas hubungan antarumat beragama. Setelah itu dilakukan prosedur eiditis, dimana hubungan tersebut akan ditelaah dalam wilayah makna subyektif dan intersubyektifnya sehingga esensi makna yang mendasari tindakan keberagamaan tersebut dapat muncul sebagai data esensial dan murni.

Dalam penelitian terhadap relasi antarumat beragama di Driyorejo Gresik ini, prinsip dasar fenomenologis akan diwujudkan dengan memperhatikan secara ephoche, dimana hubungan antarumat beragama diletakkan sebagai kenyataan sebagaimana adanya, yakni obyektif dan alamiah tanpa harus direduksi oleh teori atau

---

[54] Rev. Emeka C. Ekeke & Chike Ekeopara, *Phenomenological Aproach to the study of religion a historical perspective*, European jurnal of scientific research, vol, 44, no. 2, 2010, 267

[55] James L. Cox, *Expressing the Sacred: An introduction to the phenomenology of religion* (Harar: Univerrsity of Zimbabwe, 1992), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pra-anggapan. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mencari unsur-unsur esensial dan maknawi baik secara subyektif maupun intersubyektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gresik dengan obyek peristiwa berada pada Perumahan Driyorejo Kotabaru, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau dikenal dengan KBD (Kota Baru Driyorejo) Gresik. Kasus yang menjadi obyek penelitian ini memang berada pada fasilitas umum di wilayah Perumahan Non Dinas TNI AL yang berada di KBD, akan tetapi kasus pendirian Gereja ini menjadi permasalahan yang mendapat respon masyarakat di tingkat kabupaten Gresik. Sehingga dalam penelitian ini tidak terlepas dengan lokasi Gresik pada umumnya.

Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten memiliki luas 1.191.25 km² di Jawa Timur, Indonesia, memiliki batas Wilayah Utara: Laut Jawa, sebelah Selatan: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Mojokerto; sebelah Timur: Selat Madura; dan sebelah barat: Kabupaten Lamongan. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Ibu kota Kabupaten Gresik berada 20 km sebelah utara Kota Surabaya.[56]

B. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pemahaman atau pemaknaan (*understanding of understanding*) masyarakat berkaitan dengan pendirian gereja di Perumahan Non Dinas TNI AL baik bagi pengguna gereja tersebut maupun bagi umat Islam di Gresik. Bagaimana masyarakat Kabupaten Gresik memaknai atau memahami pendirian dan keberadaan gereja itu bagi umat Islam baik kalangan awam, elit agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan. Demikian juga bagi umat Nasrani Gresik baik Kristen maupun Katolik memamahi pendirian dan keberadaan yang mereka dirikan itu. Di Indonesia pendirian gereja merupakan permasalahan yang manyak muncul dan rawan konflik. Karena itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagaimana seharusnya menyikapi keberadaan tempat ibadah yang adanya menjadi bagian dari kebutuhan umat beragama itu.

Karena temuan teoritis yang hendak dibangun dalam penelitian ini adalah lebih mementingkan perspektif pemahaman dan pemaknaan subyektif tentang pendirian dan keberadaan gereja di Driyorejo sebagai subyek penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kwalitatif (qualitative research). R. Bogdan dan S.J. Taylor, menyatakan bahwa "…metodologi kualitatif merujuk ke prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: kata-kata yang dituliskan atau diucapkan sendiri oleh orang yang diteliti serta tingkah laku mereka yang teramati. Metode ini

[56] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gesik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik, Gresik Dalam Angka 2012 (Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2012), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan untuk meliput latar belakang serta orang-orang dalam latar itu secara holistik; artinya mereka (perkumpulan atau perorangan) sebagai subjek penelitian tidak direduksi menjadi suatu variabel yang terisolasi atau menjadi sebuah hipotesis saja, tetapi dipandang sebagai bagian dari sutu kesatuan".[57]

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami makna keberadaan gereja di Driyorejo-Gresik. Karena temuan teoretis yang hendak dibangun dalam penelitian ini lebih mementingkan perspektif dan pemaknaan subjek terhadap fenomena sosial dan keberadaan gereja di lingkungan kehidupan masyarakat sebagai subjek penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (qualitative research) dengan menggunakan pendekatan kwalitatif dengan teori Pluralisme Agama, interaksionisme-simbolis dan metode fenomenologi sebagai landasan penulisan dan analisis pembahasannya. Pluralisme agama dijadikan sebagai metode untuk membaca sejauhmana tingkat hubungan antarumat beragama di Gresik, Sedangkan untuk memahami bagaimana umat Islam dan Kristen memaknai pendirian gereja di Perumahan Fasilitas umum Perumahan non dinas TNI AL di Driyorejo digunakan metode Interaksionisme Simbolik dan Fenomenologi.

C. Tahapan Penelitian

1. Memasuki Lapangan Penelitian

Penelitian ini terkait dengan pemahaman dan pemaknaan masyarakat Gresik terhadap keberadaan gereja di fasilitas umum Perumahan Non Dinas TNI AL bagi umat Islam dan Nasrani (Katolik dan Kristen). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument kunci karena peneliti sebagai pengurus FKUB Jawa Timur, telah terlibat aktif dalam kegiatan dialog dan Musyawarah intern dan antarumat beragama tingkat Jawa Timur.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti juga sudah sering terlibat dalam kegiatan dialog dan musyawarah serta upaya agar bagaimana hubungan antarumat beragama di Jawa Timur toleran, rukun dan damai. Termasuk berbagai kegiatan musyawarah dan dialog yang diselenggarakan di Kabupaten Gresik yang melibatkan para pimpinan majelis-majelis agama Provinsi Jawa imur dan Kabupaten Gresik. Peneliti juga telah beberapa kali mengisi acara pembinaan kerukunan untuk masyarakat gresik dari berbagai kalangan termasuk lintas agama. Juga ketika terjadi dialog penyelesaian konflik atas perbedaan pandangan terkait pendirian gereja di fasum Pereumahan Non Dinas TNI AL ini.

Untuk menghindari subyektivitas peneliti sebagai "orang dalam" yang terlibat dalam aktifitas dialog antarumat beragama dalam berbagai event, serta sebagai " orang Islam", maka penelitiberusaha melepaskan subyektivitas tersebut dengan menempatkan diri sebagai "peneliti". Oleh karena itu, ketika melakukan wawancara dengan subyek penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai orang yang

[57] Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science* (New York: John Wiley and Sons, 1975), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang belajar dan menggali sedlam mungkin pemahaman mereka tentang bagaimana umat Islam dan umat Nasrani Gresik memahami dan memaknai keberadaan gereja di perumahan tersebut.

Sebagaimana penjelasan Robert C. Bogdan dan Knop Biklen,[58] bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari dalam (perspektif emik), yaitu : pertama, menekankan pada setting yang alami (natural setting) dan peneliti bertindak sebagai instrument kunci; kedua, lebih menekankan pada proses daripada produk; ketiga, berusaha mengungkap dunia makna (meaning warld) di balik tindakan seseorang. Dengan demikian, melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu memberikan penjelasan secara mendalam (vestehen) mengenai makna keberadaan gereja di fasilitas umum penumahan Non Dinas TNI AL bagi umat Islam dan Nasrani (Katolik dan Kristen) Gresik.

2. Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Subyek dan sumber data penelitian ini adalah "individu" masyarakat Gresik Islam dan Nasrani (Katolik dan Kristen) yang terdiri dari tokoh dalam pemerintahan, tokoh agama (Islam dan Nasrani) kalangan gerenasi Muda, Mayarakat grassroot, dan calon pengguna gereja.

Penentuan jumlah subjek penelitian ini disesuaikan dengan jumlah keperluan data dan maksud dari judul penelitian yaitu makna pendirian gereja bagi penganut agama (khususnya Islam dan Kristen) di Kabupaten Gresik yang meliputi keterwakilan subjek dan variasi unsur dalam masyarakat yang terlibat langsung dalam fokus penelitian ini. Selain itu, mengingat reaksi terhadap kasus pendirian rumah ibadat ini tidak hanya semata-mata bersifat lokalitas saja, yakni di perumahan Non TNI AL Kota baru Driyoreja tetapi respons dan reaksinya sudah bersifat regional setingkat Kabupaten Gresik, bahkan terakhir sudah sampai menjadi pembicaraan setingkat Provinsi, maka untuk menentukan informannya juga melibatkan unsur dari pemerintah Kabupaten Gresik, tokoh masyarakat dan tokoh agama setingkat Kabupaten Gresik, baik yang mewakili organisasi keagamaan maupun yang terlibat dalam Forum Kerukunan Hidup Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gresik.

Selanjutnya teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung obyek kasus yaitu lokasi tempat gereja tersebut dibangun dan dimaksudkan untuk mengetahui suasana lingkungan masyarakat sekitar gereja, keberadaan bangunan gereja dan kondisi lingkungan tempat gereja dibangun. Observasi terhadap suatu

[58] Robert C. Bogdan dan Sari Knop Biklen, *Qualitatif Research in Education : AN Introduction to Theory and Methods* (Boston Allyn and Bacon, 1998), 4-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek di lapangan harus dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah terjun ke lapangan dengan melibatkan seluruh panca indera. Adapun observasi secara tidak langsung, yang berfungsi sebagai alat bantu semata, adalah pengamatan dengan dibantu melalui media visual/audiovisual, seperti handycam, tape recorder, dan lain-lain.[59]

Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.[60]

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang melakukan wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[61] Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.[62]

Teknik wawancara ini dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, yaitu khususnya orang-orang yang tidak setuju dan yang dianggap menentang pendirian gereja-gereja tersebut. Yaitu pihak masyarakat sekitar antara lain pejabat pemerintah misalnya Lurah, Camat, Tokoh masyarakat seperti Kyai setempat, Ketua FKUB Gresik, Bakesbangpol Gresik, MUI Gresik dan Kemenag Gresik, dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yang terkait dengan permasalah yang menyebabkan masyarakat Gresik dan sekitar gereja-gereja tersebut protes, demonstrasi, menolak kehadiran gereja tersebut dan maksud serta tujuan penolakan tersebut.

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di daerah tempat konflik antar-umat beragama atau di tempat lain sekitarnya,

---

[59] Untuk pengamatan tidak langsung ini hanya berfungsi sebagai alat bantu karena observasi yang sesungguhnya adalah pengamatan langsung pada "natural setting", bukan setting yang sudah direkayasa. Lihat Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 105.

[60] Tujuan observasi sendiri adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati. Lihat Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134

[61] Moleong, *Metodologi,* 186.

[62] Afifuddin dan Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Op. Cit.*131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait dengan penelitian tersebut. Analisis dokumentasi ini dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[63]

Sebagai sumber data penelitian, dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Alasan diperlukannya dokumen-dokumen tersebut antara lain: 1) Ia, dokumen, adalah sumber yang stabil, kaya, dan mendorong, 2) Ia berguna sebagai bukti suatu pengujian, 3) Ia berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah dan kontekstual, 4) dokumen harus dicari dan ditemukan, dan 5) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.[64]

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang tentang Gereja Betany, Gereja Jawi Wetan dan Gereja Pantekosta Indonesia, data-data lain berkaitan dengan keberadaan tempat ibadat tersebut. Dokumen tersebut antara lain berupa surat kepeutusan Komandan AL di Surabaya, Penunjukan panitia, Surat Bupati Gresik, Surat-surat berkaitan dengan peraturan pendirian Rumah Ibadat antara lain Penpes Nomor 1 tahun 1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan Peraturan daerah lainnya yang terkait dengan pedoman pendirian rumah ibadat. Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi terutama yang berada di area konflik di daerah sekitar Perumahan Angkatan Laut Driyorejo Gresik itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber yang representatif.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik non statitistik, mengingat data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan, pengolahan data dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna.

Setelah proses pengolahan data, tahap selanjutnya adalah diadakan analisis terkait dengan data-data yang telah terolah. Menurut Miles analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

[63] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231..

[64] Moleong, *Metodologi*, 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti di lapangan, sampai laporan tersusun.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dengan analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas pandangan tentang kondisi relasi antarumat beragama di Gresik, persepsi masyarakat Gresik tentang keberadaan gereja-gereja di Gresik dan Driyorejo khususnya serta makna kehadiran gereja-gereja tersebut bagi masyarakat Muslim yang menolaknya.

Dalam rangka menjawab perumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan:

a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang kompatibel terhadap penelitian;

b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.

c. Penyajian data, yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan;

d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.[65]

E. Keabsahan: Validasi dan Reliabilitas Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu 1) derajat kepercayaan (credibility), 2) keteralihan (transferability), 3) kebergantungan (dependability), dan 4) kepastian (confrimability).

Penerapan kriteria derajad kepercayaan (credibility), pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari penelitian kuantitatif. Kriteria keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari penelitian kuantitatif. Keteralihan (transferability) sebagai persoalan empiris, bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Kriteria kebergantungan (dependability) merupakan

[65] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subtitusi istilah reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Konsep kebergantungan lebih luas dari reliabilitas. Kriterium kepastian berasal dari lonsep objektivitas menurut penelitian kuantitatif.

Oleh karena itu dalam proses pengumpulan, analisis, dan pengujian data yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian lapangan, wajarlah jika dikatakan bahwa penelitian kualitatif bisa unggul dalam hal validitas datanya. Proses ini dengan sendirinya sangat menjaga keajegan validitas internalnya, yakni kesahihan data dan temuan dalam konteks penelitian yang bersangkutan. Namun di sisi lain proses ini sekaligus merupakan kelemahan bagi validitas eksternalnya, karena penjelasan yang dihasilkan terikat kepada konteks khusus tempat penelitiannya. Selain itu, keandalan penelitian kualitatif ditentukan oleh mutu penelitinya sendiri, khususnya dalam hubungan pribadinya dengan orang-orang yang ditelitinya.[66]

[66] Jerome Kirk dan Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research* (Newbury Park: Sage Publications, 1986), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B IV

KABUPATEN GRESIK SEBAGAI SETTING PENELITIAN

A. Latar Belakang Kabupaten Gresik

Nama Gresik dalam tinjauan sejarahnya dahulu dikenal dengan nama Tandes. Nama ini dapat ditemukan dalam tulisan yang terdapat pada situs di komplek makam para bupati Gresik zaman dahulu, yakni dipahat pada batu berbentuk lingga, di depan makam bupati Gresik pertama Kanjeng Tumenggung Poesponegoro yang berbunyi: puniko wewangun hing Kanjeng Tumenggung Poesponegoro hing negari Tandes, hisakala sami adirasa tunggal masalahu tangala titi. Artinya, ini adalah bangunan persembahan Kanjeng Tumenggung Poesponegoro di negeri Tandes (candrasengkala memet dengan angka tahun 1617 saka), Tuhan Allah Yang Maha Tinggi".[67]

Sebelum itu, dalam sebuah prasasti lain yang ditemukan di Karang Bogem termasuk wilayah Bungah sekarang yang menunjukkan angka tahun 1387 M, telah memuat nama Gresik dalam bahasa Jawa kuno, dengan kalimat: ***hana ta kawulaningong saking Gresik warigaluh ahutang saketi rong laksa*** (.....kemudian ada seorang warga kami berasal dari Gresik, bekerja sebagai nelayan, mempunyai utang sejumlah satu kati dua laksa atau 120.000).[68]

Selanjutnya sekitar tahun 1720-an, dikenal nama Gerawasi.[69] Nama Gerawasi sebagaimana dalam Babad Gresik yang berbunyi, ".....**kacarios lampahipun saking sabrang sami niti bahita mentas hing gegisik. Dhekahan punika dipun nameni Gerawasi, artosipun gunung hana panggonanku leren"**. (*diceritakan kepergian mereka dari seberang dengan naik perahu, mendarat di gegisik, lalu berdiam (membangun dukuh) di pantai itu. Pedukuhan itu dinamai Gerawasi artinya tempatku istirahat*).[70]

---

[67] Umar Hasyim, *Sunan Giri Dan Pemerintahan Ulama Di Giri Kedaton* (Kudus: Menara,1979), 13.

[68] Tim Peneliti dan Penyusun, *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi* (Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991), 19.

[69] Mochammad Toha., "Tradisi Nyekar Di Surowiti." (Studi Kontestasi Pandangan Elite Agama di Gresik tentang Nyekar di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012) 96. Lihat juga Tim Peneliti dan Penyusun, *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi*,. (Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991), 19.

[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raffles dalam beberapa tulisannya menyebut Gresik berasal dari kata Giri-Gisik yang berarti tanah tepi pantai (pesisir) yang kemudian berubah menjadi Girisik, lalu Gresik. Dalam buku-buku serta data lainnya yang berasal dari zaman Belanda, Gresik disebut dengan Grissee, nama ini masih dapat ditemui pada beberapa gewel (guivel/Bahasa Belanda) gedung-gedung atau prasasti bangunan kuno di Gresik. Sedangkan Bangsa Portugis yang mendarat di Gresik tahun 1513 M, menyebut Gresik dengan Agace.[71]

Dalam sumber yang lain dikatakan bahwa Gresik pada masa lampau dikenal dengan sebutan Jaratan (Jortan), lokasi tepatnya berada di muara Bengawan Solo lawas, sekarang termasuk daerah Mengare. Nama Jortan inilah yang dikenal dalam peta para pelayar Bangsa Belanda pada awal abad XVII M karena Jortan merupakan pelabuhan Gresik pada waktu itu.[72]

Solihin Salam memiliki pendapat yang sama dengan Serat Centini, yang mengatakan bahwa Gresik berasal dari Giri Isa atau Giri Nata yang berarti raja bukit atau penguasa Giri. Sedangkan J.A.B. Wissellius dalam bukunya yang berjudul Historisch Onderzoek naar Gestelijke en Wereldelijke Suprematie van Grissee op Midden Oost Java Gedurende 16e en 17e Eew, yang mengatakan bahwa sampai tahun 1720 M nama Gresik terkenal dengan sebutan Gerwarase.[73]

Thomas Stamford Raffless dalam bukunya The History of Java mengungkapkan bahwa nama Gresik berasal dari kata ‘giri-gisik’ yang berarti "gunung di tepi pantai", merujuk pada topografi kota yang berada di pinggir pantai.’ Kota Gresik pada zaman Belanda dikenal dengan nama ‘ Grissee’ istilah yang diciptakan Dr. Van Ophuysen yang mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk membuat ejaan bagi bahasa melayu, bahasa-bahasa daerah serta bahasa timur lainnya, yang berlaku sejak 1901 sampai 1926. Maka dalam ejaan Van Ophuysen Gresik ditulis Grissee, karena itu hingga tahun 1930-an orang lebih suka menulis Gresik dengan Grissee. Namun pada tahun 1947, ejaan Van Ophuysen diganti dengan ejaan Suwandi, Grissee menjadi “Gresik”.[74]

---

[71] Tim Peneliti dan Penyusun, *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi* (Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991), 19

[72] H.J. de Graaf, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), 172.

[73] Solichin Salam, *Sekitar Wali Sanga* (Kudus: Menara, 1960), 35-36

[74] Dukut Imam Widodo, Dkk., *Grissee Tempo Doeloe.*, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Demografi dan Penduduk Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah tersebut terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.[75]

Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa yang terdiri dari 658.786 laki-laki dan 649.209 perempuan. Sementara itu luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191,25/Km² dengan panjang pantai ± 140 kilometer persegi, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/Km². Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 37.644 jiwa atau 2,9%.[76] Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut: Sebelah utara: Laut Jawa, Sebelah Timur: Selat Madura; selatan: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, sebelah barat: Kabupaten Lamongan.[77]

Sektor yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik adalah sektor industry, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan ketiga sektor pertanian. Tingginya peranan sektor industri merupakan hal wajar karena di Kabupaten Gresik terdapat tidak kurang dari 494 industri besar maupun sedang yang banyak menyerap tenaga kerja. Walaupun Kabupaten Gresik merupakan daerah industri namun dengan wilayah yang luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik.

---

[75] Lihat juga http://gresikkab.go.id/profil/demografi

[76] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik., *Gresik Dalam Angka 2012*, Badan Perencanaan Pembangunan, BPS Kabupaten Gresik, 2012, 41.Lihat juga http://gresikkab.go.id/profil/geografi

[77] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Citra Gresik sebagai Kota Santri

Kota Gresik mempunyai sebuah julukan yaitu Gresik Kota Santri, dinamakan Kota Santri karena di Kota Gresik terkenal dengan masyarakat yang masih religius (taat beragama) dalam hal ini mayoritas masyarakat Gresik memeluk Agama Islam. Berdasarkan itulah maka kota Gresik mendapatkan julukan yang sangat prestisius membanggakan orang gresik. Apabila melihat kebelakang sejarah perjalanan kota Gresik dari masa ke masa memang memiliki sebuah sejarah yang bagus itu terbukti dengan banyaknya makam para orang alim termasuk 2(dua) orang dari walisongo yaitu Syech Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Selain itu di Gresik juga terdapat pusat pendidikan ajaran agama Islam atau pesantren dan juga tempat-tempat ibadah umat Islam yang jumlahnya ribuan dan tergolong bangunan yang sangat bagus. Dari situ mungkin sudah bisa dilihat bagaimana perjalanan religi masayarakat Gresik dari masa ke masa.

Data lembaga Pendidikan keagamaan termasuk Pondok Pesantren di Gresik adalah ditandai dengan adanya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang cukup besar yaitu: 1.643 buah, dengan jumlah santri/murid sebanyak: 121.458 orang. Dengan jumlah tersebut terdapat: 170 buah pondok pesantren dengan jumlah santri 17.527 santri. Dan terbesar adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta: 385 buah dengan murid sebanyak: 50.246 orang, Madrasah Diniyah 737 buah, hanya jumlah muridnya: 36.340 orang.[78]

Syech Malik Ibrahim telah melakukan transformasi sosial keagamaan dari masyarakat yang dulu dalam kekuasaan Kerajaan Mojopahit yang beragama Buddha menjadi orang muslim yang taat beragama, yang beliau lakukan di kampong sawo, khususnya generasi mudanya dengan mendidiknya ilmu-ilmu agama. Selain dari pada itu, yang sangat menjiwai penamaan Gresik sebagai kota santri adalah Syekh Ali Murtadho, penerus Syekh Maulana Malik Ibrahim, Yang benar-benar secara khusus mengajarkan agama, karena kealiman dan kewibawaannya, dipanggil Pandito Wunut oleh orang disekitarnya dan sangat dihormati oleh tokoh-tokoh yang se zaman, karena itu layak jika Syekh Ali Murtadho disebut sebagai founding fathers atau sebagai Bapak Gresik Kota Santri.[79]

---

[78] Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah., *Gresik Dalam Angka 2012*, Gresik 2012 , 164

[79] Muhlas, dalam 'Grissee Tempo Doeloe,' 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga Sunan Giri, tidak kalah pentingnya dengan Ali Murtadho, yang telah berhasil mengelaborasikan sendi-sendi kesantrian ke dalam aspek kehidupan yang majemuk. Sunan Giri lebih dikenal dunia luar, dibanding pamannya Ali Murtadho karena kemampuannya dalam menagemen dan pola komunikasi, Sunan Giri memiliki managemen dan pola komunikasi yang lebih sistemik. Beliau belia telah disiplin mencari nafkah sendiri dan dari sini beliau telah banyak berinteraksi dengan banyak klien dari luar pulau seperti Banjarmasin dan Halmahera.[80] Sunan Giri dalam berbisnis sangat dikenal sebagai orang yang teguh dalam mempertahankan dan menanamkan sendi-sendi kesantrian serta kedermawanan, dimana pada saat itu sangat jarang orang berbisnis itu dermawan. Dia bahkan sering memberikan dorongan kepada ibunya agar lebih bersikap dermawan dan taat berzakat. Dia dikenal sebagai pebisnis yang sukses dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi.[81]

D. Gresik sebagai Kota Bandar / Dagang

Dalam sejarah gresik tempo Doeloe, Gresik dikenal dari seantero dunia karena pelabuhan. Buku Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur.2009, ditulis bahwa sejak abad ke-11, Gresik menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa seperti, Cina, Arab, Champa, dan Gujarat. Gresik juga sebagai pintu masuk Islam pertama di Jawa, yang antara lain ditandai dengan adanya makam-makam Islam kuno dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun.[82]

Di ceritakan bahwa Maulana Malik Ibrahim seorang ulama yang sekaligus sebagai pedagang dan Penguasa Pelabuhan Grissee, pada awalnya mendarat di pelabuhan yang terletah di kaki gunung Sahimbang. Konon dalam "Babad Ing Gresik" sebagaimana di tulis Mustakim, dalam 'Grissee Tempo Doeloe', seorang ulama dari negeri Gedah, mendarat di kaki gunung Sahimbang, setelah tinggal di Leran selama 2 (dua), merintis dakwah dan mendirikan masjid di desa Pasucian. Beliau juga membuat bedug yang dipukul lima kali dalam sehari sebagai petanda shalat.[83] Bedug tersebut saat ini disimpan di museum Daerah Sunan Giri Gresik.

---

[80] *Ibid*

[81] *Ibid*

[82]Buku Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur.2009

[83] Mustakim., 'Subandar' Penguasa Pelabuhan, dalam " *Grissee Tempo Doeloe*", Dukut Imam Widodo (ed) Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maulana Malik Ibrahim wafata pada tanggal 12 Rabiul Awal, 822 H atau 1419 M sebagaimana dalam batu nisan di pemakaman.

Kebesaran pelabuhan Gresik atau Grissee, dapat diketahui dari kedatangan Laksamana Cheng Ho, 6 (enam) kali beliau singgah di Grissee dari tujuh perjalanannya dari tahun 1407-1433. Disebutkan pada saat itu lurah Grissee adalah keturunan Tionghoa dan Provinsi Guangdong yang menguasai seribu Kepala Keluarga. Diceritakan bahwa banyak orang berdagang ke Grissee untuk berdagang dan tidak sedikit yang berjualan emas dan permata.[84]

Tomé Pires, seorang musafir dari Portugis yang berkunjung di pelabuhan Gresik juga menyebut Gresik sebagai kota Bandar Kerjaaan yang paling aman, dan sebagai kota saudagar. Menurut Pires, yang tinggal di gresik selama dua tahun, kota ini dikenal sebagai tempat transit komoditas rempah rempat dari Maluku, kain sutera dari India, lilin dan kayu cendana dari Nusa Tenggara. Tomé Pires juga melihat pelabuhan Grissee sebagai pelabuhan orang kaya yang dikelola oleh Patih Yusuf, yang berhasil dalam bidang perdagangan, ia memiliki banyak kapal besar yang berhiasan Naga maupun lainnya.[85]

Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, Grissee menjadi semakin ramai, demikian juga bandar-bandar di wilayah Timur lainnya seperti: Banten, Tuban, Gresik dan Maluku. Orang-orang Portugal di bawah pimpinan De Abreu, di gresik memperoleh rempah-rempah dari Maluku. Dan sepanjang abad ke-16 pelabuhan gresik semakin menggeser peran dari pelabuhan Tuban. Para saudagar lebih suka Gresik karena fasilitasnya lebih memadai pelayanan yang berbeda dengan Tuban. Pada awal abad 17, gresik masih terkenal sebagai pelabuhan besar dan utama dibanding pelabuhan sekitarnya.[86]

Sebelum menjadi kerajaan Islam, pada masa kerajaan Majapahit, keberadaan Gresik memang sudah disebut-sebut sebagai salah satu potrotipe kota tua. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar yang berpusat di pedalaman, yang mengutamakan keamanan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Maka diangkatlah Sahbandar orang yang terpercaya. Peran Gresik sebagai kota dagang mulai berkembang sejak pertengahan abad ke 14, seirama dengan dinamika kota-

---

[84] *Ibid.*, 192, lihat: Mustakin., "Para Makelar di Kota Saudagar", dalam "*Grissee*….

[85] *Ibid*. Kapal yang berhias Naga adalah Kapal mewah yang dijadikan sebagai kapal pesiar oleh kalangan jet set Grissee sebagai hiburan

[86] Mereka lebih menyukai Gresik dari pada Tuban karena selain dangkal pelabuahannya, terdapat cukai yang cukup tinggi, juga orang-orang Tuban suka menggunakan kekerasan untuk memaksa kapal asing untuk berlabuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota yang lainnya di Nusantara yang juga terkait dalam perdagangan duania. Kawasan Nusantara menjadi kawasan paling timur yang dijadikan titik simpul perdagangan internasional terutama dari bangsa-bangsa Eropa dan Asia Tengah. Dari Maluku jalur perdagangan melintasi selat Flores, Laut Jawa, Selat Malaka, Teluk Benggala, pantai Coromandel dan Malabar di India, Gujarat, Persia serta diteruskan sampai ke Eropa dengan melewati simpul-simpul perdagangan lainnya. Pada jalur inilah kota Gresik menjadi salah satu simpul perdagangan yang sangat penting dan strategis.[87]

Selepas dari kekuasaan Majapahit yaitu ketika terjadinya petaka pada tahun 1478 M, Gresik sebagai kota dagang melepaskan diri dan menjadi pusat Agama, disini terdapat pusat-pusat pendidikan agama alias pesantren di Giri. Sebagai pendidikan yang berguru bukan hanya dari gresik dan sekitarnya tetapi juga dari Maluku dari suku hitu. Terlepasnya dari Majapahit juga mempengaruhi perekonomian gresik sebagai kota Bandar. Namun Tim Peneliti Hari Jadi Kota Gresik sebagaimana dicatat penulis Grissee Tempo Doeloe, menyatakan: Penguasa Grissee setelah lepas dari Kerajaan Majapahit antara lain: Sunan Giri (1487-1506), Sunan Giri Dalem (1506-1545), Sunan Giri Sedamargi (1545-1548), Sunan Giri Prapen (1548- 1605 M). Pada masa sunan Prapen Grissee mengalami puncak kejayaan misalnya dibidang perdagangan banyak berita tentang pelaut Giri yang selama abad ke 16 sampai ke 17telah menjelajahi negeri pesisir bagian timur nusantara, seperti Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Maluku, disamping sepanjang pantai utara Jawa dan Sumatra.[88]

Kemunduran Grissee terjadi kemunduran setelah masa Sunan Prapen, yaitu pada pemerintahan Panembahan Kawisguwo yang memerintah 1605-1616. Menurut Wisselius hal ini ditandai dengan perubahan gelar dari Sunan menjadi panembahan yang lebih rendah. Sementara menurut de Graf berdasarkan Serat Kandha bahwa kemunduran itu karena sepeninggal sunan Prapen kesempatan bagi Soerabaia untuk memainkan peranan sebagai Bandar baru, hal ini memungkinkan karena Jaratan sebagai Bandar di Grissee sudah jatuh ketangan penguasa Surabaia. Wibawa Grissee semakin suram menyusul politik ekspansi

---

[87] Kerajaan Majapahit pada saat itu sangat diuntung dengan adanya pelabuhan Gresik. Gresik menjadi wilayah transit atau makelar pelabuhan. Orang Gresik dapat menjual beras dari hasil pertanian di pedalaman Jawa, ke Maluku dan Banda, pulangnya mereka membawa rempah-rempah untuk dijual kepada para pedagang asing yang menunggu di Bandar Gresik. Inilah potensi ekonomi gresik yang dapat menopang perekonomian kerajaan Mojopahit. *Ibid.* 193, lihat jugahttp://sangkalafatamorgana.wordpress.com/2013/01/01/resensi-buku-gresik-1896-1916-sekilas-perjalanan-sejarah-kota/

[88] Mustakim., *Gresik dalam*, 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mataram dan penetrasi VOC dengan monopoli perdagangan. Grissee akhirnya jatuh secara total dalam kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung pada 1635.[89]

Dengan jatuhnya Grissee maka pusat perdagangan beralih ke Bandar Surabaya, hingga kini, pelabuhan besar di pesisir pulau Jawa berpusat di Tanjung Perak Surabaya, sementara Gresik lebih menjadi bagian dari pelabuhan Tanjung Perak.

E. Gresik Kota Wisata Religi/Wali

Julukan Kota Wisata religi bagi gresik ditandai dengan adanya makam para wali penyebar agama Islam di gresik. Sejumlah makam ulama menjadi andalan di Gresik antara lain: Makam Maulana Malik Ibrahim (di Gapuro), Makam Sunan Giri (di desa Giri), Makam Sunan Prapen (Cucu Sunan Giri) di desa Klangonan, Makam Fatimah binti Maimun, Makam Kanjeng Sepuh dan Petilasan sunan kalijaga di Kawasan Gunung Surowiti kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik; yang kesemuanya telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[90]

Dengan adanya makam para Wali dan petilasan tersebut, kini Pemerintah Kabupaten Gresik telah menjadikan wisata religi atau wisata wali sebagai salah satu andalan mentuk menjadikan daya tarik wisata. Ada dua wali dari sebilan wali di Gresik yang menjadi tujuan wisata terkenal di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

F. Gresik Kota Modern

Perkembangan Kabupaten Gresik untuk menjadi kota modern ditandai berdirinya perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil di kota Gresik ini, diantaranya adalah 2 (dua) perusahaan besar milik BUMN seperti PT. Petrokimia Gresik dan PT. Semen Gresik. Di Gresik juga terdapat beberapa kawasan industri diantaranya adalah Kawasan Industri Gresik (KIG) dan Kawasan Industri Maspion. Kawasan tersebut terdapat perusahaan-perusahaan asing maupun dalam negeri yang mengembangkan usahanya di kawasan tersebut, selain itu juga banyak perusahaan yang berdiri diluar kawasan-kawasan industri di Gresik. Terdapat 85

[89]*Ibid*

[90] Kota Gresik: *Sebuah Perspektif Sejarah dan Hari Jadi*. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik. 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan puluh lima) perusahaan dan perkantoran dari berbagai bidang yang terdaftar dalam PT. Kawasan Industri Gresik baik yang perseroan terbatas, BUMN, maupun perorangan.[91]

Gresik sebagai kota modern juga ditandai dengan perkembangan ekonomi Gresik yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2012 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2000 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,52%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 22,82%, dan Sektor Pertanian sebesar 7,83%. Demikian pula berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku juga didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,31%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,44%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,61%. [92]

Rencana detail tata ruang mungkin sudah baik tetapi implentasi di lapangan tidak mesti sejalan, karena itu dengan menjadi kota modern, Gresik akan menghadapi tantangan seperrti layaknya kota modern lainnya. Seorang tokoh masyarakat Driyorejo Kota Baru, yang merupakan salah satu pengembangan kota Gresik, menuturkan bahwa dengan perkembangan kota Gresik dan berdirinya kota Baru Driyorejo, tumbuh berbagai aktivitas yang mengarah pada kegiatan kota metropolitan yang terbuka, kemaksiyatan tumbuh dimana-mana seperti tidak ada penguasa, begitu bebas, khususnya di Kota Baru Driyorejo ini.[93]

G. Driyorejo dalam Konteks Pengembangan Wilayah Kabupaten Gresik

1. Pengembangan Wilayah Kota

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2011 telah disetujui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rencana pengembangan wilayah dan pembangunan Kabupaten Gresik sampai tahun 2030 terbagi dalam empat wilayah pembangunan. Wilayah Gresik Utara diproyeksikan menjadi kawasan agropolitan dan agroindustri, dan minapolitan. Pengembangan ini sejalan dengan pembangunan Bendung Gerak Sembayat (BGS). Di kawasan itu disiapkan

[91] http://kig.co.id/ina/tenants/

[92] http://gresikkab.go.id/profil/pertumbuhan-ekonomi

[93] H.Wagino., Wawancara , tanggal 15 Mei 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan seluas 6.200 hektar tersebar di Kecamatan Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng.[94]

Wilayah Gresik Selatan diproyeksikan menjadi areal pemukiman. Pemerintah Kabupaten Gresik sudah menandatangani kesepakatan antara Menteri Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur dan Real Estate Indonesia (REI) untuk pembangunan wilayah Gresik selatan. Sudah disiapkan lahan sekitar 10.000 hektar tersebar di Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Kedamean dan Menganti. Kawasan itu nanti akan menyatukan wilayah Gresik Selatan dengan wilayah Surabaya Barat. Pembangunan di wilayah perkotaan dengan fokus pada pembangunan Pelabuhan Kalimireng. Pembangunan Pelabuhan berskala international ini mencakup wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar.[95]

Adapaun penetapan Driyorejo sebagai wilayah penunjang adalah meningkatkan fungsi dan peranan kota Driyorejo. Tujuan dari ditetapkan PERDA tersebut adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota Driyorejo dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, memberikan pedoman dasar bagi pengarahan pembangunan kota Driyorejo jangka panjang, baik dan segi perencanaan. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kota, untuk rnemberikan dasar hukum atas perencanaan kota bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di kota Driyorejo. Sedangkan arah renstra ini adalah menuju kepada perwujudan kota mandiri yang membentuk lingkungan pemukiman terpadu, serasi, selaras, seimbang antara komponen kota, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota.[96]

---

[94] Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 yang ditanda tangani Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si dan telan dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8. Perda ini juga dilengkapi dengan lampiran antara lain meliputi Peta batas wilayah Administrasi Kabupaten resik, Tabel Kordinat Pulau-pulau kecil, Tabel distribusi waduk, Rencana Tata Ruang Hijau, Pete Penetapan Kawasan Tambang, Rencana Pola Ruang Laut, Industri Rumah Tangga, Peta Kawasan Minapolitan, Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Daratan, Peta Ruang Wilayah Laut, Peta Rencana Pola Ruang Daratan, Pete PenetapanKawasa Strategis, Program Pemanfaatan ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.

http://masackee.blogspot.com/2011/07/gresik-terima-jatah-dari-pusat-untuk.html

[95] http://gresik.co/gresik/hukum-gresik-gresik/warung-pangku-gresik-kian-marak-dan-berkembang

[96] Pasal (5) Perda nomor 23 tahun 1992 ini juga mempunyai sasaran untuk memberikan perwujudan pemanfaatan ruang kota sejalan dengan tujuan serta kebiksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah untuk memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan kota perlu menumbuhkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota Driyorejo sertauntuk rnewadai keterpaduan, bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pereturan Daerah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Rencana Detail, Tata Ruang Kota Driyorejo Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Driyorejo disebut Kota Baru. Dalam Pasal 1 (satu) huruf e, Kota Baru, adalah Pusat permukiman baru dan atau pusat pertumbuhan yang lengkap memiliki sarana prasarana, utilitas umum, fasilitas kota dan penyediaan lapangan kerja, yang dibangun pada lokasi kosong atau pada daerah yang belum mencerminkan perkotaan.[97]

Adapun untuk pengembangan pemukiman dirancang dalam kawasan terpadu diwilayah penyangga GERBANGKERTA SUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan Lamongan), yaitu wilayah Kecamatan Driyorejo. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Driyorejo sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Gresik bagian selatan, yaitu sebagai pusat pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan dan pendidikan. Mengingat hal tersebut pemerintah kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 23 tahun 1992, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.[98]

2. Driyorejo Sebagai Kota Mandiri

Kecamatan Driyorejo merupakan salah satu kecamatan di Kab.Gresik yang terletak di ujung selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Laskarsantri Kota Surabaya dan Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, sebelah timur dengan Kecamatan Karang pilang Kota Surabaya, dan sebelah barat dengan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Demografi Kecamatan Driyorejo adalah, luas 5.129,20 ha, terdiri atas tanah sawah 1.639,590 ha, pekarangan /halaman 2.17,99 ha, tegal/kebun 1.052.060 ha, dan lainnya 263,08 ha. Kondisi tanahnya berbukit dan tanahnya berbatu cadas, sehingga sangat keras dan tidak bisa dibuat sumur. Kebutuhan air penduduk dipenuhi oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Di Kecamatan Driyorejo, sawah sudah kurang menghasilkan padi karena air tercemar limbah pabrik.

Tingkat I Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Swasta serta masyarakat kota Drivorejo

[97] Perda nomor 23 tahun 1992 pasal (1) huruf e.

[98] Perda nomor 23 tahun 1992 ini ditanda tangani oleh Bupati Djohansah dan Ketua DPRD pada saat itu M. MATAHIR, pada tanggal 19 Maret 1992. Perda ini disahkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Desember 1994 dengan Nomor 637/P tahun 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara ekonomis, Kecamatan Driyorejo bukan lagi wilayah pertanian, karena telah cenderung menjadi kota industri, disana telah berdiri pabrik berskala nasional seperti Maspion, KIA, Garuda Food, Mie Sedap dan lain- lain. Industri yang terdapat di Kecamatan Driyorejo meliputi 35 industri besar, 56 industri sedang, dan 1 industri kecil atau rumah tangga. Karena merupakan daerah industri dan letaknya yang berbatasan dengan Kota Surabaya, Kecamatan Driyorejo menjadi daerah pengembangan pemukiman dan salah satunya adalah komplek perumahan milik Perum Perumnas yang sudah ada sejak tahun 1995 yang bernama Perum Perumnas Kota Baru Driyorejo.[99]

Sebagai pusat pengembangan wilayah Gresik bagian selatan, Kota Driyorejo berfungsi sebagai pusat pemukiman, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan dan pusat pendidikan. Driyoreja dijadikan sebagai Kota mandiri yang telah tertata sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 1992, antara lain meliputi beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Driyorejo: Desa Sumput, Kesamben Wetan, Petiken, Mulung, Gadung, Randegan Sari, dengan luas areal 1000 Ha. Pembangunan perumahan dilakukan dalam bentuk kawasan terpadu antara desa dan Perumnas.[100] Dengan demikian antara pemikinan penduduk asli dan perumnas yang didiami oleh pendatang akan menjadi permasalahan tersendiri.

Komplek perumahan ini diresmikan tahun 1995 oleh Presiden Megawati dan direncanakan menjadi perumahan terbesar di Asia Tenggara dengan 6000 unit rumah yang pada awalnya dan akan dibangun lagi jika semua unit sudah terjual. Sebagaimana dalam Tata ruang yang telah direncanakan pengembangan wilayah Driyorejo terdiri dari berbagai wilayah yang berupa pemukiman yang dibangun oleh Perum Perumnas, juga dibangun oleh pihak ketiga yaitu swata. Kemudian Perumnas bekerjasama dengan TNI AL untuk menyediakan perumahan bagi para anggota TNI AL. Karena itu banyak lahan dan rumah yang sudah jadi dibeli oleh Koperasi Angkatan Laut dan oleh Koperasi Angkatan Laut, rumah-rumah itu dijual kepada para anggotanya.[101]

---

[99] Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik., *Kecamatan Driyorejo Dalam Angka tahun 2012* , 1-4.

[100] http://masackee.blogspot.com/2011/07/gresik-terima-jatah-dari-pusat-untuk.html) Kompas.com Gresik Petakan Empat Wilayah Tata Ruang

[101] Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan., Titik Suwariyati., Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Pemetaan pengembangan Tata Ruang Kota Gresik sebagaimana dalam Perda nomor 8 tahun 2011 dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara kawasan permukiman, kawasan industri, rencana tata ruang hijau dan lainnya. Perda tersebut dibuat bertujuan untuk mewujudkan Gresik sebagai kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan, pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.[102] Penetapan Driyorejo sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah Gresik bagian selatan menjadi penyangga kawasan terpadu GERBANG KERTASUSILA, dan selanjutnya menjadi kota mandiri, maka berakibat pada terbukanya wilayah Gresik untuk menerima masuknya penduduk kota Surabaya dan sekitarnya ke wilayah ini.

Dengan demikian sudah barang tentu keberadaan Gresik yang berlebel sebagai kota santri, berhias iman, kota wali, wisata religi, akan berhadapan dengan fenomena bahwa gresik menjadi sebuah kawasan yang dihuni oleh berbagai penduduk dengan berbagai latar belakang suku, budaya, adat istiadat maupun agama. Maka masyarakat gresik akan mengalami perubahan sosial. Perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan fenomena social yang wajar, oleh karena manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. [103]

Masyarakat Gresik yang berlatarbelakang budaya santri dengan budaya dan adat istiadat yang berlandaskan Islam, akan bertemu dengan masyarakat lain dengan berbagai latar belakang budaya, agama dan adat istiadatnya. Perubahan sosial itu terjadi oleh adanya beberapa faktor diantaranya, menurut Abdul Syani (2002), ada tiga faktor yaitu timbunan kebudayaan dan penemuan baru, perubahan jumlah penduduk dan adanya pertentangan (conflict).[104]

Dalam konteks Gresik dan adanya kawasan kota mandiri Driyorejo Kota Baru, timbunan kebudayaan dari berbagai individu dan masyarakat yang bertemu dalam sebuah komplek perumahan, dan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Kebutuhan akan pemenuhan terhadap fasilitas baik ekonomi maupun budaya seperti tempat ibadah mendorong adanya perubahan kondisi social dan budaya yang tak terhindarkan.

Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , dalam: *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat.* Haidlor Ali Ahmad (ed) Jakarta 2012, 143.

[102] Bab V Pasal 7, Perda nomor 8 tahun 2011, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

[103] Abdul Syani., *Sosiologi, Sistematika, Teori dan Terapan*,(Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002), 162

[104] *Ibid.*, 165 - 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah Gresik yang pada dasarnya dikenal sebagai berbasis santri, akan menghadapi adanya kebutuhan orang-orang agama lain seperti Kristen, Katholik maupun Hindu, yang niscaya harus dipenuhi karena tuntutan hidup spiritualnya. Demikian halnya Driyorejo yang pada mulanya adalah desa berubah menjadi sebuah kota mandiri yang berkumpul berbagai ragam budaya.

Pertemuan budaya itu membawa benturan kepentingan masyarakat, akan berakibat pada persaingan bahkan bisa menjadi konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kawasan Driyorejo menjadi kota baru, sudah barang tentu menjadi sebuah fenomena baru yang sekaligus menandai adanya kawasan yang terbuka yang akan menghimpun berbagai kebudayaan dari berbagai kawasan Surabaya dan sekitarnya. Berbagai latarbelakang budaya itu melahirkan adanya pemenuhan berbagai kepentingan. Misalnya munculnya berbagai lembaga pendidikan, adanya kolam renang komersial, tempat-tempat hiburan, kebutuhan tempat ibadah, berdirinya masjid-masjid dan tidak kalah pentingnya juga berdirinya beberapa gereja dan Pure di wilayah Gresik bagian selatan ini. Tuntutan berdirinya tempat ibadah baik masjid, gereja maupun pure, adalah realitas yang logis di wilayah tersebut.

4. Kondisi Keberagamaan

Gresik yang memiliki setting kelautan dengan terutama adanya pelabuhan sejak dahulu kala merupakan wilayah yang memiliki interaksi yang dinamis dengan berbagai latar belakang etnis, ras dan agama yang pernah singgah di daerah ini, baik dengan motif keagamaan atau ekonomi. Oleh karena itu sejak dahulu masyarakat Gresik sudah terbiasa dengan interaksi dengan berbagai elemen yang bersifat heterogen terutama dari aspek keagamaan. Dalam perjalanannya kemudian masyarakat Gresik yang mayoritas beragama Islam dapat menjalankan kegiatan kemasyarakatannya dengan harmonis dan tentram.

Hubungan atau relasi antarumat beragama di Gresik selama ini berjalan relative sangat kondusif, meskipun tidak dapat diingkari terdapatnya berbagai riak-riak kecil, namun keseluruhan itu tidak pernah dapat menimbulkan konflik yang berskala besar. Keseluruhan ini memberikan indikasi bahwa masyarakat Gresik sudah sangat memahami arti nilai-nilai keagamaannya sehingga dapat menghormati serta bersikap toleran terhadap agama-agama lain yang ada di daerahnya.

Berbagai upaya untuk memupuk kerukunan antarumat beragama di daerah Gresik telah dilaksanakan. Mulai dengan mengadakan dialog serta bermusyawarah dalam menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan keagamaan yang ada hingga mengadakan kerjasama di bidang kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, membantu korban bencana alam dan sebagainya. Apalagi kemudian diimplementasikannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menag dan Mendagri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan hidup beragama, pemberdayaan FKUB, serta Pendirian Rumah Ibadat, maka upaya pemeliharaan kerukunan antar dan inter umat beragama di Gresik sangat dirasakan lebih intensif lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B V

ANALISIS TERHADAP FAKTA RELASI ANTARUMAT BERAGAMA DAN MAKNA PENDIRIAN GEREJA

A. Relasi Antarumat Beragama Di Gresik

Untuk menganalisis relasi antarumat beragama di Driyorejo dan Kabupaten Gresik umumnya, penulis akan menggunakan prinsip-prinsip dasar teori pluralisme dan interaksionisme simbolik. Penggunaan prinsip dasar pluralisme akan diarahkan untuk mengetahui tingkat dinamika interaktif dalam masyarakat Gresik yang memiliki latar belakang kehidupan yang majemuk, baik dari aspek budaya, ekonomi, sosial dan terutama agama. Sedangkan penggunaan prinsip-prinsip interaksionisme simbolik akan dipergunakan untuk mengetahui tingkat interaktif subjektif antarumat pemeluk agama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa interaksi atau tindakan antar individu terutama yang memiliki latar belakang kehidupan, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan agama yang beragam tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan individual dan subjektif dari masing-masing aktor yang terlibat dalam relasi antarumat beragama tersebut.

Untuk kepentingan analisis terkait dengan kondisi dan relasi antarumat beragama di Driyorejo-Gresik ini penulis akan menggunakan pendekatan pluralisme yang dikemukakan oleh Diana L. Eck yang menyatakan bahwa masyarakat yang berbasis pluralisme adalah masyarakat yang memiliki ciri-sebagai berikut: *pertama,* warganya saling terlibat dalam energetis dengan keragaman (*the energetic engagement with diversity*), *Kedua,* pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan (*active seeking of understanding across line of difference*), *ketiga,* adamya komitmen bersama (*the encounter of commitment*). *Keempat,* juga ditandai adanya dialog intensif antar berbagai unsur termasuk agama. [105]

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Gresik dikenal sebagai kota santri, kota wali, Gresik berhias iman sangat melekat dalam pandangan dan budaya mereka. Secara sosiologis, masyarakat Gresik sangat akomodatif dan memiliki toleransi yang cukup baik terhadap berbagai masyarakat atau komunitas yang memiliki identitas budaya, suku bangsa maupun

[105] Diana L. Eck, "What is Pluralism", *Nieman Reports God in the Newsroom Isuue*, Vol. XLVII, No. 2, Summer (1993), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang berbeda. Meskipun demikian, masyarakat Gresik bukan berarti bersikap permisif terhadap masalah-masalah yang sangat prinsipil seperti persoalan norma dan agama.

Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial keagamaan masyarakat Gresik sehari-harinya. Meskipun pandangan keagamaannya sangat kental dan relijius, namun kepekaannya terhadap situasi sosial yang mengitarinya sangat tinggi. Masyarakat Gresik memang masih dapat menerima dengan baik berbagai komunitas yang memiliki latarbelakang identitas yang berbeda, namun ketika kelompok yang berbeda identitas tersebut membuat aktifitas yang dianggap menyinggung perasaan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, seperti misalnya, melanggar atau bertentangan dengan peraturan berlaku, pasti masyarakat Gresik akan mengadakan reaksi yang keras. Meskipun demikian masyarakat Gresik masih memiliki sikap toleransi yang cukup baik untuk menyelesaikan setiap persengketaan atau konflik dengan mekanisme musyawarah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Gresik sangat menjunjung tinggi pandangan akidah agama (Islam) dan peraturan pemerintah meskipun tidak meninggalkan nilai-nilai toleransi terhadap keberadaan agama atau kepercayaan yang berbeda yang terdapat di dalam masyarakatnya.

Dalam kaitan ini H. Makmun, salah seorang tokoh dari Ormas keagamaan/pengurus NU Gresik, menyatakan bahwa apapun permasalahannya, jika dimusyawarahkan dengan baik pasti dapat terselesaikan. “Masalah agama jangan membawa-bawa pejabat, mari kita rembug dengan baik pasti terselesaikan”..[106] Pandangan tokoh masyarakat ini dapat dijadikan rujukan untuk membaca situasi sosial dan keagamaan masyarakat Gresik.

Dari pemaparan data tersebut di depan, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Gresik dan Driyorejo akan keberagaman latarbelakang sosial, ekonomi budaya dan agama yang ada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, telah membuat warganya ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan interaksi dengan berbagai latar belakang tersebut. Dengan kata lain masyarakat Gresik dan Driyorejo telah memiliki orientasi bermasyarakat dengan berbagai keragaman unsur masyarakat yang membentuknya (*the energetic engagement with diversity*).

Hal ini telah terbukti dengan adanya pelabuhan yang sudah dahulu menjadi pusat berkumpul dan berinteraksinya berbagai etnis, ras dan agama yang beranekaragam. Kenyataan ini membuat masyarakat Gresik sejak dahulu kala sudah memiliki *sense of etnical variations* (perasaan bergaul dengan beranekaragam etnis).

[106] H.Makmun, tokoh Agama, NU Gresik, *Wawancara*, 16 Mei 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perasaan ini pada gilirannya membawa pada hubungan interaksional antarumat beragama yang lebih aktif dan intensif, yakni satu dengan lainnya berusaha untuk saling memahami dan mengerti (*active seeking of understanding across line of difference*). Hal ini dapat dilihat dari hubungan atau relasi antarumat beragama, masyarakat Gresik pada umumnya dan Driyorejo pada khususnya sangat menjunjung sikap toleransi dalam kehidupan keberagamaannya. Hubungan antar tokoh lintas agama terutama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yakni representasi atau wadah bagi berkumpulnya para tokoh lintas agama di Kabupaten Gresik yang menunjukkan sikap toleransi dan kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai kegiatan yang mendukung serta memperkuat kerukunan antarumat beragama telah dicanangkan sebagai program kerjanya. Kegiatan anjangsana atau silahturahmi antar tokoh atau majelis agama, telah menjadi agenda utama bagi FKUB, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris FKUB Kabupaten Gresik:

> Pengurus FKUB memprogramkan kegiatan anjangsana dari agama satu ke agama yang lain, acaranya saling tukar informasi dan pengalaman dari tuan rumah kegiatan dari masing-masing agama yang diakhiri dengan acara makan bersama. Makanan disediakan oleh tuan rumah dan dengan acara ini masing-masing bisa mengenal dari dekat dan hubungan menjadi semakin akrab. Di antara yang hadir tidak canggung dan merasa asing.[107]

Keadaan yang digambarkan oleh pak Toha tersebut dipertegas oleh pengurus yang lainnya. Sebagaimana diceritakan oleh H.Yarham, tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Gresik ini, juga mengiyakan ketika ditanya tentang kegiatan silaturrahmi dalam bentuk anjangsana dari tokoh satu dan tokoh lainnya. Dia memberi contoh lainnya ketika Pendeta Edy Prasetyaningsih, Pendeta Kristen Jawi Wetan (GKJW) yang lama bertugas di Gresik pindah ke GKJW Mojokerto. Diceriterakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 bertempat di aula samping Gereja GKJW Jln. Panglima Sudirman Gresik, pengurus FKUB Gresik dari semua perwakilan agama hadir pada acara perpisahan tersebut, Kegiatan pamitan berjalan begitu akrab dan secara psikologis demikian menyatu, tidak ada jarak di antara para undangan yang

[107] Muhammad Toha, "Tradisi Nyekar di Surowiti: Studi Kontestasi Pandangan Elite Agama di Gresik tentang Nyekar di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur" (Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda agama tersebut. Bahkan hadir juga para pendeta Kristen dari Surabaya dan Sidoarja mereka akrab saling mengenalkan diri.

Juga disampaikan bahwa anggota FKUB dari Agama Hindu Wongsonegoro, SE, SH, M.Si, menjadi anggota DPRD Kabupaten Gresik yang karena keakrabannya dengan anggota yang lain ketika dilantik mengadakan syukuran dan memberikan kenangan berupa jaket kepada seluruh pengurus FKUB. Selain itu, keakraban dan kebersamaan tersebut nampak menyatu ketika mengadakan study banding ke Bali, keguyuban dan kebersamaan di antara para tokoh agama terasakan sekali. Demikian juga pada saat hari raya masing-masing agama diatara para tokoh juga saling menghormati dengan cara masing-nasing yang tidak bertentangan dengan akidah agamanya. Hubungan personal diantara pengurus juga nampak akrab seperti terlihat ketika mereka punya hajat yang saling mengundang.[108]

Hal senada juga diungkapka oleh H.M. In'am seorang tokoh Muhammadiyah Gresik yang juga pengurus FKUB Gresik, bahwa hubungan antar umat beragama di Gresik baik-baik saja, tetapi apabila mereka tidak mentaati aturan kita mesti harus tegas. Menurut Pak In'am sebagaimana yang ia ketahui dan rasakan bahwa dilingkungan rumah tinggal maupun organisasi, hubungan antara umat beragama cukup harmonis, menurutnya kuncinya saling mengerti dan menghormati sebagai implementasi dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, sebagai pedoman hidup hubungan antar umat beragama.[109]

Pernyataan pak In'am tersebut juga diakui oleh tokoh yang berasal dari agama Katolik, yakni bapak Yohanes Irfan menurutnya kerukunan dan harmonis dalam masyarakat berbeda agama itu juga nampak dalam kegiatan sosial, bahkan pak Irfan sendiri menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ia sudah menyatu dalam masyarakat yang berbeda latarbelakang keagamaan. Dicerikan bahwa Pak Irfan telah mengusahakan sekitar 250 orang dibawah garis merah kemiskinan, ia mengusahakan dari LAZIS bantuan hidup dan mendapatkan bantuan per-orang Rp. 100. 000, setiap bulannya. Dia juga mengusahakan dari Yayasan Kasih Bangsa pengobatan gratis.[110] Bukan hanya Islam dan Kristen saja tapi juga dengan agama Konghucu misalnya Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gresik bersilaturahmi dengan pengurus Tempat Ibadat Tri Darma (TITD) Kim Hin Kiong atau Klenteng Kim Hin Kiong di Jalan dr. Setiabudi Gresik. jalinan komunikasi, silaturrahmi maupun sinergi telah terbina secara kontinyu sejak lama.[111]

---

[108] H. Yarham., *Wawancara,* tanggal 4 Nopember 2014.
[109] H. M. In'am, *Wawancara*., tanggal 9 Nopember 2014
[110] Yohanes Irfan. *Wawancara*, tanggal 4 Nopember 2014
[111] Ashadi Iksan. *Wawancara*, tanggal 4 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tersebut, maka hubungan atau relasi antarumat beragama di Gresik dapat dikatakan relatif rukun dan harmonis. Masyarakat Gresik tampaknya telah menjalin hubungan sosial antarumat beragama secara baik. Dalam kerangka teoritis pluralisme, masyarakat Gresik pada prinsipnya telah menjalankan prinsip-prinsip harmonisasi sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik plural.

Selain itu jika dilihat dari pendekatan interaksionisme simbolis, bahwa tindakan adaptasi antar elemen sosial keagamaan dalam relasi antarumat beragama di Gresik ini didasari oleh sikap akomodatif dan toleransi dari masyarakat. Sedangkan sikap akomodatif dan toleransi ini sebenarnya berasal dari aktualisasi serta penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh aktor-aktor yang penganut keagamaan yang ada di masyarakat, terutama adalah umat Islam yang merupakan penganut agama mayoritas di Gresik.

Pola adaptasi dalam relasi antarumat beragama, seperti sikap akomodatif dan toleransi pada dasarnya berasal dari proses internalisasi dari ajaran keagamaan. Umat Islam, misalnya, bersikap toleransi *(tasamuh)* terhadap keberadaan dan penghormatan atas hak-hak beragama bagi penganut agama selain Islam pada prinsipnya berasal dari pemahaman dan penghayatan ajaran kitab suci al-Qur'an, di antaranya:

Al-Qur'an Surah Al Baqaroh (2), ayat: 256

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ
ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Al-Qur'an Surah Al Kafirun (109) ayat: 6

لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦

" Bagimu agamamu, dan bagiku adalah agamaku"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keseluruhan pesan dasar ajaran agama (Islam) ini juga turut mempengaruhi sikap kohesif dari masyarakat Gresik akan keberadaan penganut agama yang berbeda. Dalam konteks yang sama ajaran-ajaran Islam ini juga memberikan sikap toleransi masyarakat Gresik terhadap penganut agama selain Islam.

Dari pemaparan data ini terlihat bahwa hubungan interaksi antarumat beragama bukan terjadi secara mekanis dan hanya merupakan penjumpaan fisik semata, tetapi interaksi antarumat beragama yang didasari oleh sikap toleransi dan tenggang rasa yang merupakan hasil dari pemahaman atau pemaknaan sang aktor dari ajaran agama yang dipeluknya.

Menurut premis dasar interaksionisme simbolis, yakni:

(1) Bahwa manusia bertindak terhadap segala hal itu didasarkan pada makna yang mereka miliki atas hal-hal tersebut. Premis ini menjelaskan bahwa respon manusia terhadap segala sesuatu yang dihadapinya tidak dalam kondisi kosong, tetapi sudah bermuatan dengan makna. Setiap individu pada dasarnya, bersikap terhadap objek benda atau orang lain berdasarkan makna pribadi yang telah mereka miliki terhadap obyek benda atau orang lain tersebut. (2) bahwa makna individu ini sebenarnya berasal dari interaksi sosial dengan manusia lainnya. (3) bahwa makna-makna tersebut tergantung dan dimodifikasi oleh individu dengan cara menafsirkan proses interaksi dengan individu lainnya. Dari premis dasar tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa proses relasi antarumat beragama yang terjadi di dalam masyarakat Driyorejo Gresik di dasari dengan makna-makna yang diderivasi dari ajaran agama, dalam hal ini terlebih khususnya adalah Islam.

Dilihat dari sudut kajian tentang **toleransi,** maka didapat kenyataan bahwa masyarakat Driyorejo Gresik memang telah mengembangkan toleransi dengan jenis *relative tolerance*. Hal ini dapat dilihat dari data di lapangan meskipun masyarakat Driyorejo dan Gresik pada umumnya mayoritas beragama Islam, dan tentu saja klaim kebenaran Islam menjadi ukuran utama bagi kehidupan keberagamaannya, tetapi di sisi lain masyarakat Gresik juga sangat menghormati agama lain, meskipun mungkin dianggapnya sebagai agama dan keyakinan yang salah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan silahturahmi dan kerjasama di berbagai bidang kehidupan di masyarakatnya yang tidak mempertimbangkan perbedaan latar belakang keagamaan.

Namun demikian, dalam kenyataannya interaksi antarumat beragama ini bukan tanpa halangan dan gangguan. Menurut teori interaksionisme simbolik bahwa dalam aksi dan interaksi tindakan sosial dimaknai sebagai tanggapan individu terhadap orang lain di dalam pikirannya sendiri. Selain itu, interaksi sosial dimaknai sebagai proses mengkomunikasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti terhadap orang lain yang terlibat dalam interaksi. Di dalam interaksi sosial tersebut, para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi, sebagai akibatnya interaksi sosial tidak saja menimbulkan integrasi tetapi juga disintegrasi.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan hubungan antarumat beragama di Gresik. Beberapa kasus yang berkembang di Gresik antara lain berbagai aktifitas non-Muslim yang mendapat reaksi masyarakat misalnya; kegiatan rumah Ibadah Kristen di Benjeng, Pendirian Pura di Mondoluku, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Perumahan Gresik Kota Baru Driyorejo, Gereja Kristen HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Randegansari, dan yang terakhir adalah didirikannya gereja-gereja yang diprakarsai oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut V (Lantamal V).[112]

Demikian juga terkait dengan fokus penelitian ini, yakni pembangunan gereja yang didukung oleh Pangkalan Angkatan Laut V di lingkungan sekitar perumahan Non Dinas Angkatan Laut Kota Baru Driyorejo Gresik yaitu Gereja Kristen Bethany, Gereja Katolik Santo Gabriel dan belum diproses perizinannya adalah Gereja Kristen Jawi Wetan. Pembangunan gereja ini sebelum dihentikan, memperoleh dukungan dari instansi pemerintah yaitu LANTAMAL V.

Pembangunan gereja di perumahan Non Dinas TNI Angkatan Laut ini diawali dengan surat menyurat baik dari angkatan laut kepada Bupati Gresik, pihak panitia pembangunan gereja, baik Kristen Bethany maupun Gereja Katholik. Pembangunan gereja-gereja ini mendapat penolakan yang sangat gencar dan berujung pada penghentian dan pengalihfungsian bangunan gedung gereja salah satunya sudah mencapai 90 % tersebut untuk menjadi fasilitas umum selain tempat ibadah.[113]

Sampai saat ini, belum ada aktifitas lanjutan pasca penghentian aktivitas pembangunan, peribadatan dan penurunan simbol-simbol keagamaan di lokasi tersebut, yang ada adalah bangunan setengah jadi yang belum dimanfaatkan apa-apa, rumput di halaman yang meninggi dan kiri-kanan bangunan nampak lengang. Masyarakat menunggu aksi berikutnya, baik yang Muslim maupun umat Kristiani, Katolik maupun Kristen. Kondisi saling menunggu atau saling jaga jarak di antara kedua belah pihak yang nampaknya berharap adanya mediasi yang tulus untuk penyelesaian masalah tersebut.

---

[112] Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik, 2014

[113] Surat Bupati Gresik yang ditujukan kepada Pengurus Gereja Bethany Indonesia Jalan Mutiara 1.6 Blok 11B/AD No. 16 Kota Baru Driyorejo dan Pengurus Gereja Katolik Santo Gabriel Jalan Raya Giok Kota Baru Driyorejo, Nomor: 450/777/437.77/2010 tanggal 28 Desember 2010, isinya menghentikan pembangunan kedua gereja tersebut, melepas symbol dan label-label pada kedua gereja tersebut dan menghentikan segala bentuk peribadatan/kebaktian pada kedua gereja tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan fakta yang terjadi dalam relasi antarumat beragama dan fakta lapangan yang penulis dapatkan, maka jika dianalisis dari teori Pluralisme Agama, hubungan antarumat beragama di Gresik dapat dikatagorikan sebagaimana dikemukakan di depan sebagai *relative toleran*,[114] yaitu meskipun mereka beranggapan agama dan keyakinannya sendiri yang paling benar, tetapi juga menghormati kebenaran agama yang yakini dan diikuti orang lain. meskipun juga dianggapnya sebagai agama dan keyakinan yang salah. Bisa jadi dalam konteks Indonesia seperti halnya di Gresik ini, dapat masuk dalam katagori sebagaimana yang oleh Paul F. Knitter disebut *lazy tolerant* (toleransi malas-malasan).

Toleransi model ini muncul sebagai akibat dari pola hubungan yang berjalan tidak intensif atau perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama, sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama, maka dalam kondisi seperti ini bisa berakibat timbulnya konflik.[115]

Dalam kontek Gresik, tahapan hubungan antar individual dan antar tokoh agama cukup baik di antara mereka saling membantu dan berkunjung. Tetapi di antara mereka menjaga jarak tatkala menyentuh persoalan keyakinan dan masalah religi lainnya (baca: Akidah Agama). Lebih dari itu, apabila menyangkut keyakinan agama menjadi sangat sensitive apalagi dikaitkan dengan sejarah politik bangsa Indonesia, dan keberadaan agama Kristen yang seringkali dihubungkan dengan penjajahan Belanda, yang di yakini bahwa kehadiran Belannda di Indonesia membawa missionaris Kristen untuk mengajarkan agama kepada kaum pribumi. Di kalangan tokoh umat Islam maupun lapisan bawah, umat Islam Indonesia merupakan permasalahan menjadi catatan khusus dan tidak dilupakan begitu saja tetapi tidak mungkin diungkap secara umum, demi kerukunan dan toleransi. Namun demikian tetap tidak bisa hilang karena telah dimuat dalam kitab suci Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 120, yang menegaskan

[114] Brennan Hill,Paul F. Knitter ,William Madges., *Faith,….Op. Cit*
[115] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak ridho (rela) sebelum orang Islam menjadi pengikut mereka. Karena itu tetap menjadi pelajaran untuk diwaspadai.

Ayat tersebut berbunyi:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu (Muhammad) hingga kamu mengikuti millah (pola hidup atau agama) mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan jika seandainya kamu benar-benar mengikuti hawa nafsu (kehendak) mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu".[116]

Dari data sebagaimana dipaparkan di depan, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antarumat beragama menjadi di Gresik dapat disimpulkan secara teoritis dikatagorikan pada tingkatan *relative tolerance* dan bahkan menuju ke *Lazy Tolerance.* Menurut F. Knitter bahwa munculnya sikap toleransi jenis ini, sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Ini pula yang terjadi di Gresik. Umat Islam dan Kristen saling menjaga jarak ketika menyangkut persoalan keyakinan agama apalagi menyangkut urusan aqidah.

Apabila suatu waktu terjadi perbedaan, mereka membuat kesimpulan berdasarkan keyakinan agama masing-masing dan suatu saat tidak menutup kemungkinan membuat aksi atas keyakinan mereka itu. Seperti yang terjadi berkaitan dengan pendirian gereja-gereja yang ada diberbagai tempat di Gresik, demikian juga gereja yang dibangun di fasum perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik, yang menjadi obyek penelitian ini. Aksi sepihak yang pernah dilakukan adalah langkah umat Islam Gresik merobohkan patung Lyberti yang didirikan oleh perusahaan rokok Sampoerno, berada di kota Gresik bagian barat, oleh umat Islam Gresik dipahami sebagai patung Bunda Maria. Maka dirobohkanlah patung itu.

Fakta yang ada menujukkan bahwa relasi antarumat beragama di Gresik pada tingkat *relative tolerance* menuju *lazy tolerance* itu nyata, sebab bagi masing-masing umat beragama di Gresik menganggap bahwa keyakinan itu merupakan persoalan pribadi dan harus dijaga,

[116] Al-Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa diungkapkan dan riskan untuk dibahas demi toleransi sehingga menjadi permasalahan yang tidak mungkin selesai. Inilah model toleransi umat beragama di Gresik dan Indonesia umumnya, karena itu tidak mungkin untuk menjadi *absolute tolerance*.

B. Pendirian Gereja dan Problematikanya

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa hubungan antarumat beragama yang harmonis di Kabupaten Gresik sering terusik dengan berbagai persoalan keagamaan terutama pendirian rumah ibadat. Demikian juga hal-nya dengan pendirian gereja di Perumahan Non-Dinas TNI AL di Kota Baru Driyorejo Gresik. Pendirian gereja di kawasan perumahan ini sebenarnya dapat dirunut dari kondisi sosiologis Kabupaten Gresik yang tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Dengan bertambah ramainya penghuni di Perumnas tersebut, maka mayoritas penghuni beragama Islam mulai membangun masjid secara swadaya sebagai kebutuhan sarana ibadah. Sekitar tahun 2004, sudah ada 23 buah masjid dan mushalla yang dibangun dilahan fasum, di seluruh wilayah Perumahan KBD tersebut. Melihat hal tersebut, umat Kristen dan Katholik yang menjadi penghuni Perumnas Kota Baru Driyorejo juga ingin mendirikan gereja agar tidak perlu ke Surabaya kalau beribadah kebaktian pada hari minggu. Bahkan menurut penjelasan Pdt. B. Steven Sitorus, S.Th dan istri Pdm. Ruth Asmina Pasaribu, S.Th sejak tahun 2000 telah melakukan pelayanan dan kebaktian dan Sekolah Minggu dari rumah ke rumah.[117]

Keinginan umat Nasrani tersebut pada awalnya disampaikan kepada Manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik. Melihat kenyataan bahwa sudah ada rumah ibadat untuk umat Islam dan belum adanya gereja, maka manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik mengirim surat kepada General Manager Perum Perumnas Regional VI di Surabaya dengan nomor Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005 tanggal 7 September 2005 perihal Permohonan Lahan fasilitas umum (fasum) untuk sarana ibadah. Isi surat tersebut adalah permohonan pemakaian lahan fasum di Blok 12 H yang akan digunakan oleh 8 gereja dengan pembagian 3 denominasi yaitu Protestan, Karismatik dan Gereja Bethel Indonesia (AGAPE). Surat ini kemudian direspon oleh General Manager dengan surat balasan nomor: Reg.VI/Cab.Grs/403/ 09/2005, tanggal 13 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa karena di Perumnas belum ada sarana ibadat umat non-Muslim, maka General Manager

[117] Pdt. B. Steven Sitorus, S.Th. dalam http://stevensitorus.blogspot.com /2013/08/sejarahgpdi-pemulihan-kbd.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui penyerahan tanah tersebut untuk kepentingan tempat ibadat umat Kristen dan Katolik dengan ketentuan bahwa peruntukan dan penggunaan lahan untuk pembangunan gereja tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik.[118]

Sejalan dengan surat General Manager Perum Perumnas tersebut, Sekretaris Daerah Gresik juga telah mengirim surat kepada Manager Cabang Perum Perumnas di Driyoreja yang isinya antara lain: No.450/809/403.74/2005 tanggal 20 Oktober 2005, perihal Pemberitahuan Pemakaian Fasum. Surat ini menjawab surat dari Manager Cabang Perum Perumnas Driyorejo No. Reg.VI/Cab.Grs/806/09/2005, tanggal 17 September 2005, perihal Pemberitahuan Pemakaian Lahan Fasum untuk tempat ibadat. Dalam surat ini diterangkan bahwa, 1) bentuk kegiatan fisik yang ada di atas tanah fasum harus disesuaikan pada site plan yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) seyogyanya lahan fasum untuk keperluan tempat ibadat diserahkan dulu ke pemerintah daerah melalui tim verifikasi fasos/fasum; dan 3) Pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang akan mengatur peruntukannya. Manager Perum Perumnas Cabang Gresik juga menulis surat kepada Bupati Gresik, dengan surat Nomor: Reg.VI/809/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal persetujuan peruntukan dan penggunaan lahan untuk pembangunan gereja[119]

Selanjutnya sampai pada tahun 2007 belum ada penyerahan secara resmi lahan fasum/fasos tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, namun pada tanggal 10 Oktober 2007 Komandan Pangkalan Utama TNI AL V, mengeluarkan surat dengan Nomor: B.141-20/03/14/Lant-V, kepada Bupati Gresik yang isinya: mengizinkan kepada Panitia Pembangunan Gereja Kristen dan Katolik untuk mendirikan Gereja di lahan Perumahan TNI AL Driyorejo masing-masing seluas 500 m2 dan areal parkir bersama seluas 420 m2 dari lahan fasum seluas 1.420 m2. Surat tersebut diserta gambar denah lahan .[120]

Selanjutnya dengan adanya surat tersebut Gereja Kristen Bethany dan Katolik Santo Gabriel mengambil langkah antara Gereja Bethany Indonesia membuat surat Ketua RT disekitar Jalan Giok, dengan maksud untuk memberitahukan atau mensosialisasikan surat persetujuan pembangunan Gereja Bethany Indonesia di tanah fasum Perumahan TNI AL Wilayah Jln. Giok Kota Baru Driyorejo Gresik; Demikian juga Panitia dari Gereja Katolik

---

[118] Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan., Titik Suwariyati., Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , dalam: *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat.* Haidlor Ali Ahmad (ed) Jakarta 2012., 144

[119] *Ibid*., 145

[120] Surat Dan Lantamal V nomor: B/141-20/03/14/Lant V tertanggal 10 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Bupati Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santo Gabriel berniat memulai membangun gereja dengan mengadakan upacara peletakan batu pertama;

Selanjutnya merespon hal tersebut, masyarakat sekitar perumahan mulai resah, bahkan kemudian juga mempertanyakan status Gereja Kristen Bethany Indonesia yang sudah berwujud bangunan dan sudah dipergunakan untuk kebaktian. Kegelisahan masyarakat sekitar gereja dan Gresik pada umumnya disampaikan dengan alas an :

1. Pembangunan Gereja-gereja tersebut tidak memenuhi persyaratan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006);
2. Pembangunan Gereja tersebut melanggar Site Plane yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pembangunan tempat ibadah tersebut belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Gresik.[121]

Selanjutnya diadakan verifikasi oleh tim FKUB pada tanggal 12 Nopember 2008, terhadap persyaratan permohonan Gereja Bethany Indonesia, menghasilkan kesimpulan bahwa:

a. Dari 97 daftar calon pengguna rumah ibadah tersebut, hanya 23 orang yang sesuai dengan KTP beralamat di Petiken (sekitar Tempat Ibadah) di Driyorejo-Gresik;
b. Dari jumlah 60 (enam puluh) nama warga sekitar yang memberikan persetujuan yang berasal dari desa sekitar yaitu mulung hanya 14 orang saja.[122]

Berdasarkan hasil Verifikasi tersebut, selanjutnya FKUB Kabupaten Gresik mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 12/FKUB.GRS/11/2008, tertanggal 12 Nopember 2008, yang isinya tidak menyetujui atas permohonan gereja Bethany Indonesia karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006, pasal 14 ayat (2) yaitu daftar nama pengguna diserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna sejumlah 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/Kepala Desa setempat.[123]

---

[121] Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, BAB V pasal 18

[122] H.Y arham., pengurus FKUB Kabupaten Gresik , *Wawancara* , pada tanggal 29 Mei 2014

[123] Catatan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur, tentang kronologi pendirian gereja Betany Indonesia dan gereja Santo Gabriel Gresik., Surat disampaikan kepada Kesbanglinmas Kabupaten Gresik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pembangunan gereja tetap berjalan dan rekomendasi FKUB tidak dihiraukan, Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Gresik juga telah memberi peringatan, tetepi Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama V tetap bersikukuh bahwa pembangunan gereja telah memenuhi syarat yang ada, dan bahwa pembangunan 2 (dua) buah Rumah Ibadat di Perumahan Non Dinas TNI AL tersebut akan tetap dilaksanakan mengingat pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan anggota militer/Pns TNI AL dan warga sekitarnya.[124]

Masyarakat Gresik mulai mengadakan reaksi dengan membuat surat protes ke Bupati Gresik bahwa pembangunan gereja tidak memenuhi syarat harus dihentikan, Panitia pembangunan gereja tidak memperhatikan rekomendasi dari FKUB, Panitia pembangunan gereja berlindung Instansi pemerintah yaitu LANTAMAL V TNI AL, tindakan memberikan ijin pendirian gereja oleh LANTAMAL V TNI AL telah juga melanggar aturan dan kewengan.

Alasan penolakan masyarakat yang melakukan protes perlu didengan namun juga harus diketahui apa sebenarnya yang mendoron pihak Katolik-Kristen mendesak untuk membangun gereja tersebut. Ada beberapa alasan yang mendorong adanya gereja tersebut:

Upaya ini terutama diarahkan untuk menemukan titik temu dari akar permasalahannya. Karena dalam hal ini, pihak pendiri gereja-gereja yang ada di perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo itu juga bersikukuh bahwa mereka juga telah menjalankan prosedur perizinan yang ada. Keinginan memenuhi kebutuhan hidup sebagai umat beragama kaum Nasrani Kabupaten Gresik khususnya penghuni perumnas Driyorejo Kota Baru (DKB) dan lebih khusus penghuni perumahan Non Dinas TNI AL tersebut untuk memiliki tempat ibadah tersendiri, sebagaimana umat Islam yang juga sudah memiliki masjid. Bahkan sudah ada 24 masjid dan mushalla yang dibangun dilahan fasilitas umum (fasum).

Keinginan itulah yang kemudian mendorong umat Nasrani baik yang Katolik maupun Kristen. Maka mereka menyampaikan keinginan tersebut kepada Manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik. Melihat kenyataan bahwa memang belum ada gereja di wilayah dimaksud maka Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik mengirim surat kepada General Manager Perum Perumnas Regional VI di Surabaya dengan nomor Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005, tanggal 7 September 2005 perihal

[124]Surat KOARMATIM LANTAMAL V ini ditanda tangani oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Brigadir Jendral TNI (Mar) Halim A. Hermanto, SH dengan 13 tembusan yang disampaikan antara lain kepada: Kasal, Pangarmatim, Asintel, Aspers, Aslog Danlantamal V, Kadisfaslan Lantamal V, Bupati Gresik, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Ketua FKUB Kabupaten Gresik, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Betany dan Katolik di Driyorejo, Camat Dryorejo dan Kepala Desa Mulung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permohonan Lahan fasum untuk sarana ibadah. Isi surat tersebut adalah permohonan pemakaian lahan fasum di Blok 12 H, untuk digunakan oleh 8 (delapan) gereja dengan pembagian 3 (tiga) denominasi yaitu Protestan, Karismatik dan Gereja Bethel Indonesia (AGAPE). Surat ini kemudian direspons oleh General Manager Perum Perumnas dengan surat balasan nomor Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa karena di Perumnas belum ada sarana ibadat umat non-Muslim. General Manager menyetujui penyerahan tanah tersebut untuk kepentingan tempat ibadat umat Kristen dan Katolik dengan ketentuan bahwa peruntukan dan penggunaan lahan untuk pembangunan gereja tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik.[125]

Surat General manajer Perum Perumnas tersebut sejalan dengan pedoman penggunaan fasilitas umum antara lain sebagaimana isi surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik yaitu: 1) bentuk kegiatan fisik yang ada di atas tanah fasum harus disesuaikan pada site plan yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) seyogyanya lahan fasum untuk keperluan tempat ibadat diserahkan dulu ke pemerintah daerah melalui tim verifikasi fasos/fasum; dan 3) Pemda Kab. Gresik yang akan mengatur peruntukannya.

Sampai tahun 2007 belum ada penyerahan fasum/fasos kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, tetapi Pangkalan TNI Angkatan Laut sudah membuat surat kepada Kabupaten Gresik yang isinya mengizinkan kepada Panitia Pembangunan Gereja Kristen dan Katolik untuk mendirikan Gereja di lahan Perumahan TNI AL Driyorejo masing-masing seluas 500 m2 dan areal parkir bersama seluas 420 m2 dari lahan fasum seluas 1.420 m2.

Menindak lanjuti surat izin Dan Lantamal tersebut, maka Panitia Pembangunan Gereja Berthany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Yusuf segera melakukan tindakan aksi antara lain Gereja Betany Indonesia membuat surat edaran kepada pengurus RT–RW setempat dan kemudian melaksanakan pembangunan dan hampir selesai bahkan untuk gereja Bethany Indonesia sudah digunakan kebaktian.

Memperhatikan fakta di lapangan terkait dengan pendirian gereja di perumahan Kota Baru Driyorejo, ditemukan adanya komunikasi yang tidak lancar dan cenderung bersifat formal, terbukti adanya surat menyurat antarlembaga, sementara di antara mereka seolah ada jarak yang menyebabkan mereka tidak saling bertemu. Dalam konteks kerukunan umat beragama maka nampak sekali sikap saling mengambil jarak itu karena pembangunan gereja sangat erat kaitannya dengan persoalan spiritual yaitu aqidah agama, sehingga masing-masing

[125] Titik Suwarini., *Op. Cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak sangat berhati-hati. Ini dapat dikatakan bahwa secara teoritis sikap *Relative Tolerance* atau kalau menurut F. Knitter sebagai *Lazy Tolerance*. Para tokoh agama enggan untuk mendiskusikan secara langsung masalah yang menyangkut keyakinan sehingga perjumpaan yang ada adalah secara tidak langsung (*indirect encounter*).

Namun, nampaknya pihak kaum Nasrani memanfaatkan keberadaan pejabat dikalangan pemerintahan yang pada saat itu menjadi pimpinan Instansi Angkatan Laut. Ini ditunjukkan dengan surat menyurat yang berkaitan dengan pembangunan gereja dilakukan secara formal dan resmi oleh Instansi tersebut dengan alasan untuk pembinaan anggota.

Merujuk pada data di lapanngan, secara pisik masyarakat Gresik menolak dengan alasan minimal ada enam hal yang diabaikan yang cenderung merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pembangunan gereja yang didukung oleh Instansi TNI AL yaitu:

1. Komunikasi antar panitia pembangunan Gereja dengan masyarakat disekitar fasilitas umum yang akan di dirikan gereja lebih banyak bersifat formal dan ada kesan " menunjukkan kekuatan " antar instansi yaitu Koarmatim TNI AL di satu sisi dan masyarakat sisi lain serta Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
2. Panitia Pembangunan Gereja dengan dukungan Instansi TNI AL, merasa telah mempunyai kekuatan hukum untuk mendirian gereja, karena telah mendapat izin dari Instansi TNI AL, padahal Instansi TNI Angkatan Laut sebenarnya telah melanggar peraturan perundangan dan kewenangan. Peraturan yang dilanggar adalah PBM Tahun 2006 dan Kewenangan menentukan penggunaan fasilitas umum yang seharusnya melalui Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
3. Panitia pembangunan gereja telah mengabaikan prosedur dan melanggar aturan yang telah ditetapkan karena panitia sepertinya telah merasa mendapat legalitas dari Instansi TNI AL, yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang dalam pendirian rumah ibadat, yaitu gereja tersebut dan penunjukan penggunaan fasilitas umum yang seharusnya oleh pemerintah daerah;
4. FKUB yang seharusnya menjadi fasilitator dalam hal hubungan antarumat beragama dan mempunyai wewenang memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat, telah dibaikan terbukti dari fakta di lapangan hasil verifikasi FKUB berkaitan dengan persyaratan pendirian gereja, tidak diindahkan;
5. Hubungan dengan masyarakat dan penduduk disekitar tempat gereja akan dibangun seharusnya diminta izin melalui tanda tangan dan melampirkan foto copy KTP sebanyak paling sedikit 60 orang juga telah diabaikan, karena tidak tercukupi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Rekomendasi dari Kementerian Agama yang seharusnya menjadi salah satu syarat diizinkannya pendirian rumah ibadat juga telah diabaikan.

Hasil penelitian berdasar fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa pendirian gereja di fasilitas umum sekitar perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo Gresik ini menunjukkan bahwa ada masalah baik berkaitan dengan relasi sosial maupun prosedur pelaksanaannya. Ini seiring dengan kesimpulan di bagian A, bahwa fakta hubungan antarumat beragama di Gresik menunjukkan tingkat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di masih bersifat semu, dan masuk dalam kategori yang menurut F. Knitter disebut *relative tolerance* atau cenderung *Lazy Tolerance*. Karena itu pendirian rumah ibadat di Perumahan Non Dinas Driyorejo Gresik ini berjalan cukup panjang pada ujung akhirnya mengalami kemacetan. Dan sampai penelitian ini ditulis, gedung gereja yang dibangun itu merupakan bangunan setengah jadi, yang dihentikan pembangunannya, tidak boleh digunakan, dengan kondisi tidak terawan rumput yang tinggi, serta tidak jelas apa yang harus dilakukan. Di antara mereka saling menunggu dan sangat hati-hati untuk melangkah.

Memahami fenomena interaksi sosial dalam proses pendirian gereja-gereja di fasum Perumahan Non Dinas TNI AL di KBD tersebut dengan menggunakan metode fenomenologi sebagai penelitian sosial, sebagaimana yang dikenalkan Max Weber dengan pendekatan *Vestehen* untuk memahami makna tindakan seseorang. Dalam metode ini diawali dengan asumsi bahwa seseorang dalam bertindak bukan sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif ada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive.*[126] Dalam pandangan *Schutz,* bahwa tindakan subjek para aktor tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya dan etika agama atas dasar tingkat pemahaman sendiri sebelum tindakan di lakukan. Atau sebelum masuk pada *in order to motive*, harus ada *because motive* yang mendahului.[127]

Menurut Schutz, dunia sosial adalah merupakan tindakan intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna. Dengan demikian fenomena yang ditampakkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transcendental dan pemahaman tentang makna atau *vestehen* tersebut.[128]

---

[126] I. B. Wirawan., *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013) 134-136
[127] *Ibid,* 136
[128] *Ibid,*. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan umat Nasrani dalam mengusahakan berdirinya gereja di fasum KBD, yang memanfaatkan Instansi Angkatan Laut adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bermotif atau *in order to motive.* Namun sebelum tindakan itu dilakukan, telah ada tindakan awal yang mendahuluinya yaitu adanya tindakan berupa pembuatan surat menyurat, berbagai komunikasi, antara lain melakukan konsultasi ke Manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik, kemudian respon dari General Manager Perum Perumnas Regional VI di Surabaya, dan konsultasi kepada Instansi Dinas TNI AL dan lain sebagainya itu, merupakan tindakan awal yang mendahului pembangunan gereja tersebut.

Tindakan individu panitia pembangunan gereja yang mejadi *because motive* yang mendahului tujuan yang berupa *face to face relationship* dilakukan dalam bentuk mencari informasi, konsultasi, koordinasi dan surat menyurat dapat dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu tindakan yang bertujuan *in order to motive*. Tindakan seperti itulah yang oleh Weber dinilai sebagai suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat *efektual*, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari aktor itu sendiri.[129]

Dalam upaya membaca apakah benar yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan gereja sengaja melanggar dalam pembanguan gereja di lokasi tersebut, merasa dipersulit oleh masyarakat setempat. Menghayati apa yang dilakukan oleh umat Nasrani khususnya Panitia Pembangunan gereja maka sebelum disimpulkan melanggar atau tidak, perlu dikemukakan beberapa hal:

1. Upaya memanfaatkan Instansi pemerintah dalam hal ini TNI AL, dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat terwujudnya pembangunan rumah ibadat (gereja) dimaksud dan tidak mengalami kesulitan;
2. Pemanfaatan Instansi TNI Angkatan Laut, untuk membeck-up pembangunan gereja, tidak menjdikan masyarakat Gresik simpati, tetapi justru menimbulkan reaksi keras karena dianggap mengitimidasi dan malah dianggap penyalahgunaan wewenang pejabat Negara;
3. Terdapat pemahaman yang bias bagi panitia pembangunan gereja. Mereka menganggap izin dari Pimpinan Instansi Angkatan laut dianggap sah dan mereka merasa sudah benar membangun gereja tersebut padahal tindakan Instansi TNI AL memberikan izin adalah tindakan menyalahi aturan karena bukan wewnangnya;

[129] I. B. Wirawan., *Op.Cit*, 136-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pimpinan TNI Angkatan laut juga menyalahi prosedur yaitu telah melakukan penunjukan fasum untuk tempat ibadah. Penunjukan itu bukan wewenang TNI AL tetapi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Setelah membaca langkah dan usaha panitia pembangunan Gereja, Peneliti belum bisa memberi kesimpulan, menunda atau mengurung atau *ephoche* sebelum memperoleh gambaran yang utuh atas dua belah pihak. Karena itu perlu dihimpun dan dipahami pandangan umat Islam yang berada di sekitar gereja dan Gresik pada umumnya. Selanjutnya peneliti perlu membaca rekasi masyarakat Gresik di sekitar tempat pendirian Gereja yang sebagian besar adalah anggota TNI AL atau pegawai sipil Angkatan Laut. Data lapangan diperoleh dari masyarakat sekitar fasum yang didirikan gereja.

Masyarakat sekitar gereja pada dasarnya memahami bahwa pendirian gereja tersebut tidak benar dan mereka tidak setuju. Tetapi mereka tidak memungkinkan mereka melakukan protes atau memberikan reaksi penolakan, karena pada dasarnya yang selalu berada di rumah sekitar gereja adalah kaum wanita dan para suami mereka sering berada dinas luar, piket atau layar. Selain hal tersebut hasil wawancara terhadap warga sekitar gereja didapat kesimpulan antara lain :

1. Bahwa pembangunan gereja itu telah melanggar prosedur dan aturan yang ada;
2. Panitia melakukan minta tanda tangan dengan tidak fair atau ngakali;
3. Sebagai warga TNI memahami kebutuhan adanya gereja tersebut, tetapi cara yang dilakukan mengakibatkan mereka tidak simpati;
4. Mereka tidak protes karena keberadaannya sebagai anggota TNI tidak memungkinkan tetapi mendukung warga sekitar yang protes.[130]
5. Bangunan gereja yang tiba-tiba muncul 3 buah mengakibatkan warga kaget dan tidak setuju [131]

Membaca sikap warga Muslim di sekitar lokasi pendirian gereja tersebut pada dasarnya mereka juga tidak setuju dengan cara panitia pembangunan gereja itu melakukan kegiatan yang dengan cara tidak fair, atau dengan memanfaatkan Instansi pemerintah. Demikian juga tokoh agama, pemuda maupun tokoh pemerintahan memberikan tanggapan atas upaya dan langkah yang dilakukan oleh panitia pembangunan gereja dianggap menyalahi aturan dan menyinggung perasaan masyarakat gresik pada umumnya. Upaya membonceng Instansi pemerintah dalam

[130] Mohammad Ikhsan., Anggota TNI Warga sekitar Gereja, *Wawancara*, Driyorejo, 12 Juli 2016.
[131] Wahyu Sutrisnaka, Anggota TNI, Warga sekitar Gereja, *Wawancara*, Driyorejo, 16 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini TNI AL merupakan langkah yang keliru karena menyinggung perasaan umat Islam Gresik.

Dari pemahaman terhadap upaya yang dilakukan oleh umat Kristiani dan respon terhadap upaya panitia pembangunan gereja di fasum Non Dinas TNI AL, jika dianalisis dari *metode fenomenologi* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kekuatan pemerintah yaitu Instansi TNI AL, dalam rangka pembangunan gereja di Gresik adalah merupakan tindakan bertujuan atau *in order to motive* yang dilakukan setelah sebelumnya mengalami prose intersubjektif berupa hubungan tatap muka, konsultasi, membaca peraturan atau *face to face relationship* antar person yang bersifat unik. Sebagaimana dikatakan Weber, yang dikutif Collins(1997:113), tindakan rasional semacam itu adalah suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat afektual, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta atas dasar pemahaman makna subjektif dari actor itu sendiri.[132] Maka dari itu tindakan pelanggaran terhadap PBM tahun 2006, adalah dampak dari upaya untuk mengurangi kesulitan dilapangan dalam mencari tanda tangan dan penolakan masyarakat sekitar pembangunan gereja. Disamping itu juga setelah melakukan *face to face relationship*, ternyata rumit karena dibayang-bayangi penolakan warga masyarakat terkait data yang kurang lengkap dan image Gersik kota Santri, Gresik kota berhias iman, dan gambaran lain yang dikaitkan adanya penolakan oleh masyarakat di daerah lain seperti di Bekasi atau wilayah lain di Indonesia. Jadi tindakan yang dilakukan individu-individu yang terlibat dalam upaya pendirian gereja di fasum perumahan Non Dinas TNI AL tersebut bermakna ingin mencari kemudahan agar gereja cepat terbangun dan gunakan. Dan dimaksudkan pula agar masyarakan tidak menghalangi pembangunan tempat ibadah.
2. Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individe yang menolak dengan berbagai bentuk misalnya *demo* masyarakat menolak pembangunan gereja, membuat surat aduan kepada pejabat yang berwenang merupakan tindakan disebut intersubjektif merupakan proses interaksi makna dan simbolik di antara manusia yang bertindak. Memahami tindakan panitia pembangunan gereja telah memanfaatkan Pejabat instansi pemerintah dan selain itu telah melanggar peraturan dan wewenang, maka dimaknai oleh umat Islam sebagai sikap perlawanan yang menyinggung perasaan sehingga penolakan yang dilakukan semakin keras. Karena itu pembangunan gereja ditolak dan dihentikan

[132] I.B.Wirawan., *Op. Cit*, 136-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan semata karena melanggar peraturan tetapi karena menyinggung perasaan masyarakat setempat.

3. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa bagi masyarakat Gresik pemanfaatan simbol kekuasaan untuk mendukung pembangunan gereja tidak efektif untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan gereja, karena dianggap menyinggung perasaan, menantang dan mengusik symbol citra religious masyarakat gresik. Kekurangan persyaratan dalam pembangunan gereja masih bisa dimusyawarahkan karena ada FKUB yang merupakan symbol komunikasi antarumat beragama. Yang bertugas untuk musyawarah dan dialog guna menyelesaikan permasalahan tempat ibadat. Kekeliruan antar instansi pemerintah dalam penentuan penggunaan fasum bisa dikomunikasikan antar instansi pemerintah untuk penyelesaiannya.

Dari pemaparan tentang pendirian rumah ibadat yang terjadi perumahan Non-dinas TNI AL di Driyorejo Kabupaten Gresik tersebut dapat ditarik beberapa kenyataan yang didasarkan pada teori interaksionisme simbolik, bahwa keberadaan rumah ibadat atau Gereja-gereja yang didirikan di lokasi tersebut dipahami secara simbolis sebagai *counterculture* [133] terhadap kekuatan agama mayoritas, yakni Islam. Sebagai suatu simbol, maka eksistensi rumah ibadat atau Gereja-gereja tersebut dianggap merupakan ancaman bagai simbol Gresik sebagai kota Santri, selain itu, keberadaan rumah ibadat atau gereja-gereja itu dianggap merupakan simbol perpanjangan dari Perang Salib yang secara teologis merupakan ancaman bagi eksistensi agama Islam di Kota Gresik.

Dalam merespon keberadaan dan pendirian rumah ibadat ini, masyarakat Islam di Driyorejo Gresik melakukan reaksi simbolik juga dengan menyatakan bahwa keberadaan Gereja tersebut dianggap merupakan bentuk kewenang-wenangan dari oknum TNI AL tertentu yang disimbolkan sebagai representasi kekuasaan yang memaksakan kehendaknya. Dalam teori interaksionisme simbolik, dalam menanggapi simbol-simbol tersebut aktor memberikan tanggapan secara aktif dengan menciptakan dan mencipta ulang dunia tempat mereka berperan, dan bukan sekedar memberi respon secara pasif terhadap realitas yang memaksa dirinya. Oleh karena itu reaksi simbolik warga Driyorejo Gresik terkait dengan pendirian rumat ibadat tersebut dilakukan dengan gugatan legalitas formal yakni dianggap telah pelanggaran terhadap PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006. Gugatan legal formal ini dapat diartikan sebagai perlawanan

[133] Diadaptasi dari karya, , Theodore Roszak, *The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition*, (New York:Doubleday, 1968/1969)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbolik terhadap ancaman teologis maupun integritas masyarakat Gresik yang dicitrakan sebagai kota Santri.

C. Makna Pendirian Gereja Bagi umat Islam dan Nasrani (Katolik-Kristen)

Setelah melihat kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Gresik pada umumnya dan hubungan atau relasi antarumat beragama berdasarkan pendekatan pluralisme dan interaksionisme-simbolik pada khususnya, maka dalam subbab berikut akan dipaparkan data yang berkaitan dengan aspek subjektif dan intersubjektif terkait dengan pemaknaan dari aktor terhadap pendirian rumah ibadat di perumahan non dinas TNI AL Driyorejo Gresik.

Untuk memahami pemaknaan subjektif dan intersubjektif dari aktor yang terlibat dalam hal pendirian rumah ibadat ini, maka penulis menggunakan pendekatan sosiologi fenomenologis. Dengan pendekatan ini memungkinkan penelitian ini dapat memahami setiap makna yang dipahami oleh aktor, baik secara subjektif maupun intersubjektif dalam kaitannya dengan realitas pendirian rumah ibadat tersebut.

Secara prinsipil pendekatan sosiologi fenomenologi, lebih memberi perhatian terhadap aktor. Perhatian terhadap aktor ini dilakukan dengan melihat tindakannya sebagai individu atau subjek yang merespon keadaan di sekelilingnya dengan cara aktif serta memberikan reaksi berdasarkan pertimbangan subjektifnya. Meskipun demikian, sosiologi fenomenologis meletakkan tindakan aktor harus secara obyektif tanpa dilatarbelakangi teori atau predisposisi yang dimiliki oleh peneliti. Artinya, tindakan aktor diletakkan dalam kondisi wajar dan natural agar seluruh dimensi yang terkait dengan tindakannya tampak sedemikian nyata. Dengan metode *verstehen* atau *understanding* ini maka tindakan bermakna dari aktor dapat tersingkap.

Dalam konteks relasi antar umat beragama bahwa interaksi yang dari asumsi-asumsi sosiologi fenomenologis bahwa masing-masing penganut agama memiliki makna tersendiri sebagai hasil penafsiran dari proses interaksi dengan penganut agama selain yang diyakininya. Makna dan simbol keagamaan menjadi alat utama yang dapat menjadi referensi dalam menafsirkan berinteraksi antarumat beragama. Untuk memahami aktor memaknai secara subjektif atau intersubjektif terhadap pendirian rumah ibadat di perumahan Non Dinas TNI AL di Kota Baru Driyorejo Gresik ini, maka penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi fenomenologis. Pendekatan ini secara metodis memiliki asumsi-asumsi dasar yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguak dan mengungkapkan kandungan makna terhadap pendirian rumah ibadat tersebut. Oleh karena itu agar penangkapan fenomen subjektif dan intersubjektif terhadap makna pendirian rumah ibadat ini bersifat utuh dan obyektit, maka akan dilakukan analisis yang berimbang, baik terhadap aktor yang memiliki latarbelakang beragama Islam dan Kristiani (yakni umat Kristen dan Katolik).

1. Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Islam

Bagi umat Islam Gresik pendirian gereja di Perumahan Non Dinas TNI AL di Driyorejo Gresik, baik dari NU maupun Muhammadiyah memiliki makna yang variatif namun dari analisis ini akan dibaca dari sisi makna teologis (keagamaan), makna sosial keagamaan dan makna sosial kemasyarakatan:

a. Makna Teologis (Keagamaan)

Bagi umat Islam pendirian gereja di Perumahan Non Dinas AL di Driyorejo tersebut merupakan bentuk dari misi Kristenisasi. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran sebagai besar tokoh-tokoh agama Islam yang menyatakan bahwa keberadaan gereja-gereja ini akan dipergunakan tidak sekedar sebagai tempat kegiatan beribadah semata, tetapi juga sebagai pusat misi Kristenisasi. Menurut mereka, kaum Nasrani itu sangat agresif dan mereka gigih dalam menyiarkan agamanya. Para tokoh agama mendasarkan kekhawatiran tersebut pada ayat 120 Surah Al Baqarah yang dikenal dengan ayat "..*Walantardho*…" yang dipahami sebagai justifikasi terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi yang akan selalu mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti agamanya. Pandangan tersebut di sampaikan oleh umat Islam, dari kalangan NU maupun Muhammadiyah.

Dari beberapa tokoh masyarakat NU, baik tokoh Pemuda, Pemuka Agama maupun masyarakat dari tingkat awwam. Beberapa tokoh tersebut antara lain:

- **K.H. Afif Ma'sum, (Tokoh NU dan Ketua FKUB Gresik)**.
- **H. Nuruddin (Tokoh NU)**
- **H. Yarham, SH, M,Si (Tokoh NU di FKUB Kabupaten Gresik)**

Ketiga tokoh ini melihat keberadaan gereja bukan hanya sebagai tempat ibadah bermakna spiritual, akan tetapi sebagai bentuk missi Kristen. Karena itu mereka bertiga sangat waspada dan mengkhawatirkan terjadinya usaha pemurtadan dan mereka melihat bahwa umat Kristen itu sangat ulet mengajak mengikuti kegiatan dan ajarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K.H.M. Afif merasakan kekhawatiran dengan upaya-upaya umat Kristen memaksakan adanya gereja itu dengan memanfaatkan instansi pemerintah untuk berdirinya gereja tersebut[134]. Pak Nuruddin juga khawatirkan umat muslim akan terpikat dan terhanyut dengan ajaran Kristen. Menurutnya misionaris mereka itu sangat ulet sekali untuk memanfaatkan kesempatan dengan menyampaikan misinya.[135]. Demikian juga H. Yarham merasakan adanya kekhawatiran masyarakat Gresik akan terpengaruh ajaran missi Kristen dengan adanya gereja tersebut. Dengan keuletan missi Kristen pasti mereka juga akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya.[136]

Tokoh muda NU yang sangat potensial yaitu **DR. H. Mohammad Toha, M.Ag,** Tokoh NU yang menjabat sebagai Sekretaris FKUB Kabupaten Gresik, Wakil Ketua NU Cabang Gresik, juga menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Kepegawaian Kemenag Jawa Timur, menjelaskan bahwa latar belakang yang paling dominan penolakan terhadap keberadaan gereja itu adalah faktor ajaran agama. Hal ini wajar mengingat tujuan pendirian rumah ibadat dalam hal ini gereja, karena didorong oleh umat penganut agama tertentu yang cukup kuat sehingga tokoh-tokoh agama tersebut berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara mendirikan rumah ibadah. Dalam kaitannya dengan missi agama, jelas memiliki kaitan karena mustahil pembanguanan rumah ibadah yang menyedot anggaran cukup besar tanpa didasari program yang terstruktur dan terukur[137]

Tokoh grassroot yang juga aktif di masjid adalah **H. Haslan,** Jamaah NU aktif sebagai Pengurus Masjid ini memandang adanya gereja akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk menjadi pengikut Kristen dengan berbagai cara,…"seperti di daerah lain yang saya ketahui mereka itu mengajak dengan memberi bantuan macam-macam dan yang saya sering dengar dengan bantuan *mie instand* serta berbagai cara lainnya…[138].

Sementara itu dari kalangan umat ***Islam Muhammadiyah*** menilai bahwa panitia pendirian gereja di fasum Perumahan Non Dinas TNI AL, sangatlah gigih sehingga berusaha mendapat dukungan masyarakat dengan rela memberi uang. Bahkan mendapat dukungan Instansi Pemerintah yaitu TNI AL. Di antara tokoh Pengurus Muhammadiyah tersebut yaitu:

- **Drs. H. In'am, M.Ag (Pengurus FKUB Unsur Muhammadiyah)**

[134] KH. Afif Ma'sum, Ketua FKUB Gresik, tokoh Agama Islam, *Wawancara,*16 Mei 2014

[135] H. Nuruddin., tokoh Agama dari NU, *Wawancara,* tanggal 16 Mei 2014
[136] H. Yarham., tokoh Agama Islam, Pengurus FKUB , *Wawancara,* tanggal 29 Mei 2014
[137] H. Mohammad Toha., Sekretaris FKUB, Wakil Ketua PC NU Gresik, *Wawancara,* tanggal 16 Mei 2014
[138] H. Haslan, Ta'mir masjid Intan, *Wawancara,* 27 Mei 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **H. Wahyani Pengurus PD. Muhammadiyah Gresik.**
- **H.** Budi Wagino, Pengurus Masjid Muhammadiyah

Para tokoh dilingkungan Muhammadiyah Gresik maupun kalangan Grassroot memandang bahawa keberadaan gereja asal memenuhi syarat pembangunannya tidak ada masalah tetapi apabila melanggar pasti ditolak.[139]

Pak Wahyani mengatakan, bahwa pendirian gereja di fasum tersebut secara regulasi tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang ada, karena itu harus ditolak. Jika mereka menuntut di sekitar kita banyak masjid hal ini sama seperti di Manado, setiap desa ada Gereja berbagai macam aliran.[140]

Pak Budi malah mengkhawatirkan kehadiran gereja itu mempengaruhi masyarakat sekitar yang lemah imannya. Ia menggambarkan pengalamannya bahwa penolakan itu harus dilakukan mengingat bagaimanapun umat Kristen selalu berusaha mengajak umat beragama lain dan yang belum beragama untuk mengikuti kegiatannya, "…mereka sangat ulet mencari penganut baru, mereka mendatangi umat di sini dengan berbagai dalih, pemberian bantuan sampai penjemputan untuk mengikuti berbagai kegiatan... Menurutnya…"mereka pasti akan mempengaruhi orang disekitarnya, mereka juga akan mengajak sampai kita mengikuti mereka, umat Nasrani tidak akan ridho sebelum kita mengikuti ajaran mereka.[141]

2. Makna Sosial Keagamaan

Keberadaan gereja juga dipandang sosial (sosio –religius) sosial keagamaan. Beberapa tokoh masyarakat dan Agama memberikan alasan tersebut di antaranya:

- **H. Eko Sarupo, Ketua RW VIII Randegansari-Driyorejo Gresik**
- **H. Makmun, Pengurus NU Cabang Gresik**
- **Drs. H. Mushofa Azis, M.Ag tokoh Islam dan Pengurus NU Gresik**

Bagi masyarakat Gresik, gereja juga dilihat dari segi social keagamaan, mereka menghubungkan dengan simbo-simbol keagamaan. Dan hal ini sangat sensitive sekali, sehingga patung Lyberty di sebelah barat kota Gresik dirobohkan karena difahami sebagai patung Bunda Maria.[142] Ikon kota santri ini dipegang teguh dan berusaha di

[139] H. In'am, M. Ag, Ketua PD. Muhammadiyah Gresik, *Wawancara* . tanggal 6 Juni 2014
[140] H. Wahyani, Pengurus Daerah Muhammadiyah Gresik, *Wawancara*, 6 juli 2014.
[141] H. Budi Wagino, Anggota TNI AL, Tokoh masyarakat grassroot, *Wawancara*, 15 Mei 2014.
[142] H. Makmun, Wawancara, 27 Mei 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertahankan.…”sepertinya ikon itu yang berusaha ditanamkan masyarakat di sini” …[143] itu kata Pak Eko. Namun bagi pak Mushaffa, masyarakat gresik itu sangat toleran, tetapi apabila terjadi pelanggaran aturan dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama mayoritas, maka umat di sini tidak menutup kemungkinan mereka pun akan bersikap nekat dan tidak segan untuk menggunakan kekerasan Bahkan jika pendirian Gereja ini diteruskan maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut dianggap sebagai sebagai musuh agama yang berujung pada justifikasi

3. Makna Sosial Kemasyarakatan

Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, keberadaan gereja di fasun Perumahan Non Dinas TNI AL banyak dikaitkan dengan masalah ketertiban dan keamaan masyarakat. Apalagi dikaitkan dengan campurtangan dari oknum pimpinan TNI AL yang menjabat pada waktu, ia dan dukung oleh para penganut Nasrani. Beberapa tokoh dan masyarakat gresik diantaranya mulai Wakil Bupati sampai Kepala Desa antara lain :

a). Pejabat Tingkat Kabupaten

- **DR.H. Muhammad Qosim, M.SI, Wakil Bupati Gresik**
- **Drs. H. Haris Irianto, MM ,Camat Driyorejo**
- **Kapten Saly, Komandan Daerah Militer (DANRAMIL) Driyorejo**
- **AKP. Moh. Nurhidayat, SH, SIK. MM Kapolsek Driyorejo**
- **SUBAGYO, Kepala Desa Mulung**

Menurut Pak Qosim, pelanggaran terhadap peraturan yang ada terkait pendirian rumah ibadat dianggap mengusik simbol-simbol kedamaian, karena kita di Indonesia ini berdasarkan Pancasila; sebagai pejabat, karena aturannya seperti itu, maka kita harus tunduk dengan aturan Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum[144]. Pak Haris juga memandang bahwa “alasan penolakan terhadap pendirian gereja tersebut adalah karena lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana dala *site plane*, fasilitas umum tersebut sebenarnya untuk pertokoan, sehingga kami tidak bisa memberikan rekomendasi atau persetujuan.[145]

Menurutnya Kapten Saly, pendirian rumah ibadah tersebut ditolak karena belum terpenuhinya persyaratan yang harus dilengkapi dalam pendirian rumah ibadah. Karena itu

[143] H. Eko Sarupo, Ketua RW VIII Randegansari, *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2014
[144] H.M. Qosim, Wakil Bupati Gresik., *Wawancara*, Gresik, 28 April 2014
[145] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan izin pendirian rumah ibadah tersebut belum dipenuhi… "Kami sudah memberikan penerangan kepada masyarakat yang bermaksud mendirikan rumah ibadah agar mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi, alasan penolakan terhadap pendirian gereja tersebut murni karena belum terpenuhinya persyaratan".[146] Kapolsek Driyorejo ini mengatakan bahwa masyarakat yang menolak terhadap pembangunan gereja yang menganggap menyalahi aturan tersebut. Dan pendirian gereja tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur.[147]

Fasum Perumahan Non Dinas TNI AL yang menjadi tempat pendirian gereja berada pada wilayah kekuasaan Kepala Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo. Karena dianggap belum memenuhi syarat yang ditentukan maka Subagyo membuat pernyataan tidak berani menandatangani proposal yang diajukan oleh panitia pembangunan gereja.[148]

b) Kalangan tokoh Agama terkait masalah sosial kemasyarakatan

Di antara tokoh agama yang menghubungkan dengan masalah kemsyarakatan adalah:

- **H. Yarham, SH. M. MSi**
- **H. Sururi, Tokoh Pemuda**
- **Drs. H. Saifuddin, M. Ag**
- **H. Budi Wagino**

Para tokoh agama, pemuda maupun kalangan grassroot, memandang dari sisi social kemasyarakatan pembangunan gereja yang mengatasnamakan pemerintah dalam hal ini TNI AL tidak benar palagi dilakukan dengan melanggar aturan dan prosedur. Ini justru membuat warga gresik tidak simpati. Menurut mereka ada dua pleanggaran yaitu persyaratan pendirian tempat ibadah yang tidak dipenuhi dan kewenangan penetapan tempat ibadah yang bukan kewenangannya.[149] Demikian juga arogansi dengan mengatasnamakan Instansi pemerintah dan menggunakan istilah yang tidak tepat yaitu nama *Gereja Maritim*.[150] H. Saifuddin melihatnya gereja itu tempat untuk ibadat dan taka layak dibangun dengan melanggar regulasi. "Masyarakat di sini menganggap permasalahan gereja ini adalah persoalan regulasi kalau saya, bukan masalah Gresik kota Santri. Kesulitan orang Islam di daerah lain, juga bukan karena itu,

[146] Komandan Daerah Militer Gresik, *Wawancara*, 24 April 2014
[147] AKP. Moh. Nurhidayat., Kapolsek Driyorejo-Gresik., *Wawancara*, 24 April 2014
[148] Surat Pernyataan Kepala Desa Mulung , Subagyo, tertanggal 19 Nopember 2010
[149] H. Yarham, Tokoh Agama di Driyorejo Gresik., *Wawancara*., Mei 2014
[150] H. Sururi, S.Ag, M.Si. Tokoh Pemuda Driyorejo Gresik., *Wawancara*, 27 Mei 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya tidak menganalogkan dengan itu tetapi karena konflik itu muncul karena arogansi mereka, ada seorang Muslim tetapi dikata-katai sebagai anjing. Mereka bukan hanya minoritas tetapi jamaah itu drop-dropan, ada orang yang mengatasnamakan pemerintah yaitu angkatan laut"...[151]

Sementara Pak Budi bahwa pembangunan gereja tersebut tidak prosedural dan melanggar aturan yang ada, maka masyarakat sekitar segera menolak dan ikut meluruskan dan memberitahukan kepada masyarakat lain. selain daripada itu penolakan itu karena bagaimanapun umat Kristen selalu mengajak umat lain untuk mengikuti kegiatannya..[152]

Dari pemaparan data yang panjang terkait dengan pemaknaan atas dibangun dan didirikannya gereja di fasilitas umum Perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik ini dapat di baca bahwa umat Islam Gresik pada umumnya dan lebih khusus Kota Baru Driyorejo melihat bahwa Gereja adalah simbol ajaran agama yang mengajarkan kebenaran dan harus dilakukan secara benar, karena itu jika menjalan agama dengan cara tidak benar, maka apa bedanya antara agama dengan partai politik. Karena itu terkait dengan pendirian gereja dengan berbagai problematikanya terjadi dalam masyarakat maka umat Islam Gresik menilai dengan bertbagai sisi. Pemuka Agama, Pejabat Pemerintahan dan masyarakat umum telah memeknai sesuai persepsi masing-masing.

Pemuka agama Islam melihat gereja dari sisi religi sehingga yang nampak dalam menanggapi berdirinya gereja tersebut adalah rasa bagaimana cara membentengi umatnya dari pengaruh agama Kristen atau Katolik yang timbul dari adanya gereja. Kekhawatiran tersebut dikemas dari berbagai alasan menolak gereja itu dibangun. Jika dilihat dari kacamata fenomenologi sosial, maka dalam pemikiran tokoh agama Islam telah adanya pengalaman pengalaman awal terkait dengan pendirian gereja. Bagi para tokoh agama hal yang paling mendasar diketahui adalah umat Kristen ietu sangat agresif sehingga dengan adanya gereja itu mereka pasti akan mempengaruhi orang Islam disekitarnya. Inilah bentuk awal pengetahuan tentang orang Kristen yang menurut fenomenologi disebut *face to face relationship*, suatu tindakan yang mendahului tindakan bertujuan *in order to motive*, yaitu agar tidak terjadi adanya kemurtadan dengan adanya gereja. Karena itu para tokoh agama berupaya agar tidak ada pembanguna gereja maka dengan berbagai alasan dikemukanan oleh umat Islam melalui tokoh agama maupun para pejabatnya.

---

[151] *Ibid*

[152] H. Budi Wagino., Warga Komplek Intan 2.7 Blok K-12 Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo – Gresik, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pejabat pemerintahan memaknai gereja dari sisi yuridis dan relasi antarumat sehingga dengan adanya gereja masyarakat nyaman beribadah dan dalam kehidupan kemasyarakatan. Karena itu jika keberadaan tempat ibadat dibangun dengan tidak sesuai aturan dan taat prosedur, maka akan berdampak pada ketentraman masyarakat, dan ketertiban lingkungan. Reaksi para pejabat di Kabupaten Gresik sampai pada tingkat desa, merupakan tindakan yang bertujuan atau *in order to motive*. Para pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan kedamaian masyarakat dan lingkungannya. Karena itu untuk menjaga agar stabilitas lingkungan terjaga maka para pejabat tidak bersedia mengeluarkan rekomendasi dan persetujuan atas pendirian gereja di wilayah tersebut.

Dalam konteks makna dibalik penolakan dan reaksi terhadap pendirian gereja di fasum Perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo, dapat dikatakan bahwa penolakan, tidak memberi izin dan protes, sebenarnya bermuara pada adanya motive atau makna dibalik tindakan tersebut adalah adanya kekhawatiran yang sangat mendalam bahwa keberadaan gereja di tempat tersebut sebagai wujud dari upaya agama Kristen yang tidak akan berhenti mengajak orang lain, sebelum umat Islam mengikuti, terpengaruh dan menjadi pengikut agama Kristen atau murtad. Upaya penolakan dengan berbagai alas an tersebut juga salah satu bentuk menjaga nilai agama dalam masyarakat gresik tidak terkontaminasi oleh agama dan keyakinan lain diluar Islam.

Alasan pelanggaran dan aturan perundangan adalah alasan perantara untuk tujuan akhir yaitu terjaganya umat Islam dari kemurtadan dan sterilnya Gresik dari pengaruh yang dapat mencederai citra Gresik sebagai kota santri, kota wali, kota wisata rligi dan berhias iman.

4. Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Nasrani (Katolik dan Kristen)

Bagi umat Nasrani (Katolik dan Kristen) pendirian rumah ibadat atau Gereja tersebut memiliki makna yang cukup signifikan, baik sebagai tempat ritual peribadatan atau sosial keagamaan.

1.1.Makna Pendirian Gereja bagi Umat Katolik

a. Makna Teologis keagamaan

Dikalangan umat Katolik, secara spiritual tujuan utama gereja dibangun adalah sebagai tempat berkumpul untuk beribadah. Bagi umat Katolik gereja itu merupakan kebutuhan.

- **Yohanes Irfan; Pengurus KWI tokoh Katolik di FKUB Gresik**
- **Paulus Adi Pranoto, Tokoh dan Jamaah senior Katolik Gresik**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Martinus Lande, Tokoh Katolik di Perumahan KBD dan Calon Pengguna Gereja Santo Gabriel**

- **Vitus S.Y. Aktifis Gereja Katolik dan Calon Pengguna Gereja**

Menurut Pak Irfan bahwa gereja itu didirikan sebagai tempat ibadah, untuk menyatukan umat sesuai keyakinannya dan membina mental spiritual. Dengan adanya gereja sebagai tempat umat Katolik dapat melakukan ibadat bersama-sama. Selama ini umat Katolik di Driyorejo melaksanakan ibadat, dari rumah ke rumah. Kalau ingin melakukan ibadat bersama mereka juga menjadi masalah, karena rumah di sini kecil-pkecil. Juga berkumpul dengan jamaah yang banyak di kampung atau perumahan di sini, parkir kendaraan akan membuat gaduh dan menggangu lingkungan setempat.[153] Gereja tersebut juga diharapkan mempunyai fungsi selain sebagai tempat ibadah juga untuk menyatukan umat sesuai keyakinannya dan membina kehidupan mental spiritual mereka...[154]

Menurut Paulus, jemaatnya dapat beribadah bersama, anak-anak dapat pembinaan mental spiritualnya dan komunikasi social menjadi lancer. Secara khusus Martinus menyayangkan penutupan gereja tersebut. Tindakan penghentian pembangunan gereja itu menjadi sesuatu yang tidak elok dipandang dan untuk generasi ke depan. Bahkan dia pernah didatangi tetangga-tetangga yang Muslim, mereka meminta agar banguna gereja itu dilanjutkan agar tidak kumuh lingkungan itu.[155]

Secara khusus Martinus Lande menyayangkan penutupan gereja tersebut. Tindakan penghentian pembangunan gereja itu menjadi sesuatu yang tidak elok dipandang dan tidak bagus untuk generasi ke depan. Bahkan dia yang pernah didatangi tetangga-tetangga yang Muslim, mereka meminta agar bangunan gereja itu dilanjutkan agar lingkungan tersebut tidak Nampak kumuh lingkungan itu.[156]

Menurut Pak Vitus, yang calon penguna gereja Katolik dan seorang anggota TNI Angkata Laut " mengatakan bahwa gereja ini akan difungsikan untuk pembinaan anak-anak, apalagi kedepan mereka sebagai generasi penerus yang akan menjadi penerus kita, yang perlu kita bina sejak dini. Zaman kita saat ini sudah modern, kalau saat ini anak kita tidak dibentengi,

[153] Yohanes Irfan, Wawancara, Gresik 8 Juli 2015
[154] Yohanes Irfan, *Ibid*., 12 Juli 2015
[155] Martinus Lande., *Wawancara*. Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015
[156] Martinus Lande., *Wawancara*. Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka akan menjadi liar dan mereka akan rusak mentalnya, maka dengan adanya gereja ini mereka mempunyai tempat untuk berkumpul dan dibentengi dengan agama.[157]

1.2.Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Kristen

Bagi umat Kristen, baik Jawi Wetan maupun Bethany dengan adanya gereja itu berarti tersedia pembinaan spiritual.

- **Sutiono, tokoh Kristen Jawi Wetan, Calon Pengguna Gereja**
- **Pendeta Ari Setiorini, Pembimbing umat Kristen di Gresik**
- **Tawarik Panggabean, Pengurus Gereja Bethany dan Calon Pengguna Gereja**

Menurutnya para tokoh ini, dengan adanya gereja itu tersedia tempat pembinaan mental spiritual. Dikatakan bahwa kehadiran gereja sangat penting karena kita butuh sebagai sarana interaksi satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Arti penting tempat ibadah bagi kami adalah bukan hanya untuk umat beragama itu sendiri, tetapi secara umum tempat itu untuk pembinaan dan penanaman mental spiritual, dinegeri ini butuh orang yang jujur dan tanggung jawab. Gereja butuh untuk kegiatan ritual dan pembinan bagi mereka, melalui gereja inilah dibentuk orang yang jujur dan tanggung jawab…[158]

Pendeta Ari merasakan dengan adanya gereja itu memberikan semangat untuk beribadah dan bersemangat untuk hidup, maka dengan penutupan itu gairah berjamaahnya menurun. Gereja bukan sebuah identitas tapi gereja adalah pembimbingan. Simbol-simbol ritus itu menimbulkan semangat untuk beribadat bukan untuk makar.[159]

Tawarik Panggabean, sebagai menganut agama Kristen Bethany menganggap bahwa gereja sebagai sarana pendidikan, pembinaan spiritual keluarga agar anak-anak, dengan adanya gereja sebagai sarana pembinaan mereka tidak liar dan mabuk-mabukan di jalanan. Dengan adanya gereja, anak-anak itu tidak liar, dengan adanya gereja ini pula mereka bisa mengadakan kegiatan yang bermakna. Dengan demikian gereja berfungsi sebagai sarana untuk pembinaan anak dan bangsa. [160]

b. Makna Sosial keagamaan

[157] Vitus S.Y., *Wawancara,* Driyorejo-Gresik, 12 Juli 2015
[158] Sutiono,. *Wawancar*a., Driyorejo, Gresik ,. 12 Juli 2015
[159] Pdt.Ari Setiorini, *Wawawncara.*, Gresik 8 Juli 2015
[160] Tawarik Panggabean., *Wawancara*, 12 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi umat Nasrani baik Katolik maupun Kristen, keberadaan gereja bagi mereka mempunyai makna sosial yang sangat penting. **Bagi umat Katolik,** Gereja mempunyai Makna sosial.

- **Yohanes Irfan. Tokoh Katolik**
- **Vitus SY. Pengguna gereja Katolik, anggota TNI Angkata Laut**
- **Paulus Adi Pranoto, tokoh Katolik pengguna gereja,**

Menurutnya pembangunan gereja sebagai tempat ibadah dan sarana untuk menyatukan umat sesuai keyakinannya serta membina mental spiritual Ia mengatakan: Umat dapat berkonsentrasi dalam beribadah, menyalurkan ide-ide, dan dengan adanya tempat ibadat itu, bisa dijadikan sebagai sarana pembinaan anak-anak, keluaraga dan komunikasi sosial. Dan disamping itu juga mereka dapat melakukan ibadat bersama-sama, dan konsultasi masalah-masalah sosial".[161]

Sebagaimana disampaikan oleh Vitus SY, penguna gereja Katolik, seorang anggota TNI Angkata Laut, bahwa gereja ini akan difungsikan untuk pembinaan anak-anak, apalagi kedepan mereka sebagai generasi penerus yang akan menjadi penerus kita, yang perlu kita bina sejak dini. Zaman kita saat ini sudah modern, kalau saat ini anak kita tidak dibentengi, mereka akan menjadi liar dan mereka akan rusak mentalnya, maka dengan adanya gereja ini mereka mempunyai tempat untuk berkumpul dan dibentengi dengan agama.[162]

Menurut Pak Paulus, Bahwa sesuai UUD tahun 1945, ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, ada pembimas di Kementerian Agama, kita ini membantu tugas pemerintah dalam pembinaan masyarakat atau warganya melalui agama masing-masing, dengan adanya gereja ini kita bisa bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembinaan umat. Dengan begitu, dapat terjadi hubungan yang indah, dilihat dari atas indah dan dari bawah itu indah juga. Artinya ketika kita melihat masyarakat ditingkat atas, pemerintahnya, tokohnya indah hubungannya maka di tingkat dibawah, *grassroot* juga indah dirasakan. [163]

Masyarakat Driyorejo yang beragama **Kristen** menginginkan bahwa pendirian gereja memiliki makna yang penting dibidang social keagamaan. Tokoh merka menyatakan:

- **Pendeta Ari Setiorini. Pembimbing umat Kristen Jawi Wetan**

[161] Yohanes Irfan, *Wawancara*, Gresik 8 Juli 2015
[162] Vitus S.Y., *Wawancara*, Driyorejo-Gresik, 12 Juli 2015
[163] Paulus Adi Pranoto., *Wawancara*, 12 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Setiono, pengguna gereja Kristen Jawi Wetan**
- **Tawarik Panggabean, Kristen Bethany**

Pendeta Ari menyatakan adanya bangunan gereja itu memberikan semangat, maka dengan penutupan itu gairah berjamaahnya menurun. Gereja juga bukan sebuah identitas tapi gereja adalah pembimbingan. Simbol-simbol ritus itu menimbulkan semangat bagi mereka.[164] Sementara itu Pak **Setiono,** mengatakan…gereja merupakan kebutuhan, arti penting tempat ibadah itu adalah bukan hanya untuk umat beragama itu saja, tetapi secara umum gereja itu untuk pembinaan dan penanaman mental spiritual, di negeri ini butuh orang yang jujur dan tanggung jawab.[165]

Menurut Tawarik Panggabean dari segi sosial gereja tidak untuk hura-hura, tetapi untuk membina anak-anak kita agar tidak liar, gereja berfungsi untuk pembinaan akhlak, bisa untuk membentuk umat menjadi baik. Gereja sebagai sarana pendidikan, pembinaan keluarga, dengan demikian mereka terarah dan mabuk-mabukan,..[166]

c. Makna Sosial Kemasyarakatan

Baik umat Katolik maupun Kristen, gereja juga punya fungsi sosial kemasyarakatan. Penganut Katolik melihatnya dari berbagai sisi sosial-budaya, ekonomi, keindahan lingkungan masyarakat bahkan bermakna politik.

- **Martinus Rande,**
- **Vitus S.Y. Jemaat Katolik**
- **Pendeta Ari Setiorini, Pendeta Kristen Jawi Wetan**

Pak Martinus, melihatnya bahwa pemanfaatan dan penggunaan gereja-gereja tersebut apabila terjadi, akan menunjukkan bahwa bangsa kita itu bangsa yang rukun dan toleran, semua umat beragama diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Karena itu apabila gereja itu "mangkrak", maka menjadi tidak elok, tidak sesuai dengan budaya kita.[167]

Selain itu dia juga melihatnya secara ekonomis, bahwa keberadaan gereja membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Ada tukang parker, penjual makanan,

[164] Pdt. Ari Setiorini, *Wawancara* , Gresik 8 Juli 2015
[165] Setiono., *Wawancara*, 12 Juli 2015
[166] Tawarik Panggabean, *Wawancara*, 12 Juli 2015
[167] Martinus Rande, *Wawancara*, Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jamaat diuntungkan secara ekonomis kita harus mengeluarkan sejumlah uang kalau harus pergi ke Karangpilang untuk kebaktian kata Pak Martinus..[168]

- **Vitus S.Y. Jemaat Katolik**

Sedangkan menurut pak Vitus S.Y…"bahwa penolakan gereja itu bukan dari orang sekitar lokasi ini, tetapi dari orang lain yang jauh dari tempat ini, jadi ada faktor politik, atau dipolitisir permasalahan ini.[169]

Sementara itu dari kalangan **Kriste**n melihat bahwa dari segi sosial kemasyarakatan, gereja mempunyai makna symbol dan semangat yang mendorong kemajuan jemaat.

- **Pendeta Ari Setiorini**

Dikatakan bahwa …"Gereja bukan sebuah identitas tapi gereja adalah pembimbingan. Simbol-simbol ritus itu menimbulkan semangat." [170] Yang jelas dengan berfungsinya gereja sebagai tempat ibadat, dan berbagai fungsi lain yang melahirkan aktifitas pendidikan, tempat komunikasi sosial, bahkan mendorong tumbuhnya ekonomi kecil dan menengah dilingkungan gereja tersebut.

Dari data lapangan yang terkait dengan pemaknaan terhadap sikap dan respon penolakan masyarakat Driyorejo Gresik terhadap pendirian Gereja tersebut di satu sisi, dan keluhan serta argumentasi pembelaan dari pengguna Gereja terkait dengan keberadaan atau pendirian rumah ibadat di lingkungan mereka di sisi lain menunjukkan bahwa kondisi toleransi yang terjadi dalam masyarakat meskipun selama ini berjalan dalam pola toleransi relatif *(relative tolerance)*, dimana masyarakat Driyorejo Gresik yang meskipun mayoritas beragama Islam tetapi masih mengedepankan rasa hormat terhadap umat yang beragama lain, namun jika dilihat lebih tajam lagi menunjukkan bahwa dalam kenyataannya masih menyisakan rasa ketidaksepahaman antarumat beragama. Toleransi ini meskipun masih menunjukkan ciri-ciri adanya rasa penghormatan terhadap agama lain yang berbeda, namun sikap penghormatan ini hanya bersifat eksternal. Menurut istilah Paul Knitter, inilah jenis toleransi malas-malasan *(lazy tolerance)*. Toleransi ini diakibatkan oleh karena tidak atau belum terjadinya penjumpaan secara langsung bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik.

---

[168] *Ibid*
[169] Vitus S.Y. *Wawancara,* Driyorejo , Gresik., 12 Juli 2015
[170] Pdt. Ari Setorini, *Wawancara*., Gresik 8 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini tampak dari perbedaan yang sangat menonjol pemaknaan informan terkait dengan aspek teologis. Menurut, umat Islam Driyorejo Gresik keberadaan atau pendirian Gereja merupakan ancaman bagi eksistensi Islam karena mengingatkan pada peristiwa Perang Salib atau mencederai ikon Kota Gresik sebagai kota Santri yang relijius Islami. Sedangkan, dari pihak umat Kristiani, pendirian Gereja tersebut merupakan sarana ritual yang akan memberikan rasa damai dan tentram, bukan untuk maksud dan missi Kristenisasi sebagaimana disangkakan.

D. Temuan Makna Pendirian Rumah Ibadat (Gereja) dalam konteks Relasi Antarumat Beragama di Gresik

Dalam subbab ini akan dibahas tentang proses interaksional relasi antarumat beragama yang bersifat dinamis dimana proses ini didekati dengan menggunakan teori pluralisme Agama, pendekatan interaksionalisme-simbolisme dan sosiologi fenomenologis. Dalam proses interaksional yang besifat simbolis ini akan ditemukan orientasi pemaknaan terhadap keberadaan Gereja antara umat Islam dan umat Kristiani, yakni umat Kristen dan Katolik, yang meliputi makna teologis keagamaan, makna sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Sebagaimana dipahami dari paparan data dengan menggunakan alat analisis interaksionisme simbolis dan sosiologi fenomenologis, ditemukan fakta bahwa masyarakat Driyorejo Gresik memaknai keberadaan atau pendirian rumah ibadat, yakni gereja-gereja di kawasan perumahan non-dinas TNI AL tersebut sebagai simbol rivalitas dan *counterculture* terhadap keberadaan agama Islam yang secara mayoritas dianut oleh masyarakat Gresik dan diisyaratkan dalam jargon sebagai kota Santri.

Simbol rivalitas merujuk pada fakta sejarah terjadinya perang Salib, dimana perseteruan antara Islam dan Kristen dianggap merupakan trigger sejarah yang mensimbolkan dua kekuatan agama yang memiliki umat yang sebanding berusaha untuk meng-klaim diri sebagai pemegang kebenaran *(claim of truth)*. Kondisi juga diberi argumentasi dari ajaran yang menunjukkan bahwa perang melawan orang kafir adalah jihad atau martir, Fakta sejarah ini selalu dipahami sebagai simbol teologis yang mengisyaratkan bagi pemeluknya bahwa kekuatan yang membahayakan bagi eksistensi dan keyakinan agama adalah dua agama yang saling berkontestasi tersebut, yakni Islam dan Kristen.

Yang menarik dari temuan data penelitian ini adalah terdapatnya unsur kekuasaan yang dimainkan oleh oknum TNI AL aktif yang menjadi back up bagi pembangunan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendirian rumah ibadat (baca: Gereja-gereja) di kawasan perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo. Intervensi dari oknum ini oleh warga Driyorejo dianggap sebagai representasi kekuasaan yang berusaha memaksakan kehendaknya untuk mendirikan rumah ibadat tersebut. Namun, upaya itu bukan membuat warga takut dan menyetujui pendirian rumah ibadat tersebut, justru sebaliknya masyarakat di seputar perumahan dan para tokoh Agama di Gresik umumnya menjadi semakin kuat untuk menolak upaya pendirian tersebut. Mereka bahkan berusaha menandingi kerasnya keinginan dari oknum tersebut dengan melaporkan kesatuan dimana oknum tersebut berdinas. Selain itu, warga juga melayangkan sikap dan respon penolakan tersebut ke pemerintah daerah setempat agar segera mengambil tindakan jika tidak diinginkan terjadinya reaksi penolakan warga yang lebih meluas dan eskalatif. Dari fakta ini dapat dipahami bahwa pendirian rumah ibadat meskipun didukung atau *back up* oleh simbol-simbol kekuasaan Negara tetap tidak dapat mengalahkan keyakinan agama serta simbol-simbol teologis dari agama tertentu dalam hal ini adalah Islam.

Sedangkan simbol *counterculture* terhadap citra relijius Islami dan kota Santri mengisyaratkan bahwa kekuatan simbolik yang telah menjadi identitas dari suatu daerah atau komunitas tertentu akan sulit untuk ditembus atau dilawan dengan simbol atau strategi yang berlawanan. Hal ini dapat dilihat bahwa kekuatan simbolis keagamaan (baca: Kota Santri) yang telah menjadi ikon bagi masyarakat Gresik pada umumnya dan warga Driyorejo pada khususnya telah menjadi identitas daerah yang tidak bisa dihapus atau dilawan dengan muncul simbol-simbol baru apalagi yang berasal dari agama selain Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas warga Gresik. Oleh karena itu munculnya simbol-simbol tandingan terutama dari agama-agama lain akan direaksi sebagai ancaman yang akan merusak atau menodai identitas simbolik dari daerah atau komunitas tertentu. Kehadiran rumah ibadat atau gereja yang didukung oleh kekuasaan (baca: oknum TNI AL) dianggap sebagai upaya menodai atau merusak simbol-simbol identitas Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian pembahasan dan analisis tentang relasi antarumat beragama, studi terhadap makna keberadaan gereja-gereja di Perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut di Driyorejo Kota Baru Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, relasi antarumat beragama di Gresik pada umumnya dan Driyorejo pada khususnya, **pada tingkatan tokoh agama** berjalan baik hal ini ditandai dengan hubungan yang saling menghormati dan toleran dalam rangka pelaksanaan ajaran agama masing-masing. Saling menghormati dan toleran ditunjukkan dalam bentuk saling kunjung dan mendatangi undangan, bantuan sosial dalam bentuk pengamanan jalannya kegiatan seremoni peribadatan, penghormatan bagi mereka yang mempunyai hajat, kerjasama sosial seperti pengobatan gratis yang dilakukan tanpa membatasi dan membedakan dari segi penganut agama. Dalam perspektif pluralisme, masyarakat Driyorejo Gresik telah menjalankan roda kehidupan bermasyarakatnya sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme, yakni adanya ciri-ciri: warganya saling terlibat dalam energetis dengan keragaman (*the energetic engagement with diversity*), selain itu, warganya juga secara aktif berusaha memahami aneka perbedaan (*active seeking of understanding across line of difference*). Hal ini dapat dilihat dari kerjasama sosial budaya dalam bentuk kearifan budaya (*local wisdom*) dalam hal silahturahmi atau anjangsana baik dalam acara pengantinan atau kematian dan hari-hari besar keagamaan. Dalam masyarakat Driyorejo Gresik juga telah terpupuk komitmen bersama (*the encounter of commitment*). Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama di bidang sosial ekonomi terutama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik pada umumnya dan warga Driyorejo pada khususnya. **Namun** dengan kasus pendirian gereja di fasilitas umum perumahan Non Dinas TNI AL, yang ditandai adanya protes warga yang berujung pada penghentian pembangunan dan tidak dapatnya dimanfaatkan gereja yang hampir selesai dibangun tersebut, maka dapat dikatakan tingkatan toleransi antarumat beragama menempati posisi ***relative tolerance*** atau bahkan menuju ***lazy tolerance*** (*toleransi malas-malasan*). Hal ini menurut **Paul F. Knitter**, munculnya sikap toleransi jenis ini sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya.

Kedua, Terkait dengan pendirian gereja di Perumahan Non-Dinas TNI AL Driyorejo Gresik, berdasarkan analisis teori interaksionisme simbolik, dapat dikemukakan bahwa masyarakat Driyorejo Gresik menanggapi keberadaan dan pendirian gereja-gereja tersebut secara simbolis dalam dua arti, yakni simbol rivalitas dan simbol *counterculture*. Sebagai simbol rivalitas, keberadaan dan pendirian Gereja-gereja tersebut diartikan oleh masyarakat Gresik sebagai perpanjangan dari Perang Salib yang harus dilawan keberadaannya. Selain itu keberadaan Gereja-gereja tersebut diartikan sebagai missi Kristenisasi yang dikuatirkan akan mempengaruhi keyakinan umat Islam di Driyorejo Gresik. Sedangkan sebagai simbol *counterculture*, keberadaan rumah ibadat atau gereja-gereja tersebut diartikan sebagai simbol budaya tandingan yang dikuatirkan akan mengganggu atau menodai kota Gresik sebagai kota Santri dan religius Islami.

Ketiga, secara subjektif, kondisi relasi antarumat beragama dan sikap masyarakat Gresik terhadap pendirian gereja-gereja sangat dipengaruhi pemaknaan *a priori* dari penganut agama masing-masing. Dalam pendekatan sosiologi fenomenologis telah dikemukakan bahwa kerangka teoretis di dapat fakta bahwa penganut agama dalam hal ini umat Kristiani dan umat Islam memiliki pemaknaannya tersendiri terkait dengan pendirian gereja-gereja di Perumahan Non-Dinas TNI AL Driyorejo Gresik. Umat Kristiani memaknai pendirian gereja cenderung bersifat teologis, yakni gereja merupakan simbol spiritualitas yang dipergunakan untuk melakukan prosesi ritualitas keagamaan dalam terutama sebagai tempat pelayanan doa dan pertobatan. Gereja juga dianggap sebagai rumah Tuhan karena merupakan tempat bagi manusia terutama penganut Kristiani untuk mengadu dan berdialog melalui doa kepada Tuhan. Sementara bagi umat Islam, pendirian gereja-gereja di wilayah tersebut merupakan simbol ekspansionisme dari misionaris Kristen yang akan melakukan misi kristenisasi di lingkungan umat Islam. Pemaknaan ini didukung oleh pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang menyatakan bahwa penganut Nasrani dan Yahudi tidak akan rela hingga umat Islam tunduk dan masuk kepada agama mereka. Selain itu trauma sejarah kolonialisme yang di bonceng oleh missionaris Kristen yang dalam prakteknya sering mengajak dan membujuk umat Islam dengan berbagai macam bentuk iming-iming atau ancaman untuk ikut dalam agama Kristen.

B. Implikasi Teoretik

Penggunaan pendekatan teoretis pluralism, interaksionisme simbolik dan sosiologi fenomenologis dalam memahami konteks relasi antarumat beragama sangat menarik. Karena dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kombinasi pendekatan keduanya akan diperoleh deskripsi yang lengkap. Pendekatan pluralisme memberikan arah deskripsi yang bersifat sinkronik, yakni melihat sistem sosial sebagai satu kesatuan antar unsur atau elemen-elemen yang saling tergantung satu dengan lainnya, dan masing-masing menjalankan fungsinya sehingga membentuk satu kesatuan sistem dinamis. Dan melalui pendekatan struktural-fungsionalisme ini juga didapat fakta bahwa sistem sosial memiliki mekanisme pemeliharaan dan pengendalian sistemik, karena sistem sosial memiliki kerentanan untuk berubah karena pengaruh dari kekuatan ekstra sistemik.

Pendekatan interaksionisme simbolis akan memberikan analisis interaksionisme berdasarkan keberadaanm simbol yang secara sosial dipahami dan dijadikan referensi dalam melakukan interaksi sosial. Hubungan antar elemen dalam lembaga keagamaan seperti sikap akomodatif dan toleransi didasari oleh pemaknaan subjektif terhadap simbol-simbol keagamaan. Dengan cara ini keharmonisan relasi antarumat beragama dapat terbentuk.

Sementara pendekatan sosiologi fenomenologis memberikan deskripsi tentang kemampuan subjektif dan intersubjektif dalam memahami makna terhadap realitas tertentu. Oleh karena itu analisis sosiologi fenomenologis cenderung melihat bagaimana aktor menafsirkan dan memberi makna terhadap pesan-pesan simbolik dalam proses interaksinya tersebut. Dalam konteks relasi antarumat beragama, analisis sosiologi fenomenologis ini dapat memberikan kejernihan makna yang melatarbelakangi pemahaman atau tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing penganut agama. Hal ini menjadi menarik karena pemaknaan yang dilakukan oleh individu sangat dipengaruhi oleh simbol, bahasa atau mungkin nilai-nilai tradisi keagamaan. Begitu sangat subjektifnya kadangkala, pemaknaan penganut keagamaan lebih bersifat bawah sadar dan sulit untuk diungkapkan melalui instrumen bahasa.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terfokus pada relasi antarumat beragama dan kaitannya dengan pendirian pendiri gereja-gereja di fasilitas umum Perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut Kota Baru Driyorejo Kabupaten Gresik. Meskipun sikap umat beragama terutama umat Kristiani dan umat Islam terhadap pendirian gereja-gereja ini memiliki faktor-faktor yang sangat kompleks dan multidimensional, tetapi penelitian ini hanya difokuskan pada kondisi sosial-keagamaan terutama relasi antar-umat beragama di Kabupaten Gresik yang mengalami gangguan dan keresahan yang diakibatkan oleh pendirian gereja-gereja tersebut.

Sikap umat beragama dalam pendirian gereja-gereja memang terkesan sangat subjektif. Tetapi dalam proses bermasyarakat faktor sikap terhadap penganut agama lain mnerupakan hal yang sangat sensitif, sehingga jika tidak dipelihara dan dijaga tidak menutup kemungkinan akan mengalami gangguan atau keresahan sosial hingga terjadinya konflik terbuka dan eskalatif. Dalam konteks relasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar-umat beragama memang terdapat banyak dimensi yang dapat digali terkait dengan mengapa hubungan antar-umat beragama di satu daerah sangat mantap dan sulit untuk dipecah-belah tetapi sebaliknya di daerah lain kondisi hubungan antarumat beragama sangat rentan menuju kearah konflik.

Oleh karena itu selain fokus terhadap sosial-keagamaan dalam penelitian ini tentu masih banyak hampiran atau pendekatan yang dapat dijadikan fokus dalam meneliti persoalan penolakan terhadap keberadaan gereja-gereja ini, seperti misalnya dari aspek ekonomi atau politik. Aspek-aspek ini tentunya akan memberikan kelengkapan data terhadap gangguan atau keresahan sosial dalam masyarakat Gresik terhadap pendirian gereja-gereja, namun karena keterbatasan lingkup penelitian ini, maka aspek-aspek tersebut tidak dimasukkan menjadi faktor atau variablenya.

D. Rekomendasi

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik pada khususnya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya dalam bidang pembinaan kerukunan umat beragama. Sedangkan berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan bahwa secara yuridis formal pembangunan gereja-gereja yang berada di fasilitas umum perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut di Kotabaru Driyorejo tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub dalam PBM Menag dan Mendagri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah setempat.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka kasus ini telah diselesaikan secara mediasi, yakni berdasarkan hasil kesepatakan antara pemerintah dan masyarakat Gresik, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, yang dalam hal ini diserahkan kepada KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah). Keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah Provinsi bahwa gereja-gereja yang sudah hampir selesai pembangunannya yang berada di fasilitas umum Perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBM dan Peraturan Daerah, maka bangunan tersebut harus dialihfungsikan peruntukannya sebagai fasilitas umum bukan sebagai rumah ibadat.

Dalam realisasinya keputusan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak panitia pembangunan gereja. Oleh karena itu hasil penelitian ini ***direkomendasikan*** akan menjadi bagian dari temuan di lapangan yang dapat mendukung bagi keputusan pemerintah untuk mengembalikan bangunan fisik rumah ibadat (gereja) tersebut sebagai fasilitas umum kembali. Dan untuk menunjukkan kemantapan hubungan antar umat beragama dan wibawa fungsi lembaga pemerintahan di masyarakat Gresik, agar keputusan tersebut segera ditindaklanjuti. Karena selain tidak nyaman dilihat secara objektif, juga mengesankan pandangan bahwa masih ada masalah dalam kaitan hubungan antarumat beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ahmad, Haidlor. *Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Ali, A. Mukti. "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (ed.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: INIS, 1992.

Ali, Mursyid. *Studi Kasus Rumah Ibadat di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Amal, M. Khusna. "Komitmen Agama Merajut Kerukunan Otentik di Perkotaan" dalam *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kegamaan*, No. 65, Th. XXXI, Juli, 2008.

Aminuddin. *Semantik: Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.

Anderson, Bennedict. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang.* Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2001.

Ardianto, Elvinaro dan Q-Anees, Bambang. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.

Arifin, Syamsul et. Al. "Pluralisme Keagamaan di Pedasaan: Studi Pola Interaksi Sosial Tiga Kelompok Agama: Islam, Kristen, dan Budha. Jakarta: Seri Penerbitan Ditjen BAGAIS Kemenag, 2004.

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asry, M. Yusuf. *Studi Kasus tentang Perselisihan, Pendirian Rukmah Ibadat di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Assegaf, Arifin. "Memahami Sumber Konflik Antariman" dalam Th. Sumartana (ed.) *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: DIAN Institute, 2005.

Aziz S.R, Abdul. "Menyusun Rancangan Penelitian Kualitatif" dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2010*. Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2010

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik., Gresik Dalam Angka 2012, Badan Perencanaan Pembangunan, BPS Kabupaten Gresik, 2012.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat.* Jakarta: Gramedia, 1996.

Bambach, Charles R. *Heidegger, Dilthey, and The Crisis of Historicism*. Cornell University Press, 1995.

Bambach, Charles R. *Heidegger, Dilthey, And The Crisis Of Historicism*, Cornell University Press, 1995.

Basuki. "Inklusivisme Faham Keagamaan Muslim-Kristiani di Desa Klepu"dalam *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VII, No. 26, April-Juni, 2008.

Berger Peter L. dan Luckmann, Thomas. *The Construction Social of Reality: Treaties of Sociology of Knowledge*. USA: Penguin Group, 1966.

Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. *The Construction Social of Reality: Treaties of Sociology of Knowledge*. USA: Penguin Group, 1966.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-----. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1999.

Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1991.

Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman.* Jakarta: Gramedia, 2002.

Billah, M. M. "Pluralitas Agama: Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM," Makalah. Malang: UIN Malang, 2007

Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. NewJersey: Prentice-Hall, Inc., 1969.

Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science*. New York: John Wiley and Sons, 1975.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2009.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.

Cholil, Suhadi. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesi 2012 Program Studi Agama dan Lintas Budaya. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013.

Damsar. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2011.

den Berghe, Pierre L. Van. "Dialectic and Functionalism: Toward a Synthetis", dalam N.J. Demerath III, et. Al., eds., *System, Change, and Conflic*. London: Collier-Macmillan Limited, 1967.

Departemen Agama RI, Pusat Kerukunan Umat Beragama, *Manajemen Konflik Umat Beragama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003.

Dilthey, Wilhem. *Introduction to the Human Sciences*. Princeton: Princeton University Press, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eck, Diana L. “What is Pluralism”, *Nieman Reports God in the Newsroom Isuue*, Vol. XLVII, No. 2, Summer, 1993.

Fanani, Muhyar. “Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat” dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*. Salatiga: P3M STAIN Salatiga, 2003.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth And Method*. New York: Crossroad, 1989.

Graaf, De. *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.

Graaf, H.J. de. *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Grathoff, Richard (ed.). *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*. Bloomington and London: Indiana University Press, 1978

Griffin, Emory A. *A First Look at Communication Theory*. Boston: McGraw-Hill, 2006.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid 2*. Jakarta: Kanisius, 1980.

Hakim, Bashori A. “Studi Kasus Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban, dan Pentupan Rumah Ibadat di Kabupaten Badung-Bali”, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Hasyim, Umar. *Sunan Giri Dan Pemerintahan Ulama Di Giri Kedaton*. Kudus: Menara, 1979.

Haviland, William A., Prins, Harald E. L., Walrath, Dana., dan McBride, Bunny. *Anthropology: The Human Challenge*. Kansas: Cengage Learning, 2010

Herman-Kinney, Nancy J. dan Reynolds, Larry T. *Handbook of Symbolic Interactionism*. New York: AltaMira, 2003.

Hudson, RA. *Sociolinguistic*. UK: Cambridge University Press, 1980.

Husein, Fatimah. *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia-The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspectives*. Bandung: Mizan, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalikin, Ahsanul. *Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif PBM: Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul Kecamatan Limo Kota Depok*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012.

Kartodirdjo, Sartono. *Masyarakat dan Kelompok-kelompok Sosial*. Yogyakarta: Bhatara Karya, 1972.

Kholil, Muhammad. "Pluralisme Agama: Telaah Kritis atas Pemikiran Nurcholis Madjid". Tesis—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Kimball, Charles. *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi. Bandung: Mizan, 2003.

Kota Gresik: *Sebuah Perspektif Sejarah dan Hari Jadi*. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, 1991.

Koyama, Kasoke. "A Theological Reflection on Religious Pluralism", dalam http://www.findarticles.com/cf _0/m2065/2_51/56063939/print.jhtml, (8 Februari 2003.

Kridalaksana, Harimurti. *Kamus Linguistik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.

Kustini. Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006. Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI, 2009.

Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005

M. Yahya, et.al., *Respons Masyarakat Awam (Islam-Kristen) Terhadap Dialog Antarumat Beragama di Kabupaten Malang*. Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Depag RI. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'ruf, Umar. "Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.

Macionis, John., and Gerber, Linda. *Sociology*. Toronto, ON: Pearson Canada Inc. 2011.

Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.

Mahfuz, Abdul Ghaffar. *Tokoh Agama dalam Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama*. Palembang: IAIN Raden Fatah, 1997.

Maliki, Zainudin. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.

Mangoenadirdjo, Kijai Ngabei. *Serat Sedjarah Gersik*. Gresik: PWGTPP, 1932.

Mas'ud, Abdurrahman (ed.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: t.tp., 2011.

Mas'ud, Abdurrahman dkk (ed). *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2011.

Metini, Wanda. "Komplek Makam Sunan Giri: Tinjauan Arkeologis", dalam Dukut Imam Widodo (ed.). *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muchlas., Kerajaan Giri, dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo, Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

Muchtar, Ibnu Hasan. *Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012.

Muchtar, Ibnu Hasan. *Studi Kasus terkait Perselisihan, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota penelitian di Kota Jayapura*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Mukarrom, Ahwan. *Kebatinan Islam di Jawa Timur*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Mukhlas. "Kerajaan Giri", Dukut Imam Widodo (ed.). *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

Munawar-Rahman, Budhy. *Argumen Islam untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Mustakim. "Para Makelar di Kota Saudagar" dalam dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo (ed.). Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

------. "Subandar Penguasa Pelabuhan" dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo (ed.). Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

------. *Gresik dalam Lintasan Lima Zaman: Kajian Sejarah Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya*. Gresik: Pustaka Eureka, 2010.

------. *Matahari Terbit di Kota Wali: Sejarah Pergerakan Muhammadiyah Gresik 1926-2010*. Gresik: MUHI Press, 2011.

------. *Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik*. Gresik: Dinas Pendidikan dan kebudayaan, 2005.

Nadar, F.X. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006

Ndraha, Talizuhudu. *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Ogden, C. K., dan Richards, I. A. *The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism*. Magdalene College: University of Cambridge, 1923.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Priyatno, Djoko. “Kedewasaan Umat dan Kerukunan Nasional dalam Perspektif Iman Kristiani”dalam *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. IV, No. 15, Juli-September, 2005.

Qowa’id. “Dialog Antarumat Beragama di Kalimantan Selatan”, *Penamas*, 39, XIV, 2000.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.

Rikclefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (New York: Palgrave MacMillan, 2008.

Ritzer, Goerge. *Teori Sosiologi*, terj. Nurhadi. Yogyakarta. Kreasi Wacana, 2008.

Ritzer, Goerge., dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Kontemporer*, terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ropi, Ismatu. *Fragile Relation: Muslims and Christians in Modern Indonesia*. Jakarta: Logos, 2000.

Rosyidah, Feryani Umi. “Kerukunan Umat Beragama: Studi tentang Hubungan Umat Islam dan Komunitas Kristen di Komplek Wisma Waru Sidoarjo”. Tesis—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

Ruhana, Akmal Salim. *Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian*, *Penertiban*, *dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota dan Kabupaten Bogor Jawa Barat*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Rumadi. “Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara” dalam Ahmad Suaedy, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Sachedina, Abdul Azis. *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*, terj. Satrio Wahono. Jakarta: Serambi, 2002.

Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sairin, Wienata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-5, 2011.

Salam, Solichin. *Sekitar Wali Sanga*. Kudus: Menara, 1960.

SETARA Institute, *Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009*. Jakarta: SETARA Institute, 2009.

Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.

Simmel, Georg. *Die Probleme der Gechichtsphilosophie. Eine erkentnistheoretische Studie*. Munich: Verlag von Dunker und Humboldt, 1920.

Smelser, N.J., & Baltes, P.B. (eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2001.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

Stolley, Kathy S. *The Basic Sociology*. USA: Greenwood Press, 2005.

Suaedy, Ahmad. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Sudikin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia Surabaya, 2002.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

-----. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Suwariyati, Titik. "Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik" dalam Haidlor Ali Ahmad (ed.), *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat*. Jakarta: Badan Litbang, 2012.

Syani, Abdul. *Sosiologi: Sistematika*, *Teori*, *dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 2005.

Tim Peneliti dan Penyusun. *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991.

Toha, Mochammad. "Tradisi Nyekar di Surowiti: Studi Kontestasi Pandangan Elite Agama di Gresik tentang Nyekar di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur". Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Trevino, A. Javier. *Talcott Parson Today: His Theory and Legacy in Contemporary Sociology*. USA: Rowman and littlefield Publishers, Inc., 2001.

Tualeka ZN, Hamzah. "Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama: Studi Tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam Perspektif Masyarakat". Disertasi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Udehn, Lars. *Methodological Individualism: Background, History and Meaning*. Routledge, 2001.

Ujan, Andre Ata dkk. *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT Indeks, 2011.

Ulfa, Isnatin. "Perspektif al-Qur'an tentang Pluralisme Agama: Telaah Komparatif terhadap Pluralisme Agama dalam Tafsir al-Bayan dan Tafsir al-Mizan". Tesis--Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel, 2003.

Whimster S. (ed.) *The Essential Weber: A Reader*. London: Routledge, 2004.

Widodo, Dukut Imam dkk., *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

Zaenuddin, M. *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainuddin. “Relasi Islam-Kristen: Konstruksi Elit Agama tentang Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama di Malang”. Disertasi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Zeitlin, Irving M. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: UGM Press, 1998.

Zulaikha, Siti. “Toleransi Awu-awu: Potret Dialog Antar Agama di Jawa Timur”, *Gerbang*, 2002-2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id